



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

Kata Pengantar

Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Adapun maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran kepada publik serta seluruh stakeholder terhadap pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, yang memberi arah secara jelas bagi organisasi dan seluruh pegawai untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima.

Dalam penyusunan LKIP ini kami menyadari masih belum optimal, oleh sebab itu diharapkan adanya kritik dan saran untuk penyempurnaan di masa mendatang. Harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta ini dapat memberikan manfaat demi peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas di masa yang akan datang. Amin.

Jakarta, Januari 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
EKSEKUTIF SUMMARY	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 DATA UMUM ORGANISASI.....	1
1.2 SUSUNAN ORGANISASI	2
1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	4
1.4 SUMBER DAYA DPRKP.....	5
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. PERNYATAAN VISI DAN MISI.....	14
2.2. TUJUAN STRATEGIS.....	15
2.3. SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA STRATEGIS...17	
2.4. PERBANDINGAN TARGET RENSTRA 2017-2022	19
2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	21
2.6. KEGIATAN STRATEGIS DAERAH KAMPUNG PRIORITAS.....	54
2.7. TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU ANGGARAN 2022.....	55
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	56
3.1 REALISASI RENSTRA 2022	57
3.2 PERBANDINGAN REALISASI RENSTRA 2017-2022	57
3.3 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	59
3.4 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA.....	63
3.5 REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN 2022	73
3.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	75
3.7 EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP TARGET NASIONAL	76
BAB IV PENUTUP.....	79
4.1 KESIMPULAN.....	79
4.2 SARAN	80
LAMPIRAN	

EKSEKUTIF SUMMARY

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Sakip dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan suatu bentuk pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk,

1. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan Good Governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah dan;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Adapun sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan, sebagai bagian integral dalam proses perencanaan strategis telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Dimana pertimbangan utama dalam penentuan sasaran adalah kondisi, tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Tahun 2017 – 2022.

Fokus utama dalam pencapaian sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah Backlog Hunian

Jumlah Backlog Hunian ini adalah menunkan jumlah kebutuhan hunian di DKI Jakarta dengan cara terbangunnya unit hunian rumah susun yang pendanaannya

melalui APBD pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Pada indikator kinerja ini capaiannya adalah 99.778% yaitu dengan realisasi menurunkan sebesar 288.393 dari 287.755 yang ditargetkan. Capaian 2022 ini berhasil dicapai dengan **SANGAT BAIK**.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Susun ini adalah nilai dari kepuasan penghuni rumah susun berdasarkan hasil survei melalui sistem JAKI. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2022 ini adalah 82.29 termasuk dalam kategori **BAIK**. Realisasi ini belum mencapai target yang ditetapkan pada Renstra 2017 - 2022 yaitu target nilai 88.5.

3. Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh

Capaian pada indikator kinerja ini adalah sebesar 100% yaitu dengan realisasi penurunan jumlah RW Kumuh yang ada menjadi 2 RW Kumuh dari target penurunan sebanyak 23 RW Kumuh capaian ini termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK**.

Sebagai evaluasi pada Tahun 2022 ini, Pencapaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil penilaian kinerja yang menggunakan penghitungan dengan form Rencana Kinerja Tahunan dan form Pengukuran Kinerja maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022 dikategorikan **BAIK** dengan nilai capaian (penyerapan anggaran) sebesar **86,75%** yang didasarkan pada realisasi penggunaan seluruh anggaran Dinas, Suku Dinas, Pusdatin, Unit Pengelola Rumah Susun dan Unit Pengelola Dana Perumahan. Capaian ini telah menggambarkan kondisi obyektifitas yang ada.



Bab I

PENDAHULUAN

1.1 DATA UMUM ORGANISASI

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di sektor perumahan dan kawasan permukiman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dinas Perumahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 158 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta .

Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas :

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

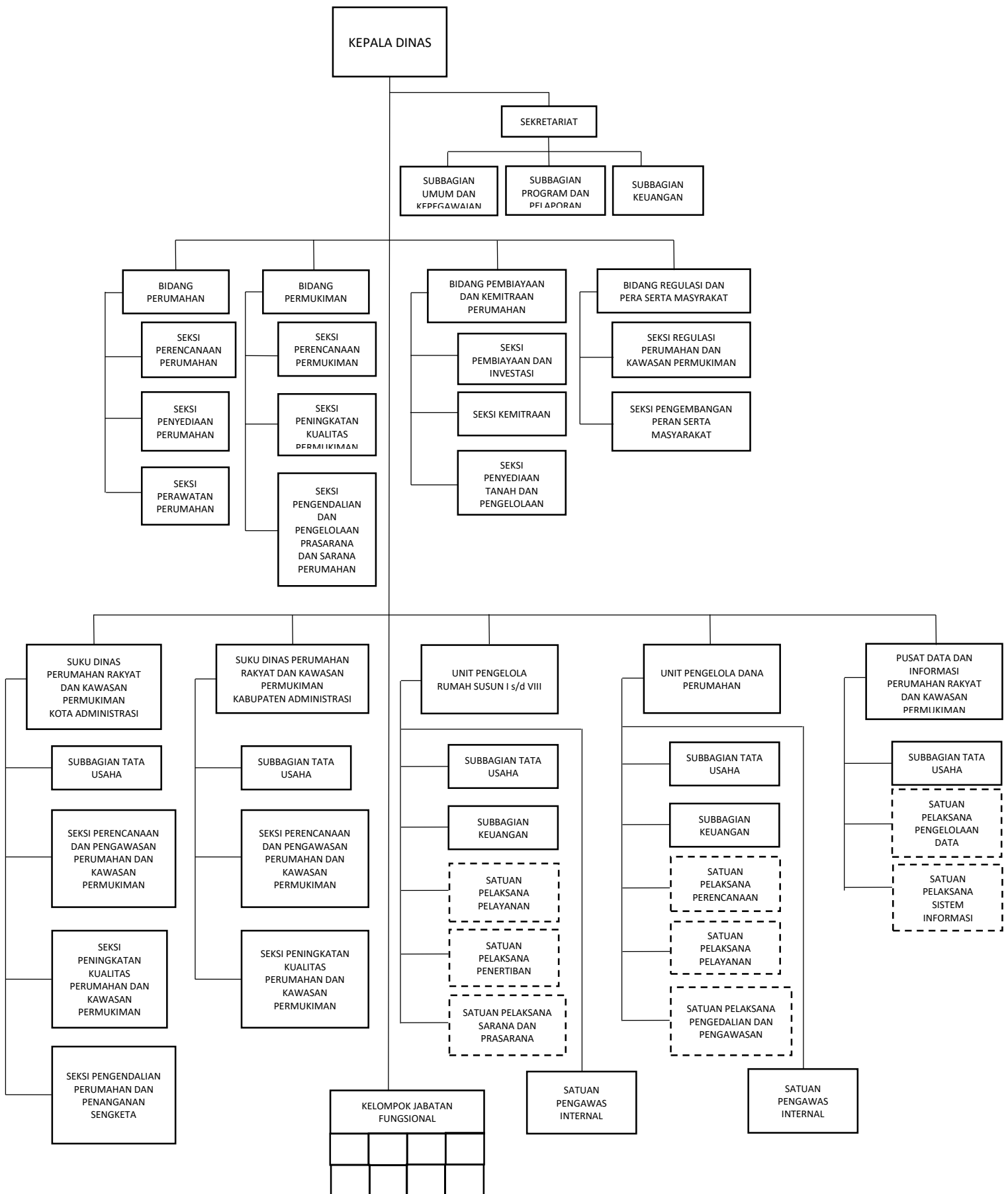
❖ **Kepala Dinas ;** bertugas :

- memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas Kota, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional ;

- melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), dan atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ; dan
- melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).

1.2 SUSUNAN ORGANISASI

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Suku Dinas Kota Administrasi, 1 (satu) Suku Dinas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, 8 (delapan) Unit Pengelola Rumah Susun, 1 (satu) Pusat Data dan Informasi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan 1 (satu) Unit Pengelola Dana Perumahan serta Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta



1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017–2022, telah disusun rencana kerja yang tercermin pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021 masing-masing untuk kegiatan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Rencana kerja tersebut disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai instansi yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan tugas perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Untuk dapat memenuhi tanggung jawab yang berat tersebut perlu terlebih dahulu dipahami segala permasalahan pada sektor perumahan dan permukiman saat ini, karena kenyataan menunjukkan bahwa urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sering tumbuh sebagai sumber permasalahan yang seakan tiada berujung bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Permasalahan perumahan dan permukiman saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Backlog hunian/perumahan yang semakin tinggi terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
2. Pembangunan rusunawa belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian;
3. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR baik melalui pembangunan dan pembiayaan masih memerlukan dukungan dalam bentuk regulasi perumahan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
4. Proses perijinan pembangunan yang kompleks dan memakan waktu yang lama;

5. Serah terima aset bangunan rumah susun yang dibangun oleh Pemerintah Pusat yang belum dilakukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga menghambat proses pemeliharaan rumah susun;
6. Kondisi kerusakan bangunan rumah susun yang sangat membutuhkan pemeliharaan dan perawatan;
7. Lahan terbatas terutama di lokasi strategis (lahan siap bangun);
8. Mahalnya dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan dalam perkotaan;
9. Dibutuhkannya sarana prasarana perumahan dan permukiman;
10. Masih diperlukannya pembinaan, pemberdayaan dan pelayanan terhadap penghuni Sarusun, Rusunami, dan Rusunawa di wilayah DKI Jakarta;
11. Banyaknya kawasan permukiman kumuh yang harus ditata untuk meningkatkan kualitas permukiman;
12. Penataan permukiman kumuh terkendala pada aspek legalitas lahan.

Permasalahan tersebut di atas sangat mempengaruhi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021. Adanya permasalahan tersebut di atas juga menguatkan tekad Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta bersama seluruh aparatnya untuk melaksanakan amanat yang telah diterima sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah pembentukannya melalui pelayanan yang profesional.

1.4 SUMBER DAYA DPRKP

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebagai Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang berkaitan dengan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRKP sebagai sebagai salah satu Lembaga Teknis yang ada di Provinsi DKI Jakarta memiliki sumber daya berupa sumber daya manusia dan aset-aset untuk

menunjang kinerja DPRKP. Berikut ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh DPRKP Provinsi DKI Jakarta.

❖ SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia SDM di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Aparatur Sipil Negara tercatat sejumlah 310 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 Orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan berbagai jabatan, pangkat, dan golongan pada bulan Desember 2022. Sumber Daya Manusia tersebut terbagi dalam masing-masing unit kerja yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi Kesekretariatan, 4 Bidang Teknis, 6 Suku Dinas, 8 Unit Pengelola Rumah Susun, 1 Unit Pusat Data dan Informasi, dan 1 Unit Pengelola Dana Perumahan. Jumlah SDM masing-masing unit kerja yang ada di DPRKP Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada berikut:

Tabel SDM DPRKP Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Rekapitulasi ABK

No.	Unit Kerja	Jumlah SDM
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	25
3	Bidang Perumahan	26
4	Bidang Permukiman	20
5	Bidang Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan	12
6	Bidang Regulasi dan Peran Serta Masyarakat	14
7	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat	15
8	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat	16

No.	Unit Kerja	Jumlah SDM
9	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan	19
10	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur	15
11	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara	19
12	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kepulauan Seribu	13
13	Unit Pengelola Rumah Susun I	15
14	Unit Pengelola Rumah Susun II	10
15	Unit Pengelola Rumah Susun III	11
16	Unit Pengelola Rumah Susun IV	9
17	Unit Pengelola Rumah Susun V	12
18	Unit Pengelola Rumah Susun VI	11
19	Unit Pengelola Rumah Susun VII	12
20	Unit Pengelola Rumah Susun VIII	12
21	Unit Pengelola Dana Perumahan	10
22	Pusat Data dan Informasi	14
Jumlah Total		310

Berdasarkan kepangkatan atau golongannya, pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta terbagi dalam empat golongan.

Tabel SDM DPRKP Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan sebagai berikut:

Golongan	Jumlah Pegawai				Jumlah
	a	b	c	d	
IV	22	10	-	-	32
III	92	44	56	26	218
II	7	12	26	11	56
I	-	-	2	2	4
Total					310

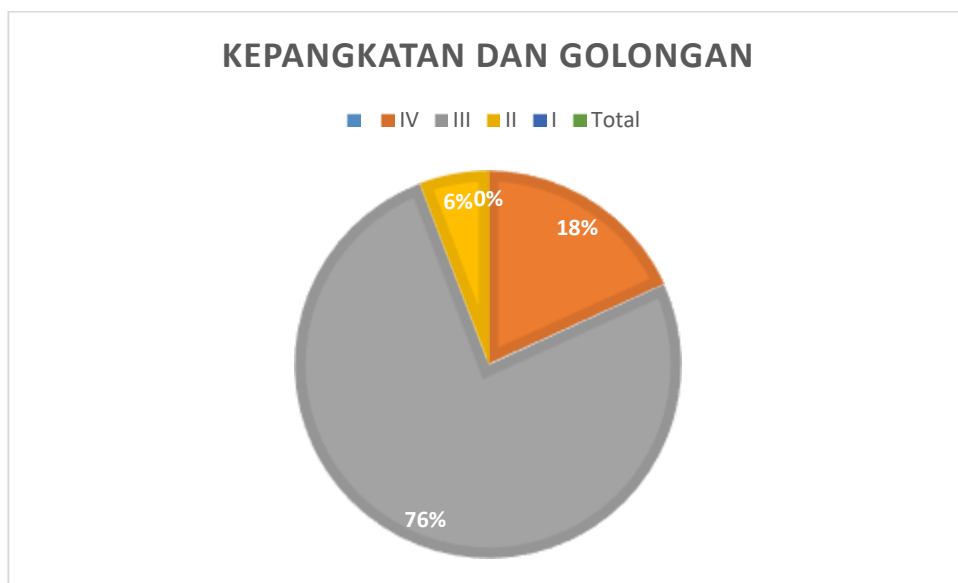


Diagram SDM DPRKP Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

Untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Tabel 2.3 di atas, diketahui bahwa sebagian besar pegawai yang bekerja di DPRKP DKI Jakarta bergolongan III yaitu sebanyak 218 orang atau sekitar 76% sedangkan pegawai yang berada pada golongan IV sejumlah 32 orang atau sekitar 18%.

Prosentase golongan III yang sebesar 76% adalah PNS yang memiliki kemampuan atau kompetensi SDM yang baik karena setara dengan tingkat Pendidikan S1. Semakin tinggi golongan yang dimiliki pegawai menunjukkan semakin tinggi juga Pendidikan, kemampuan dan pengalamannya. Hal ini menunjukkan pula semakin baiknya kualitas SDM yang dimiliki oleh DPRKP

Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu dengan SDM yang ada di DPRKP Provinsi DKI Jakarta ternyata jika dilihat dari data diatas lebih banyak yang memiliki Pendidikan tinggi sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan pada pekerjaan yang ada pada DPRKP Provinsi DKI Jakarta. Selain itu kebutuhan tenaga pendukung (tingkat Pendidikan menengah) sudah memenuhi menurut jumlah dan kualifikasi. Berikut ini adalah kualifikasi Pendidikan SDM di DPRKP.

Tabel Kualifikasi Pendidikan Staff PNS DPRKP Provinsi DKI Jakarta

No	Kualifikasi	Jumlah
1	S3	0
2	S2	39
3	S1	171
4	Diploma	40
5	SMA	52
6	SMP	5
7	SD	2

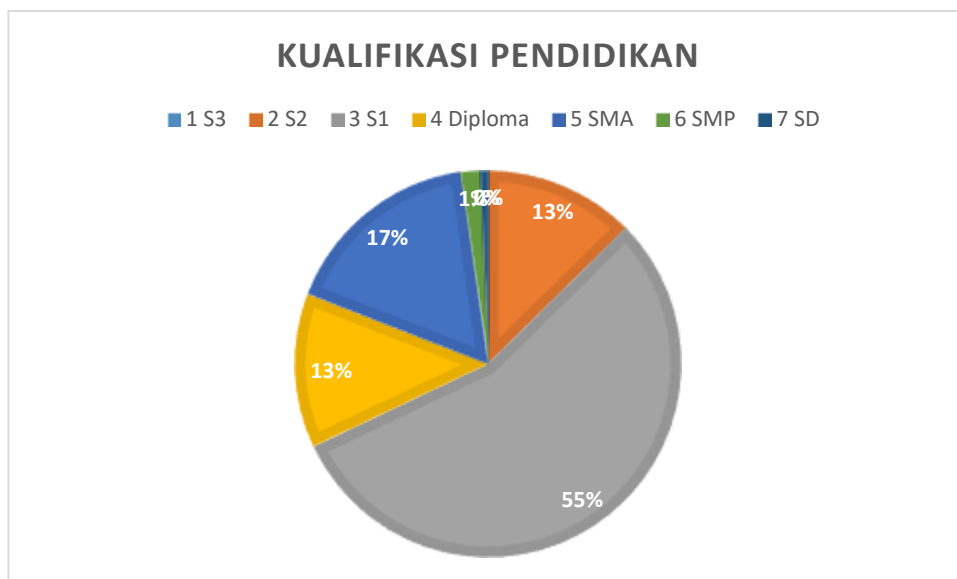


Diagram 2.1 Kualifikasi Pendidikan Staff PNS DPRKP Provinsi DKI Jakarta

Tingginya kualitas SDM yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta juga didukung oleh adanya Tenaga Non PNS atau PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan). Tenaga non PNS yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

merupakan pegawai yang direkrut dengan standar kompetensi tertentu yang dibutuhkan oleh DPRKP sehingga diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan di DPRKP Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan.

Tabel Jumlah Staff Non PNS DPRKP Provinsi DKI Jakarta

REKAPITULASI PJLP DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PER 30 DESEMBER 2022																		
NO	POSISI	DPRKP	Sudin Jakarta	Sudin Jakarta	Sudin Jakarta	Sudin Jakarta	Sudin Jakarta	Sudin Kep.1000	UPRS I	UPRS II	UPRS III	UPRS IV	UPRS V	UPRS VI	UPRS VII	UPRS VIII	Pusdatin	Jumlah
1	Petugas Front Office	11	1	2	-	1	-	-	16	13	17	13	14	18	31	31	4	172
2	Petugas Rumah Tangga	12	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17
3	Petugas Pengemudi	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
4	Pengelola Data Pengukuran Kelas C	4	3	-	1	6	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
5	Petugas Caraka	6	1	1	1	1	-	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	23
6	Petugas Penunjang Juru Ukur	-	3	5	5	4	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
7	Juru Gambar	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
8	Mekanikal Elektrikal	4	-	-	-	-	-	-	64	54	65	58	49	63	104	64	-	525
9	Petugas Operator Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10	Petugas Customer Relation Officer	-	-	-	-	-	-	-	9	10	6	12	11	19	11	10	-	88
11	Petugas BLUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12	Petugas Keamanan	32	-	-	-	-	-	-	118	85	135	117	73	122	181	113	-	976
13	Petugas Kebersihan	26	-	-	-	-	-	-	84	110	200	96	93	115	133	93	-	950
TOTAL PEGAWAI		99	11	10	10	15	12	5	292	273	424	298	241	338	462	313	6	2809

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Tenaga Non PNS/PJLP bukan hanya terbatas pada tenaga administrasi, Mekanikal/elektrikal, Petugas Keamanan, dan Petugas kebersihan saja namun ada juga Tenaga Teknis dan CRO agar mencapai standar kinerja yang diharapkan sesuai dengan indikator berdasarkan program yang telah disusun.

Organisasi Pemerintah Daerah tidak selalu bisa mendapatkan semua karyawan yang mereka butuhkan dari staf yang ada sekarang, dan mereka juga tidak bisa sembarang melakukan perekrutan pegawai tetap karena sistem perekrutan PNS/ASN mengikuti kebijakan pemerintah.

Sumber rekrutmen eksternal meliputi individu-individu yang saat ini bukan merupakan anggota organisasi. Manfaat terbesar rekrutmen eksternal adalah bahwa jumlah pelamar yang lebih banyak dapat direkrut. Hal ini tentunya mengarah kepada kelompok pelamar yang lebih besar dan kompeten daripada yang normalnya dapat direkrut secara internal. Pelamar dari luar tentu membawa ide, teknik kerja, metode produksi, atau pelatihan yang baru ke dalam organisasi yang nantinya akan menghasilkan wawasan baru kedalam

profitabilitas. Setiap organisasi atau perusahaan secara periodik memerlukan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja diluar organisasi.

Secara garis besar proses rekrutmen Pendamping terdiri dari 5 (lima) tahapan pokok yaitu:

1. pemetaan kebutuhan,
2. pengumuman,
3. seleksi pasif, seleksi administrasi
4. seleksi aktif melalui wawancara, dan test tertulis,
5. serta tahap pembekalan melalui pelatihan.

Rekrutmen NON PNS/PJLP ini harus mampu menyeleksi pelamar/calon sesuai kompetensi yang ditetapkan, dan merekrut jumlah sesuai kebutuhan.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2022. Analisis atas capaian kinerja beserta permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam tahun anggaran 2022 akan memungkinkan diidentifikasikannya pemecahan masalah bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI tahun 2022 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan	: Memuat gambaran singkat tentang organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja	: Memuat Perencanaan Strategis dimulai Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja serta cara pencapaian tujuan dan sasaran juga rencana kinerja tahun 2022.
Bab III Akuntabilitas Kinerja	: Memuat capaian kinerja tahun 2022, evaluasi kinerja, analisis pencapaian kinerja dan aspek keuangan.

Bab IV Penutup

: Memuat kesimpulan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan saran.

Bab II

PERENCANAAN KINERJA



Pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2022 yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 ini mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2017-2022. Dalam rangka menindaklanjuti SE MENPAN RB No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Instansi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini disusun sebagai suatu *prototipe*, yaitu melaporkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2022 (sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020).

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2017-2022 yang memberi arah secara jelas bagi organisasi dan seluruh pegawai untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima.

Rencana Strategis ini memiliki kesinkronan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses penyusunan Rencana Strategis ini telah ditetapkan secara bersama-sama dan telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

2.1. PERNYATAAN VISI DAN MISI

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, telah ditetapkan visi:

"Terwujudnya Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta yang layak huni, terjangkau, aman, terpadu dan berkelanjutan"

Dalam perumusan visinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah memperhatikan keselarasannya dengan visi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, mengingat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Satuan Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Disamping itu juga memperhatikan kondisi lingkungan dan wilayah yang ada serta keberadaan dan peranan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

PERNYATAAN MISI

Pernyataan visi yang dikemukakan di atas merupakan cita-cita dan idealisme yang ingin dicapai serta harus menjadi komitmen segenap personil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkannya. Dengan pernyataan visi ini diharapkan seluruh pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui keberadaan, peran, dan program instansi ini secara tepat.

Sebagai upaya nyata untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah pernyataan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta yang menggambarkan hal yang perlu dilaksanakan, sehingga hal yang masih abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi.

Pernyataan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perumahan rakyat yang layak huni, dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terjangkau untuk semua masyarakat.
2. Menciptakan pelayanan yang optimal di sektor perumahan dan permukiman.
3. Membangun kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

2.2. TUJUAN STRATEGIS

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan Tujuan dan sasaran Jangka menengah. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan menangani permasalahan yang dihadapi DPRKP Provinsi DKI Jakarta. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi DPRKP Provinsi DKI Jakarta. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran dari masing-masing misi DPRKP Provinsi DKI Jakarta:

***Misi pertama* : Mewujudkan perumahan rakyat yang layak huni, dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terjangkau untuk semua masyarakat.**

Tujuan Strategis :

Meningkatkan penyediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran Strategis :

Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

***Misi kedua* : Menciptakan pelayanan yang optimal di sektor perumahan dan permukiman.**

Tujuan Strategis :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

Sasaran Strategis :

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

***Misi ketiga* : Membangun kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial;**

Tujuan Strategis :

Mewujudkan pembangunan (permukiman) yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial;

Sasaran Strategis :

Terwujudnya kawasan (permukiman) perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya.

2.3. SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA STRATEGIS

Sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat dicapai.

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan/ dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan

misi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Ikhtisar program dan kegiatan setelah perubahan anggaran APBD, pada masing-masing sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

TARGET RENSTRA 2022						
No	Tujuan	Tujuan Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2022
1	Mewujudkan regenerasi kota dengan penyediaan infrastruktur berkelanjutan yang mampu menyelesaikan masalah kota	Most Livable City Index (MLCI)	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Jumlah Backlog Hunian	Backlog	287,755
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel	Skor EKPPD - Pengelolaan Kantor	Indeks	1
				Skor EKPPD - Pengelolaan Kendaraan Operasional	Indeks	2
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88.5
3	Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Nilai Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Jumlah kawasan permukiman kumuh	RW	23

Dari tabel dapat dilihat target renstra tahun 2022. Untuk sasaran target Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat yaitu menurunkan target backlog menjadi 287.755. Sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dengan target indeks 1, 2 dan nilai 88.5. Sasaran Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya menurunkan jumlah RW kumuh menjadi 23 RW kumuh

2.4. PERBANDINGAN TARGET RENSTRA 2017-2022

Sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta disusun berdasarkan kesesuaian dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi DPRKP dalam mendukung RPJMD, maka strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dijabarkan secara lebih jelas sebagai berikut:

PERBANDINGAN TARGET RENSTRA 2017-2022										
No	Tujuan	Tujuan Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan regenerasi kota dengan penyediaan infrastruktur berkelanjutan yang mampu menyelesaikan masalah kota	Most Livable City Index (MLCI)	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Jumlah Backlog Hunian	Backlog	294,756	293,290	291,696	290,584	287,755
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel	Skor EKPPD - Pengelolaan Kantor	Indeks	4	4	2	1	1
				Skor EKPPD - Pengelolaan Kendaraan Operasional	Indeks	4	4	1	2	2
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	83	86	88	88.5
3	Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Nilai Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Jumlah kawasan permukiman kumuh	RW	164	115	67	23	23

Sasaran : Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat terdapat perubahan target dari Renstra Awal 2017 – 2022 pada tahun ke 1 atau 2017 realisasi dapat dicapai sesuai target akan tetapi pada tahun ke 2 dan ke

3 realisasi penurunan backlog adalah 294.756 tidak berubah dari tahun ke 1 sehingga perlu dilakukan revisi target untuk tahun ke 4 dan 5.

Pada Renstra 2017-2022, Target penyediaan unit hunian sebesar 50.000 unit pertahun atau 250.000 unit dalam 5 tahun, direncanakan berasal dari :

- a. 17.786 Unit Rusunawa yang terdiri dari APBD sebesar 14.564 unit dan APBN sebesar 3.222 unit.
- b. 232.214 unit Rusunami (DP0 Rupiah) yang terdiri dari BUMD sebesar 14.000 Unit dan KPBU+Market sebesar 218.214 unit.



Skema *Housing Career* sesuai dengan RPJMD Penetapan 2017-2022

Pada Renstra Akhir 2017-2022 target penyediaan unit hunian sebesar 50.000 unit per tahun atau 250.000 unit dalam 5 tahun berasal dari :

- a) Rusunawa sebanyak 18.906 unit yang terdiri atas 13.798 unit melalui APBD, 2.444 unit melalui APBN dan 2.664 unit melalui Kewajiban Pengembang.
- b) Rusunami sebanyak 10.460 unit terdiri atas 6.971 unit melalui BUMD (DP Nol) dan 3.489 unit melalui BUMN
- c) Dan sisanya akan dipenuhi melalui mekanisme pasar (pengembang swasta)



Skema *Housing Career* Sesuai dengan RPJMD Perubahan 2017-2022

2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja disesuaikan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 (sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020). Untuk itu, agar dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis di tahun 2022 di atas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2022 berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022 yang disepakati antara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, serta disusun secara transparan, obyektif dan relevan.

Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan (*input, output, dan outcome*). Ikhtisar Rencana Kinerja 2022 beserta targetnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Mempercepat regenerasi kota demi mewujudkan Jakarta sebagai kota layak huni	1	Most Livable City Index (MLCI)/ Indeks Kota Layak Huni	e-SAKIP	Defenisi : Studi MLCI mengukur prinsip-Prinsip Kota Layak Huni 1) Ketersediaan sarana kebutuhan dasar (perumahan, air, listrik, dsb) 2) Ketersediaan fasilitas publik (transportasi, taman-taman kota, fasilitas beribadah, kesehatan, pendidikan, dsb) 3) Ketersediaan ruang publik dan tempat berinteraksi bagi masyarakat 4) Keamanan 5) Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya di kota 6) Sanitasi. Hasil studi ini	N/A	N/A	N/A	63	63	Nilai

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					sifatnya adalah "snapshot" (http://iapindonesia.org). Metode Pengukuran : Indeks ini didasarkan atas persepsi warga kota terhadap kotanya, mengenai kelayak hunian kota tempat tinggalnya. (Survei dan perhitungan dilakukan oleh IAP) Sumber Data : Hasil perhitungan IAP						
2	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi, mandiri dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Jumlah kawasan pemukiman kumuh	e-SAKIP	Definisi: Jumlah kawasan permukiman kumuh merupakan jumlah RW kumuh berdasarkan data BPS tahun 2013 sebanyak 223 RW kumuh	N/A	N/A	N/A	23	23	RW Kumuh

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					<p>Metode Pengukuran : Jumlah akhir kawasan permukiman kumuh (berdasarkan data BPS tahun 2013 sebanyak 223 RW kumuh dikurangi penanganan RW kumuh yang ditata sebanyak 200 RW). *Penanganan RW kumuh yang ditata merupakan capaian kumulatif dari 2018-2022 Sumber Data : BPS Tahun 2013</p>						

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
3	Terwujudnya peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui peningkatan sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	e-SAKIP	Definisi : Persentase Terlaksananya peningkatan kualitas permukiman kawasan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Suku Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kewajiban Pengembang melalui Program CAP, CIP, Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dan Penataan Kampung Prioritas. Metode Pengukuran : Jumlah RW kumuh yang ditata dibandingkan jumlah RW kumuh total	N/A	N/A	N/A	85	85	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					(445 RW, data RW Kumuh berdasarkan data BPS 2017) dikali 100% *Jumlah RW Kumuh yang ditata adalah jumlah RW kumuh yang mendapatkan Program CAP, CIP, Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dan Penataan Kampung Prioritas. *penanganan sd akhir 2022 total 378 RW Kumuh yang tertangani melalui: - CAPCIP 220 RW Kumuh - Kegiatan Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh 154 RW Kumuh - Kampung Prioritas 4						

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					lokasi (kunir, bukit duri, aquarium, tongkol). *Jumlah RW kumuh yang ditata merupakan capaian kumulatif dari 2018-2022 Sumber Data : BPS Tahun 2017						
4	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	1	Jumlah backlog hunian	e-SAKIP	Definisi : *Jumlah backlog dihitung berdasarkan konsep backlog penghunian. * Jumlah backlog hunian merupakan capaian kumulatif pengurangan backlog dari 2018-2022. Jumlah hunian yang layak dan terjangkau berupa pembangunan rusunawa dan rusunami yang dihitung secara	N/A	N/A	N/A	279.355	91%	

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					kumulatif dari tahun 2018 sd 2022. Dengan rincian sbb: Penyediaan Rusunawa: APBD: 13.798 unit hunian APBN: 2.444 unit hunian Kewajiban Pengembang: Yang sudah terbangun 1) Daan Mogot 1.062 unit 2) Pulo Gebang dan Penggilingan 522 unit 3) Kampung Aquarium Tahap 1: 107 unit. 4) Kampung Aquarium Tahap 2: 134 unit. Penyediaan Rusunami (skema pembiayaan DP 0): BUMD:						

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					<p>Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa: 780 unit. Menara Suasana Nuansa Pondok Kelapa: 480 unit. Nuansa Cilangkap: 868 unit. BUMN: Bandar Kemayoran: total 1383 unit (DP Nol 38 unit) Sentraland Cengkareng Tower Bunaken, Cengkareng Timur, Jakarta Barat dengan total unit sebesar 1130 unit dengan 149 unit diajukan melalui skema pembiayaan DP Nol; dan 3. Mahata Tanjung Barat dengan total unit</p>						

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					sebesar 256 unit dengan 35 unit diajukan melalui skema pembiayaan DP Nol (terbangun 2022). Metode Pengukuran : Jumlah backlog hunian yang tersisa dari jumlah backlog tahun dasar 2016 (sebanyak 302.319 sesuai dgn hasil Kajian RP3KP DPRKP) dikurangi dengan pembangunan hunian layak dan terjangkau yang berasal dari pendanaan APBD, APBN, dan sumber pembiayaan lainnya (konversi kewajiban penyediaan RSMurah/Sederhana). Sumber Data:						

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta						
		2	Persentase Penghunian Rumah Susun Sewa	e-SAKIP	Definisi :Persentase Terhuninya Rumah Susun Sewa Metode Pengukuran :Jumlah unit rusunawa yang terhuni dibandingkan jumlah unit rusunawa yang terbangun*Target mengecualikan rusunawa yang masuk dalam Kepgub 891/2021.* Target 80% merupakan hunian terhadap rusun eksisting ditambahkan dengan rusun baru yang dibangun tahun jamak	N/A	80	N/A	99		

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					yang selesai dibangun 2021-2022.Sumber Data :Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta						
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	e-SAKIP	Definisi : Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara	N/A	N/A	N/A	88,5	88,5	nilai

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Biro ORB sesuai tusi melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, bimbingan dan konsultasi dan penyajian dokumen IKM Provinsi DKI Jakarta untuk dilaporkan ke Kementerian PAN dan RB. Metode Pengukuran : IKM = Total Nilai SKPD						

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					yang melaksanakan SKM/Jumlah SKPD yang melaksanakan SKM Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta						
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	Definisi: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu: a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian	N/A	N/A	N/A	91	91	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					<p>realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran \geq 80%. Apabila serapan anggaran di bawah $<$ 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana</p>						

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					<p>transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasaran telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output</p>						

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					<p>adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD</p> <p>Metode Pengukuran:</p> <p>1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = $(40\%) + ((\%efisiensi \times 10\%)/20\%) + (50\%)$</p> <p>2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $\leq 100\%$ Realisasi = $(Penyerapan \text{ Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$</p> <p>3. Serapan Anggaran</p>						

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					≥80%, namun output ≤100% Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%) Sumber Data: Sistem eMonev dan eSAKIP (diolah)						
7	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Perumahan melalui Sistem Pembiayaan DP 0 Rupiah Nomor (24)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penyediaan Perumahan melalui Sistem Pembiayaan DP 0 Rupiah Nomor (24)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan	100%	100%	N/A	100%	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
			Rumah Susun Milik Nomor (58)		Rumah Susun Milik Nomor (58)						
8	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Nomor (14)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Nomor (14)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
9	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Nomor (13)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Nomor (13)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
			dalam Penataan Kawasan Nomor (66)		Penataan Kawasan Nomor (66)						
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City Nomor (43)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
			Smart City Nomor (43)								
12	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	N/A	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
SASARAN KHUSUS											
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Fasilitasi pembentukan P3SRS pada Rusunami/Apartemen di Jakarta	e-Kinerja	Defenisi : Fasilitasi pembentukan P3SRS pada Rusunami/Apartemen di Jakarta Formula Pengukuran : Jumlah Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10	5	10	5	30	SK

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					Provinsi DKI Jakarta sebanyak 15 SK Kepala DPRKP Pengesahan P3SRS Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	1	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	e-Kinerja	Defenisi : Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	N/A	N/A	N/A	48	48	Paket
15	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order Sumber Data : Data Surat Perintah	100	100	100	100	100	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.)						
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Defenisi : Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					<p>pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK</p> <p>Formula Pengukuran :</p> <p>WTP=3(100%),</p> <p>WDP=2(75%),</p> <p>TW=1(50%),</p> <p>TMP=0(25%))</p>						
17	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfotik menyusun <i>editorial plan</i> lingkup Provinsi.</p> <p>c) Persentase</p>	100	100	100	100	100	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					<p>tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p>Penghitungan:</p> <p>a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plansesuai</p>						

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					<p>strategi komunikasi per triwulan.</p> <p>c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press releasedan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>						

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 91)	N/A	N/A	N/A	AA (91)	AA (91)	Predikat
19	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Defenisi : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total	N/A	N/A	N/A	95	95	Nilai

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					<p>Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Formula Pengukuran: Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80- 90; BB = >70-80; B = >60-</p>						

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30 Sumber Data : Lembar Kerja Evaluasi PMPRB						
20	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut.						
21	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e- produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD.	75%	90%	100%	100%	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
22	Tersedianya Platform Kolaborasi yang fleksibel dan dapat memfasilitasi beragam kolaborasi	1	Jumlah kolaborator Jakarta	e-Kinerja	Jumlah kolaborator yang aktif pada tahun 2022 dan terekam melalui platform kolaborasi, baik dalam bentuk PKS maupun non PKS (bukan bersifat partisipasi)	N/A	N/A	N/A	20	20	kolaborator (per OPD)
SASARAN OPERASIONAL											
23	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persentase
24	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
25	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase

2.6. KEGIATAN STRATEGIS DAERAH KAMPUNG PRIORITAS

Pada tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta memiliki kegiatan strategis daerah yang tidak termasuk dalam Perjanjian Kinerja yaitu pembangunan kampung prioritas sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kegiatan Strategis Daerah Renaksi Kampung Prioritas

Nama KSD	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran	Ukuran Keberhasilan	Target
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat	Pembangunan rusun Kampung Akuarium Tahap II	Pembangunan Rumah Susun Kampung Akuarium Tahap II	Selesainya pembangunan fisik rusun Kampung Akuarium Tahap II	- Terlaksananya pembangunan fisik rusun Kampung Akuarium Tahap II 100% - Peresmian Rusun Kampung Akuarium Tahap II (17 Agustus 2022)	100%
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat	Pelaksanaan Pembangunan rusun bagi warga Eks Kampung Bukit Duri	Pelaksanaan Pembangunan rusun bagi warga Eks Kampung Bukit Duri	Terbangunannya Rusun bagi warga Eks Kampung Bukit Duri	- Progres Pembangunan sebesar 100 % (Agustus) - Peresmian Rumah Susun bagi warga Eks Kampung Bukit Duri (17 Agustus 2022)	100%
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat	Pembangunan rusun bagi warga Eks Kampung Kunir	Pembangunan Rumah Susun Kampung Kunir	Terbangunnya Rumah Susun bagi warga Eks Kampung Kunir	- Terlaksananya pembangunan fisik rusun bagi warga Eks Kampung Kunir 100% (Agustus) - Peresmian Rumah Susun bagi warga Eks Kampung Kunir (17 Agustus 2022)	100%
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat	Pembangunan Rusun Jalan Tongkol 10	Pembangunan Rusun Jalan Tongkol 10	Terbangunnya Rumah Susun bagi warga Jalan Tongkol 10	Terbangunnya Rusun Jalan Tongkol 10 Tahap I dengan progres 50%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat di tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta memiliki target pembangunan Rumah Susun kampung prioritas diantaranya:

1. Rusun Kampung Aquarium Tahap II (134 Unit Hunian)
2. Rusun Eks Kampung Duri (75 Unit Hunian)
3. Rusun Eks Kampung Kunir (33 Unit Hunian)
4. Rusun Jalan Tongkol 10 (128 Unit Hunian)

2.7. TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU ANGGARAN 2022

Pada tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta memiliki 4 Program dan 7 Kegiatan dengan total pagu anggaran Rp.1.712.120.401.012 sebagaimana tabel berikut;

Tabel Program dan Pagu Anggaran 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp433,172,137,941
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp795,358,112,457
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp1,474,773,225
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp482,115,377,389
TOTAL ANGGARAN		Rp1,712,120,401,012

Tabel Kegiatan Prioritas dan Pagu Anggaran 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rp792,708,827,235
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp7,576,208,547

Ada 2 kegiatan prioritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, yaitu pembangunan rumah susun untuk rumah korban bencana dan relokasi program provinsi dengan total anggaran Rp. 792.708.827.235 dan Penataan RW kumuh dengan anggaran Rp. 7.576.208.547.



Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 REALISASI RENSTRA 2022

Pada tahun 2022 realisasi Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta tercapai 3 dari 5 target sebagaimana tabel berikut:

Tabel realisasi target Renstra 2022

No	Tujuan	Tujuan Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan regenerasi kota dengan penyediaan infrastruktur berkelanjutan yang mampu menyelesaikan masalah kota	Most Livable City Index (MLCI)	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Jumlah Backlog Hunian	Backlog	287,755	288,393	99.78%
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel	Skor EKPPD - Pengelolaan Kantor	Indeks	1	4	100%
				Skor EKPPD - Pengelolaan Kendaraan Operasional	Indeks	2	4	100%
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88.5	82.29	92.98%
3	Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Nilai Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Jumlah kawasan permukiman kumuh	RW	23	2	100%

Realisasi pada tahun 2022 Jumlah backlog hunian belum mencapai target, dari target menurunkan backlog hunian 287.755 diturunkan menjadi 288.393. Skor EKPPD – Pengelolaan Kantor dan Skor EKPPD – Pengelolaan Kendaraan Operasional melebihi target dengan realisasi skor 4. Indeks kepuasan masyarakat belum memenuhi target pada 2022 nilai Indeks Kepuasan masyarakat yaitu 82.29. Target penurunan kawasan permukiman kumuh melebihi target dari target menjadi 23 RW kumuh menjadi 2 RW kumuh.

3.2 PERBANDINGAN REALISASI RENSTRA 2017-2022

Sesuai dengan target RPJMD maka realisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dijabarkan secara lebih jelas sebagai berikut:

PERBANDINGAN TARGET RENSTRA 2017-2022															
No	Tujuan	Tujuan Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2018		2019		2020		2021		2022 / Kondisi Akhir	
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Mewujudkan regenerasi kota dengan penyediaan infrastruktur berkelanjutan yang mampu menyelesaikan masalah kota	Most Livable City Index (MLCI)	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Jumlah Backlog Hunian	Backlog	294,756	294,756	293,290	294,756	291,696	294,756	290,584	292,153	287,755	288,393
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel	Skor EKPPD - Pengelolaan Kantor	Indeks	4	4	4	4	2	4	1	4	1	4
				Skor EKPPD - Pengelolaan Kendaraan Operasional	Indeks	4	4	4	4	1	4	2	4	2	4
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	83.76	83	84.41	86	86.34	88	88.44	88.5	82.29
3	Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Nilai Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Jumlah kawasan permukiman kumuh	RW	164	217	115	157	67	145	23	81	23	2

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Kondisi akhir dari backlog hunian adalah 288.393 belum memenuhi target RPJMD 2017 – 2022, hal ini diakibatkan pada tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi kontraksi APBD provinsi DKI Jakarta yang mengakibatkan dilakukannya efisiensi anggaran untuk dilaksanakan dan dialihkan sehingga anggaran difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19.
2. Skor EKPPD – Pengelolaan Kantor dan Skor EKPPD Pengelolaan Kendaraan Operasional tercapai setiap tahunnya dengan nilai indeks 4.
3. Indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan menggunakan survei penghuni rumah susun terdapat penurunan nilai pada tahun 2022. Hal ini menjadi bahan evaluasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi.
4. Kondisi akhir jumlah kawasan permukiman kumuh tercapai melebihi target komulatif RPJMD 2017-2022 dengan kondisi akhir mengurangi RW kumuh menjadi 2 RW kumuh yang sebelumnya 23 RW kumuh

3.3 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sesuai dengan target capaian Perjanjian kinerja pada masing-masing IKU di Perangkat Daerah, berikut realisasi capaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
SASARAN STRATEGIS							
1	Mewujudkan regenerasi kota dengan penyediaan infrastruktur berkelanjutan yang mampu menyelesaikan masalah kota	Most Livable City Index (MLCI)	Nilai	63	-	-	Belum ada realisasi
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88%	82.29%	92.98%	
3	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi, mandiri dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Jumlah kawasan pemukiman kumuh	RW	23	2	191.30%	
4	Terwujudnya peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui peningkatan sarana prasarana pendukungnya	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persen (%)	85	85	100%	
5	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Jumlah backlog hunian	Unit	279355	280489	99.59%	
		Persentase Penghunian Rumah Susun Sewa	Persen (%)	90	90.19	100%	
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen (%)	91	89.05	98%	
7	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Perumahan melalui Sistem Pembiayaan DP 0 Rupiah Nomor (24)	Persen (%)	100	98.67	99%	
		Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik Nomor (58)	Persen (%)	100	100	100%	

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
8	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Nomor (14)	Persen (%)	100	100	100%	
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	Persen (%)	100	100	100%	
9	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	Persentase penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Nomor (13)	Persen (%)	100	100	100%	
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	Persen (%)	100	100	100%	
		Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	Persen (%)	100	100	100%	
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	Persen (%)	100	100	100%	
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	Persen (%)	100	100	100%	

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City Nomor (43)	Persen (%)	100	100	100%	
12	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	Persen (%)	100	100	100%	
SASARAN KHUSUS							
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Fasilitasi pembentukan P3SRS pada Rusunami/Apartemen di Jakarta	SK	30	32	106.67%	
14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	Paket	48	76	158.33%	
15	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persen (%)	100	100	100%	
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan Keuangan	Predikat	3 (WTP)	3 (WTP)	100%	
17	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Persen (%)	100	100	100%	
18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	Predikat	AA (91)	92.3	101%	
19	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	Nilai	95	97	102%	
20	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	Persen (%)	100	100	100%	

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
21	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	Persen (%)	100	100	100%	
22	Tersedianya Platform Kolaborasi yang fleksibel dan dapat memfasilitasi beragam kolaborasi	Jumlah kolaborator Jakarta	Kolaborator	20	75	375%	
SASARAN OPERASIONAL							
23	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen (%)	100	-	-	Tidak ada TL Gubernur pada 2022
24	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen (%)	100	97.97	97.97%	
25	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen (%)	100	51.39	51.39%	

Dari 31 Indikator Kinerja pada perjanjian kinerja 5 diantaranya tidak tercapai, 24 indikator tercapai sesuai / diatas target dan 2 indikator tidak ada realisasi diantaranya indikator:

1. Indikator Most Livable City Index (MLCI) belum memiliki realisasi dikarenakan diampu oleh seluruh SKPD teknis. Pengukuran realisasi dinilai oleh Ikatan Ahli Perencana yang akan diukur dan dinilai di tahun berikutnya.
2. Indikator Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur akibat tidak adanya tindak lanjut arahan gubernur melalui sistem E-Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2022. Adapun tindak lanjut arahan gubernur kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui lisan dan tulisan.

3.4 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah. Indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan, seperti Jumlah unit rumah susun yang terbangun, Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan rumah susun dan Jumlah kawasan yang ditata. Indikator outcome yang digunakan juga bervariasi, seperti Persentase Unit Perumahan Rakyat yang Terbangun, Persentase Unit Perumahan Rakyat yang Terpelihara/Terawat dan Jumlah Kawasan /Fasilitas Permukiman yang ditata. Berikut tabel perbandingan capaian Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2021

TABEL PERBANDINGAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018, 2021, 2022

TAHUN 2018					TAHUN 2021					TAHUN 2022				
NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
SASARAN STRATEGIS					SASARAN STRATEGIS					SASARAN STRATEGIS				
1	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Persentase unit perumahan rakyat yang terbangun	2.50%	2.50%	1	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi, mandiri dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Jumlah kawasan pemukiman kumuh	77 RW	81 RW	1	Mewujudkan regenerasi kota dengan penyediaan infrastruktur berkelanjutan yang mampu menyelesaikan masalah kota	Most Livable City Index (MLCI)	63	-
		Persentase unit perumahan rakyat yang terpelihara	13%	12.78%	2	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Jumlah backlog hunian	294,334	292,153	2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	82.29
2	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Jumlah kawasan/ fasilitas permukiman yang ditata	10 RW Kumuh	6 RW Kumuh	3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun	88	80.1	3	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi, mandiri dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Jumlah kawasan pemukiman kumuh	23 RW	2 RW

TAHUN 2018					TAHUN 2021					TAHUN 2022				
NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi	Persentase progres penyelesaian tindakan lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal	100%	30%	4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	91.03%	4	Terwujudnya peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui peningkatan sarana prasarana pendukungnya	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	85%	85%
		Progres realisasi pelaksanaan kegiatan	100%	92%	5	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	Persentase penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (nomor 13)	100%	100%	5	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Jumlah backlog hunian	279355	280489
		Persentase laporan fungsional bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan SAP secara tepat waktu	100%	100%	6	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi, mandiri dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas (nomor 14)	100%	100%			Persentase Penghunian Rumah Susun Sewa	90%	90.19%
		Persentase progres sensus aset/ barang inventaris OPD	100%	80%			Persentase Penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	100%	99.26%	6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	89.05%

TAHUN 2018					TAHUN 2021					TAHUN 2022				
NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		Jumlah updating data strategis OPD pada portal data Jakarta sesuai tugas dan fungsi	17 Data set	17 Data set	7	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Persentase Penyelesaian rencana aksi Penyediaan Perumahan melalui Sistem Pembiayaan DP 0 Rupiah (nomor 24)	100%	97.64%	7	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Perumahan melalui Sistem Pembiayaan DP 0 Rupiah Nomor (24)	100%	98.67%
					8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	100%			Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik Nomor (58)	100%	100%
							Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58)	100%	98.50%	8	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Nomor (14)	100%	100%

TAHUN 2018					TAHUN 2021					TAHUN 2022				
NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
							Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	100%	100%			Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	100%	100%
					9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	100%	9	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	Persentase penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Nomor (13)	100%	100%
										10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100%	100%
												Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	100%	100%

TAHUN 2018					TAHUN 2021					TAHUN 2022				
NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
												Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	100%	100%
										11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	100%	100%
												Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City Nomor (43)	100%	100%
										12	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	100%	100%

TAHUN 2018					TAHUN 2021					TAHUN 2022				
NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
					SASARAN KHUSUS					SASARAN KHUSUS				
					10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Fasilitasi pembentukan P3SRS pada Rusunami/Apartemen di Jakarta	15	19	13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Fasilitasi pembentukan P3SRS pada Rusunami/Apartemen di Jakarta	30	32
					11	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	35	35	14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	48	76
					12	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	15	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%
					13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan Keuangan	3	3	16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan Keuangan	3 (WTP)	3 (WTP)
					14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	100%	17	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	100%

TAHUN 2018					TAHUN 2021					TAHUN 2022				
NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
					15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	AA (81)	92	18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	AA (91)	92.3
					16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah	92	91.96	19	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	95	97
										20	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	100%	100%
										21	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	100%	100%
											Tersedianya Platform Kolaborasi yang fleksibel dan dapat memfasilitasi beragam kolaborasi	Jumlah kolaborator Jakarta	20	75

TAHUN 2018					TAHUN 2021					TAHUN 2022				
NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
					SASARAN OPERASIONAL					SASARAN OPERASIONAL				
					17	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	23	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	51.39%
					18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	99.70%	24	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	-
					19	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	79.70%	25	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	97.97%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian perjanjian kinerja Tahun 2018, 2021, 2022 di atas menunjukkan bahwa Pencapaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 secara umum rata rata capaian kinerja sasaran strategis mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 dan 2021.

Terdapat Penurunan capaian penyerapan anggaran di tahun 2022 diakibatkan adanya efisiensi anggaran terhadap kegiatan pengadaan lahan. Diharapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengoptimalkan penggunaan lahan Pemerintah DKI Jakarta yang sudah ada.

Sebagai evaluasi pada Tahun 2021, Pencapaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dilihat dari realisasi penyerapan anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar **97.44%**. Capaian ini telah menggambarkan kondisi obyektifitas yang ada. Sedangkan pada tahun 2022 ini berdasarkan hasil penilaian kinerja yang menggunakan penghitungan dengan form Rencana Kinerja Tahunan dan form Pengukuran Kinerja maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022 dikategorikan **Baik** dengan nilai capaian penyerapan anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar **86.96%**.

3.5 REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN 2022

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dalam tahun 2022 dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Hal ini tercermin dari nilai capaian realisasi penyerapan anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar **86.96%** yang didasarkan pada realisasi penggunaan seluruh anggaran Dinas, Suku Dinas, Unit Pengelola Rumah Susun, Unit Pengelola Dana Perumahan dan Unit Pusat Data dan Informasi. Capaian ini telah menggambarkan kondisi obyektifitas yang ada dikategorikan **Baik**.

Dana yang dianggarkan beserta realisasinya dalam tahun anggaran 2022 untuk mewujudkan pencapaian sasaran sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

MONITORING APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA					
TAHUN ANGGARAN 2022					
PER 30 DESEMBER 2022					
NO.	BIDANG / UKPD	APBD TA 2022	APBD-P Tahun 2022 (Pergeseran Ke-5)	REALISASI ANGGARAN PER 30 DESEMBER 2022	
				TOTAL (Rp)	% thd APBD 2022
	TOTAL BL + BTL	2,001,398,937,422	1,712,120,401,012	1,488,855,131,069	86.96%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	122,077,234,506	111,155,247,636	108,782,181,457	97.87%
	BELANJA LANGSUNG (DINAS + SUDIN + UPDP + UPRS + PUSDATIN)	1,879,321,702,916	1,600,965,153,376	1,380,072,949,612	86.20%
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	122,077,234,506	111,155,247,636	108,782,181,457	97.87%
B	BELANJA LANGSUNG	1,045,933,642,589	817,012,055,118	629,128,459,446	77.00%
1	SEKRETARIAT	12,317,501,340	12,578,206,349	11,142,145,358	88.58%
2	BIDANG PERMUKIMAN	2,292,242,618	1,499,527,765	1,430,382,528	95.39%
3	BIDANG PERUMAHAN	626,838,831,277	630,285,035,782	612,545,138,324	97.19%
4	BIDANG PEMBIAYAAN DAN KEMITRAAN PERUMAHAN	400,000,000,000	171,326,262,584	1,096,674,145	0.64%
5	BIDANG REGULASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	4,485,067,354	1,323,022,638	1,238,077,180	93.58%
	JUMLAH DINAS	1,168,010,877,095	928,167,302,754	737,910,640,903	79.50%
SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	119,980,205,112	117,858,719,618	115,842,811,109	98.29%
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	71,959,553,345	68,233,011,441	67,595,568,077	99.07%
3	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	144,652,048,894	144,637,640,250	139,891,583,881	96.72%
4	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	78,724,031,196	78,716,943,266	75,586,805,186	96.02%
5	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	70,365,916,011	67,062,162,941	64,078,444,047	95.55%
6	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	14,829,932,296	6,300,490,036	5,843,666,164	92.75%
	JUMLAH SUDIN	500,511,686,854	482,808,967,552	468,838,878,464	97.11%
UNIT PENGELOLA DANA PERUMAHAN					
1	UPDP	5,798,000,000	5,798,000,000	4,291,036,473	74.01%
	JUMLAH UPDP	5,798,000,000	5,798,000,000	4,291,036,473	74.01%
PUSAT DATA DAN INFORMASI					
1	PUSDATIN	3,261,604,767	3,281,553,883	3,124,783,950	95.22%
	JUMLAH PUSDATIN	3,261,604,767	3,281,553,883	3,124,783,950	95.22%
UNIT PENGELOLAAN RUMAH SUSUN (UPRS)					
1	UPRS I	37,040,906,984	36,610,779,962	34,381,552,484	93.91%
2	UPRS II	37,158,171,951	31,245,480,684	28,394,198,161	90.87%
3	UPRS III	56,454,322,394	47,413,917,443	46,051,985,207	97.13%
4	UPRS IV	31,763,043,643	32,670,683,352	29,964,517,240	91.72%
5	UPRS V	30,494,963,721	28,999,981,776	26,243,236,142	90.49%
6	UPRS VI	38,239,401,551	35,016,241,888	31,732,273,313	90.62%
7	UPRS VII	52,671,660,610	49,389,435,574	48,562,123,698	98.32%
8	UPRS VIII	39,994,297,852	30,718,056,144	29,359,905,034	95.58%
	JUMLAH UPRS	323,816,768,706	292,064,576,823	274,689,791,279	94.05%

3.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berikut data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2022 pada tabel dibawah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
1	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Jumlah Backlog Hunian	99.59%	77.11%	22.48%	Terdapat efisiensi anggaran pada pengadaan lahan
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Indeks Kepuasan Masyarakat	92.98%	Tidak Ada Anggaran	-	
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	97.86%	Tidak Ada Anggaran	-	
4	Terwujudnya peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui peningkatan sarana prasarana pendukungnya	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100.00%	96.96%	3.04%	

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan :

- 1) Sasaran strategis Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dengan capaian 99.59% dan penyerapan anggaran 77.11% sehingga tingkat efisiensinya adalah 22.48% akibat adanya efisiensi anggaran pada pengadaan lahan.
- 2) Sasaran strategis Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Penghuni Rumah Susun dengan capaian 92.98% tidak memiliki anggaran sehingga tingkat efisiensinya tidak ada.

- 3) Sasaran strategis Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel capaian 97.86% tidak memiliki anggaran sehingga tingkat efisiensinya tidak ada.
- 4) Sasaran strategis Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya dengan capaian 100% dan penyerapan anggaran 96.96% sehingga tingkat efisiensinya adalah 3.04%.

3.7 EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP TARGET NASIONAL

A. Standar Pelayanan Minimal pada SPM Perumahan Rakyat

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat terdiri atas :

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dengan Persentase 100%
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dengan Persentase 100%

Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta SPM secara keseluruhan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal tingkat Provinsi Provinsi DKI Jakarta sesuai UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, sehingga pembagian 2 (dua) tingkatan penyelenggaraan pelayanan dasar digabungkan dan secara akumulatif dengan pencapaian secara keseluruhan menjadi capaian SPM tingkat Provinsi, Penerima Pelayanan Dasar :

- a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria

- b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria

Pada tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah selesai membangun 6 Rumah Susun dan menyediakan 3360 unit hunian layak huni.

B. Pengurangan Kawasan Kumuh 10-15 Ha

Target lainnya Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka pada lokasi kegiatan berikut dibawah :

Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha, Pada kegiatan pengurangan kawasan kumuh atau peningkatan kualitas permukiman di Provinsi DKI Jakarta maka dapat disampaikan bahwa :

- a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki dua dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas permukiman atau dalam hal pengurangan kawasan kumuh yaitu melalui : (1) Keputusan Gubernur No. 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat; dan (2) Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu. Kedua ketentuan tersebut tidak mengatur untuk dilakukannya fasilitasi atas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di dalam sasaran lokasi yang termuat di dalam ketentuan.
- b. Peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan metode in-situ upgrading sehingga masyarakat yang bertempat tinggal di dalam lokasi sasaran tidak direlokasi ke tempat hunian baru. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tingkat Kota/ Kabupaten Administrasi berupa peningkatan prasarana dan sarana permukiman

yang merupakan aset milik pemerintah daerah dan tidak menyentuh kepada aset milik privat masyarakat melalui Collaborative Implementation Program (CAP) dan kegiatan Community Action Planning (CIP).

- c. Salah satu lokasi penataan dari sejumlah 79 lokasi kampung yang ditetapkan di dalam Keputusan Gubernur No. 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat, yaitu Kampung Akuarium, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara telah berproses sejak awal tahun 2018 untuk dilakukannya fasilitasi penyediaan hunian bagi rumah tangga yang bertinggal di dalam kawasan Kampung Akuarium. Namun sampai dengan saat ini pembangunan fisik dari penyediaan hunian tersebut belum terlaksana karena adanya berbagai macam pertimbangan dan kendala perizinan yang membutuhkan proses pelibatan para pihak yang beragam dan intensif. Merujuk pada kegiatan penataan 79 kampung yang didominasi oleh kendala dalam kepemilikan pertanahan maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Tim Gugus Reforma Agraria melalui Keputusan Gubernur 162 Tahun 2019 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria jo. Keputusan Gubernur No. 574 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Gubernur 162 Tahun 2019 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria yang bertugas untuk dapat memotret status kondisi pertanahan saat ini dan kemudian agar ditindaklanjuti dengan dilakukannya kajian terhadap seluruh aspek pertanahan pada seluruh lokasi yang terdapat dalam Keputusan Gubernur No. 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.

4.1 KESIMPULAN

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Realisasi Renstra pada tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta tercapai 3 dari 5 target. Jika dibandingkan dengan realisasi Renstra 2017 – 2022 kondisi akhir pada 2022 tercapai 3 dari 5 target. Target yang tidak tercapai adalah jumlah backlog hunian dan indeks kepuasan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya kontraksi anggaran dan efisiensi pada tahun 2020 akibat adanya pandemi covid-19 berakibat mundurnya target-target pembangunan di tahun berikutnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari 31 Indikator Kinerja pada perjanjian kinerja 5 diantaranya tidak tercapai, 24 indikator tercapai sesuai / diatas target dan 2 indikator tidak ada realisasi.

Penyerapan anggaran di tahun 2022 masih kurang optimal hal ini tercermin dari hasil evaluasi internal yang dilakukan (***self evaluation***) dengan nilai capaian penyerapan anggaran **86.96%**. Faktor kendala akibat adanya efisiensi anggaran pada kegiatan pengadaan lahan.

Namun demikian masih terdapat kekurangan di berbagai lini, diantaranya layanan terhadap masyarakat dan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK). Oleh karenanya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta di tahun-tahun yang akan datang akan berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat sesuai dengan amanah yang dibebankan melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kegiatan kinerja berikutnya. Terima kasih.

4.2 SARAN

Mengingat kompleksnya permasalahan perumahan dan permukiman, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan terus melakukan pembenahan dan peningkatan pelayanan melalui pengembangan dan peningkatan kualitas aparat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta serta sumber daya pendukung lainnya agar tetap dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Terhadap hambatan dan kendala yang ditemui terutama yang disebabkan oleh faktor eksternal akan terus diupayakan peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan wewenang yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

1. Senantiasa meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif antar SKPD dan UKPD, lintas sektor, dan pihak-pihak terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sehingga permasalahan yang muncul di masyarakat dengan cepat dapat direspon.
2. Meningkatkan koodinasi dan kerjasama dengan pelaku pembangunan baik BUMN/BUMD maupun swasta dan perbankan lain sebagai bank pelaksana, agar mempermudah Masyarakat Berpenghasilan Rendah memperoleh rumah layak huni
3. Perlunya peningkatan sumber daya manusia guna meningkatkan kualitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang.

4. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam penyediaan perumahan dan pemukiman yang layak bagi masyarakat yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
5. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan, monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait guna mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
6. Diperlukan proses penyiapan masyarakat yang akan menghuni rumah susun, melalui pemberdayaan masyarakat baik dari aspek sosial maupun ekonomi, agar mereka siap saat dihunikan ke rumah susun.
7. Diperlukan Standar Operasional Prosedur untuk pelaksanaan kerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja 2022
2. Dokumentasi kegiatan CIP
3. Dokumentasi kegiatan pembangunan rumah susun
4. Penghargaan yang diterima pada 2022
5. Rekap penyerapan anggaran
6. Rincian penyerapan anggaran



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARJOKO
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Februari 2022

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

SARJOKO
NIP 196703191998031006

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Nama : Sarjoko
 NIP : 196703191998031006
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Mempercepat regenerasi kota demi mewujudkan Jakarta sebagai kota layak huni	1	Most Livable City Index (MLCI)/ Indeks Kota Layak Huni	e-SAKIP	Defenisi : Studi MLCI mengukur prinsip-Prinsip Kota Layak Huni 1) Ketersediaan sarana kebutuhan dasar (perumahan, air, listrik, dsb) 2) Ketersediaan fasilitas publik (transportasi, taman-taman kota, fasilitas beribadah, kesehatan, pendidikan, dsb) 3) Ketersediaan ruang publik dan tempat berinteraksi bagi masyarakat 4) Keamanan 5) Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya di kota 6) Sanitasi. Hasil studi ini sifatnya adalah "snapshot" (http://iapindonesia.org). Metode Pengukuran : Indeks ini didasarkan atas persepsi warga kota terhadap kotanya, mengenai kelayak hunian kota tempat tinggalnya. (Survei dan perhitungan dilakukan oleh IAP) Sumber Data : Hasil perhitungan IAP	N/A	N/A	N/A	63	63	Nilai
2	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi, mandiri dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Jumlah kawasan permukiman kumuh	e-SAKIP	Defenisi: Jumlah kawasan permukiman kumuh merupakan jumlah RW kumuh berdasarkan data BPS tahun 2013 sebanyak 223 RW kumuh Metode Pengukuran : Jumlah akhir kawasan permukiman kumuh (berdasarkan data BPS tahun 2013 sebanyak 223 RW kumuh dikurangi penanganan RW kumuh yang ditata sebanyak 200 RW). *Penanganan RW kumuh yang ditata merupakan capaian kumulatif dari 2018-2022 Sumber Data : BPS Tahun 2013	N/A	N/A	N/A	23	23	RW Kumuh

3	Terwujudnya peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui peningkatan sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	e-SAKIP	<p>Definisi : Persentase Terlaksananya peningkatan kualitas permukiman kawasan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Suku Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kewajiban Pengembang melalui Program CAP, CIP, Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dan Penataan Kampung Prioritas.</p> <p>Metode Pengukuran : Jumlah RW kumuh yang ditata dibandingkan jumlah RW kumuh total (445 RW, data RW Kumuh berdasarkan data BPS 2017) dikali 100% *Jumlah RW Kumuh yang ditata adalah jumlah RW kumuh yang mendapatkan Program CAP, CIP, Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dan Penataan Kampung Prioritas. *penanganan sd akhir 2022 total 378 RW Kumuh yang tertangani melalui: - CAPCIP 220 RW Kumuh - Kegiatan Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh 154 RW Kumuh - Kampung Prioritas 4 lokasi (kunir, bukit duri, aquarium, tongkol).</p> <p>*Jumlah RW kumuh yang ditata merupakan capaian kumulatif dari 2018-2022</p> <p>Sumber Data : BPS Tahun 2017</p>	N/A	N/A	N/A	85	85	Persentase
---	---	---	--	---------	--	-----	-----	-----	----	----	------------

4	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	1	Jumlah backlog hunian	e-SAKIP	<p>Definisi :</p> <p>*Jumlah backlog dihitung berdasarkan konsep backlog penghunian.</p> <p>* Jumlah backlog hunian merupakan capaian kumulatif pengurangan backlog dari 2018-2022.</p> <p>Jumlah hunian yang layak dan terjangkau berupa pembangunan rusunawa dan rusunami yang dihitung secara kumulatif dari tahun 2018 sd 2022. Dengan rincian sbb:</p> <p>Penyediaan Rusunawa:</p> <p>APBD: 13.798 unit hunian</p> <p>APBN: 2.444 unit hunian</p> <p>Kewajiban Pengembang: Yang sudah terbangun</p> <p>1) Daan Mogot 1.062 unit</p> <p>2) Pulo Gebang dan Penggilingan 522 unit</p> <p>3) Kampung Aquarium Tahap 1: 107 unit.</p> <p>4) Kampung Aquarium Tahap 2: 134 unit.</p> <p>Penyediaan Rusunami (skema pembiayaan DP 0):</p> <p>BUMD:</p> <p>Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa: 780 unit.</p> <p>Menara Suasana Nuansa Pondok Kelapa: 480 unit.</p> <p>Nuansa Cilangkap: 868 unit.</p> <p>BUMN:</p> <p>Bandar Kemayoran: total 1383 unit (DP Nol 38 unit)</p> <p>Sentraland Cengkareng Tower Bunaken, Cengkareng Timur, Jakarta Barat dengan total unit sebesar 1130 unit dengan 149 unit diajukan melalui skema pembiayaan DP Nol; dan</p> <p>3. Mahata Tanjung Barat dengan total unit sebesar 256 unit dengan 35 unit diajukan melalui skema pembiayaan DP Nol (terbangun 2022).</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Jumlah backlog hunian yang tersisa dari jumlah backlog tahun dasar 2016 (sebanyak 302.319 sesuai dgn hasil Kajian RP3KP DPRKP) dikurangi dengan pembangunan hunian layak dan terjangkau yang berasal dari pendanaan APBD, APBN, dan sumber pembiayaan lainnya (konversi kewajiban penyediaan RSMurah/Sederhana).</p> <p>Sumber Data:</p> <p>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	N/A	N/A	279,355	279,355	Unit
---	--	---	-----------------------	---------	---	-----	-----	-----	---------	---------	------

		2	Persentase Penghunian Rumah Susun Sewa	e-SAKIP	<p>Definisi : Persentase Terhuninya Rumah Susun Sewa</p> <p>Metode Pengukuran : Jumlah unit rusunawa yang terhuni dibandingkan jumlah unit rusunawa yang terbangun</p> <p>*Target mengecualikan rusunawa yang masuk dalam Kepgub 891/2021. * Target 80% merupakan hunian terhadap rusun eksisting ditambahkan dengan rusun baru yang dibangun tahun jamak yang selesai dibangun 2021-2022.</p> <p>Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	80	N/A	99	99	Persentase
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	e-SAKIP	<p>Definisi : Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Biro ORB sesuai tuisi melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, bimbingan dan konsultasi dan penyajian dokumen IKM Provinsi DKI Jakarta untuk dilaporkan ke Kementerian PAN dan RB.</p> <p>Metode Pengukuran : IKM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan SKM/Jumlah SKPD yang melaksanakan SKM</p> <p>Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	N/A	N/A	88.5	88.5	nilai

6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Definisi: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu:</p> <p>a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarnya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD</p>	N/A	N/A	N/A	91	91	Persentase
					<p>Metode Pengukuran:</p> <p>1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = $(40\%) + ((\%efisiensi \times 10\%)/20\%) + (50\%)$</p> <p>2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $\leq 100\%$ Realisasi = $(Penyerapan \text{ Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$</p> <p>3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $\leq 100\%$ Realisasi = $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$</p> <p>Sumber Data: Sistem eMonev dan eSAKIP (diolah)</p>						
7	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Perumahan melalui Sistem Pembiayaan DP 0 Rupiah Nomor (24)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penyediaan Perumahan melalui Sistem Pembiayaan DP 0 Rupiah Nomor (24)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik Nomor (58)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik Nomor (58)	100%	100%	N/A	100%	100%	Persentase
8	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Nomor (14)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Nomor (14)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
9	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Nomor (13)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Nomor (13)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City Nomor (43)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City Nomor (43)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
12	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	N/A	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
SASARAN KHUSUS											
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Fasilitasi pembentukan P3SRS pada Rusunami/Apartemen di Jakarta	e-Kinerja	Defenisi : Fasilitasi pembentukan P3SRS pada Rusunami/Apartemen di Jakarta Formula Pengukuran : Jumlah Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebanyak 15 SK Kepala DPRKP Pengesahan P3SRS Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10	5	10	5	30	SK
14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	1	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	e-Kinerja	Defenisi : Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	N/A	N/A	N/A	48	48	Paket

15	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	<p>Formula Pengukuran : Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order</p> <p>Sumber Data : Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Guia, dst.)</p>	100	100	100	100	100	Persentase
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	<p>Defenisi : Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK</p> <p>Formula Pengukuran : WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%)</p>	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
17	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfotik menyusun <i>editorial plan</i> lingkup Provinsi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p>Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plansesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (<i>draft press releasedan data pendukung</i>) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	100	100	100	100	100	Persentase
18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 91)	N/A	N/A	N/A	AA (91)	AA (91)	Predikat

19	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	<p>Defenisi : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Formula Pengukuran: Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30</p> <p>Sumber Data : Lembar Kerja Evaluasi PMPRB</p>	N/A	N/A	N/A	95	95	Nilai
20	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
21	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD.	75%	90%	100%	100%	100%	Persentase
22	Tersedianya Platform Kolaborasi yang fleksibel dan dapat memfasilitasi beragam kolaborasi	1	Jumlah kolaborator Jakarta	e-Kinerja	Jumlah kolaborator yang aktif pada tahun 2022 dan terekam melalui platform kolaborasi, baik dalam bentuk PKS maupun non PKS (bukan bersifat partisipasi)	N/A	N/A	N/A	20	20	kolaborator (per OPD)

SASARAN OPERASIONAL											
23	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persentase
24	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persentase
25	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Jakarta, Februari 2022

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta,



Sarjoko
NIP 196703191998031006

Dokumentasi Kegiatan CIP tahun 2022

JAK HABI TAT Jakarta

Pekerjaan Vertikal Garden

Dilaksanakan pembuatan 524 Unit Vertikal Garden, salah satunya :

Lokasi :
Jl. Kamal Muara RT.12
RW.01 Kel. Kamal Muara
Kec. Penjarangan



Sebelum Sesudah

Pekerjaan PJU

Dilaksanakan penyediaan 110 Unit PJU yang berlokasi di Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok



Sebelum Sesudah

Instagram: @info.kiparkiparkota.go.id | @disampemutakhirjakarta | Facebook: @IPMPF Pemasar DDC Jakarta | Twitter: @jarkabatawali

JAK HABI TAT Jakarta

Pekerjaan Gerobak Sampah

Dilaksanakan pembangunan 422 Unit Gerobak Sampah, beberapa diantaranya yaitu:



Proses Pengerjaan Sesudah

Lokasi : RW.01 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjarangan



Proses Pengerjaan Sesudah

Lokasi : RW.08 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing

Instagram: @info.kiparkiparkota.go.id | @disampemutakhirjakarta | Facebook: @IPMPF Pemasar DDC Jakarta | Twitter: @jarkabatawali

JAK HABI TAT Jakarta

Pekerjaan Capura

Dilaksanakan pembangunan 77 Unit Capura, beberapa diantaranya yaitu:



Sebelum Sesudah

Lokasi : Kelurahan Cilincing Lokasi : Kelurahan Tugu Selatan

Instagram: @info.kiparkiparkota.go.id | @disampemutakhirjakarta | Facebook: @IPMPF Pemasar DDC Jakarta | Twitter: @jarkabatawali

JAK HABI TAT Jakarta

Peningkatan Kualitas Saluran

Dilaksanakan 76,513.40 M' peningkatan kualitas saluran, beberapa diantaranya yaitu:



Sebelum Sesudah

Lokasi : RW.10 Kelurahan Sempur Timur Kecamatan Cilincing



Sebelum Sesudah

Lokasi : RW.03 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja

Instagram: @info.kiparkiparkota.go.id | @disampemutakhirjakarta | Facebook: @IPMPF Pemasar DDC Jakarta | Twitter: @jarkabatawali

JAK HABI TAT Jakarta

Peningkatan Kualitas Jalan

Dilaksanakan 64,026.66 M² peningkatan kualitas jalan, beberapa diantaranya yaitu:



Sebelum



Sesudah

▶▶ Lokasi : Jl. Rawa Sengon X RW.022 Kelurahan Kelapa Gading Barat



Sebelum



Sesudah

▶▶ Lokasi : RW.011 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok

📍 @keppa@jakarta.go.id | @disajamutabangjakarta | f LPMP Provinsi DKI Jakarta | @jarkab.go.id

JAK HABI TAT Jakarta

Pekerjaan Vertikal Garden

Dilaksanakan pembuatan 524 Unit Vertikal Garden, salah satunya :



Sebelum



Sesudah

Lokasi : Jl. Kamal Muara RT.12 RW.01 Kel. Kamal Muara Kec. Penjarangan

Pekerjaan PJU

Dilaksanakan penyediaan 110 Unit PJU yang berlokasi di Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok



Sebelum



Sesudah

📍 @keppa@jakarta.go.id | @disajamutabangjakarta | f LPMP Provinsi DKI Jakarta | @jarkab.go.id

JAK HABI TAT Jakarta

PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM DI KEL. P. KELAPA



Ilustrasi Signage



Pembangunan MCK Komunal

Pembangunan Fasilitas Umum (PFU) di Kel. Pulau Kelapa ini merupakan salah satu pelaksanaan CIP di Kepulauan Seribu.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa pekerjaan, yaitu Pekerjaan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Pemeliharaan Jalan, Pekerjaan Signage, dan Pekerjaan Mandi, Cuci, Kakus (MCK).

Per 23 Okt 2022 Progress Pelaksanaan Kegiatan ini telah mencapai 61.295 %.

▶▶ Lokasi : Kelurahan Pulau Kelapa

📍 @keppa@jakarta.go.id | @disajamutabangjakarta | f LPMP Provinsi DKI Jakarta | @jarkab.go.id

JAK HABI TAT Jakarta

PENINGKATAN SARANA, PRASARANA & UTILITAS DI KEL. P. PARI

Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Utilitas (PSPU) di Kel. Pulau Pari ini merupakan salah satu pelaksanaan CIP di Kepulauan Seribu.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa pekerjaan, yaitu Pekerjaan Balai Warga, Pekerjaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Camera, Pekerjaan Pembangunan Jalan, dan Pekerjaan Kanopi.

Per 8 Nov 2022 Progress Pelaksanaan Kegiatan ini telah mencapai 60.027 %.



Pembuatan Kanopi Jalan



Pembangunan Balai Warga

▶▶ Lokasi : Kelurahan Pulau Pari

📍 @keppa@jakarta.go.id | @disajamutabangjakarta | f LPMP Provinsi DKI Jakarta | @jarkab.go.id

Dokumentasi kegiatan pembangunan rumah susun tahun 2022



Peresmian Rumah Susun Kampung Kunir



Peresmian Rusunawa JakHabitat





Rusunawa Kelapa Gading Timur



Rusunawa Karang Anyar



Rusunawa Pulogebang Penggilingan



Rusunawa Daan Mogot

<https://dprkp.jakarta.go.id/> @dinasperumahan.jakarta DPRKP Provinsi DKI Jakarta perumahandki



INISIASI HUNIAN TERJANGKAU DI KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT (TOD)

<https://dprkp.jakarta.go.id/> @dinasperumahan.jakarta DPRKP Provinsi DKI Jakarta perumahandki

Penghargaan yang diterima Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022



Penghargaan Wajib Pajak Instansi Pemerintah Pembayar Pajak Besar dan Tepat Waktu diberikan pada tahun 2022



Penghargaan Penyelesaian Rekomendasi Terbanyak (61 Status Selesai) atas Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI



Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that:

Unit Pengelola Dana Perumahan
Jl. Taman Jatibaru No. 1
Jakarta Pusat
DKI Jakarta
Indonesia 10250

Holds Certificate No:

FS 742241

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

The provision of administration services for people on low incomes to obtain affordable housing in DKI Jakarta Province

For and on behalf of BSI:

Michael Lam - Managing Director Assurance, APAC

Original Registration Date: 2022-01-15

Effective Date: 2022-01-15

Latest Revision Date: 2022-01-15

Expiry Date: 2025-01-14



Page: 1 of 2

...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.

An electronic certificate can be authenticated [online](#)

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +62 21 806 49 600 or +62 21 227 678 09.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization. This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Wilemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 344 090 0001

Sertifikat ISO Quality Management System

MONITORING APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022
PER 30 DESEMBER 2022

NO.	BIDANG / UKPD	APBD TA 2022	APBD-P Tahun 2022 (Pergeseran Ke-5)	REALISASI ANGGARAN PER 30 DESEMBER 2022	
				TOTAL (Rp)	% thd APBD 2022
	TOTAL BL + BTL	2.001.398.937.422	1.712.120.401.012	1.488.855.131.069	86,96%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	122.077.234.506	111.155.247.636	108.782.181.457	97,87%
	BELANJA LANGSUNG (DINAS + SUDIN + UPDP + UPRS + PUSDATIN)	1.879.321.702.916	1.600.965.153.376	1.380.072.949.612	86,20%

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	122.077.234.506	111.155.247.636	108.782.181.457	97,87%
B	BELANJA LANGSUNG	1.045.933.642.589	817.012.055.118	629.128.459.446	77,00%
1	SEKRETARIAT	12.317.501.340	12.578.206.349	11.160.860.158	88,73%
2	BIDANG PERMUKIMAN	2.292.242.618	1.499.527.765	1.430.382.528	95,39%
3	BIDANG PERUMAHAN	626.838.831.277	630.285.035.782	612.545.138.324	97,19%
4	BIDANG PEMBIAYAAN DAN KEMITRAAN PERUMAHAN	400.000.000.000	171.326.262.584	2.754.001.256	1,61%
5	BIDANG REGULASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	4.485.067.354	1.323.022.638	1.238.077.180	93,58%
	JUMLAH DINAS	1.168.010.877.095	928.167.302.754	737.910.640.903	79,50%

SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	119.980.205.112	117.858.719.618	115.842.811.109	98,29%
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	71.959.553.345	68.233.011.441	67.595.568.077	99,07%
3	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	144.652.048.894	144.637.640.250	139.891.583.881	96,72%
4	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	78.724.031.196	78.716.943.266	75.586.805.186	96,02%
5	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	70.365.916.011	67.062.162.941	64.078.444.047	95,55%
6	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	14.829.932.296	6.300.490.036	5.843.666.164	92,75%
	JUMLAH SUDIN	500.511.686.854	482.808.967.552	468.838.878.464	97,11%

MONITORING APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022
PER 30 DESEMBER 2022

NO.	BIDANG / UKPD	APBD TA 2022	APBD-P Tahun 2022 (Pergeseran Ke-5)	REALISASI ANGGARAN PER 30 DESEMBER 2022	
				TOTAL (Rp)	% thd APBD 2022
UNIT PENGELOLA DANA PERUMAHAN					
1	UPDP	5.798.000.000	5.798.000.000	4.291.036.473	74,01%
JUMLAH UPDP		5.798.000.000	5.798.000.000	4.291.036.473	74,01%
PUSAT DATA DAN INFORMASI					
1	PUSDATIN	3.261.604.767	3.281.553.883	3.124.783.950	95,22%
JUMLAH PUSDATIN		3.261.604.767	3.281.553.883	3.124.783.950	95,22%
UNIT PENGELOLAAN RUMAH SUSUN (UPRS)					
1	UPRS I	37.040.906.984	36.610.779.962	34.381.552.484	93,91%
2	UPRS II	37.158.171.951	31.245.480.684	28.394.198.161	90,87%
3	UPRS III	56.454.322.394	47.413.917.443	46.051.985.207	97,13%
4	UPRS IV	31.763.043.643	32.670.683.352	29.964.517.240	91,72%
5	UPRS V	30.494.963.721	28.999.981.776	26.243.236.142	90,49%
6	UPRS VI	38.239.401.551	35.016.241.888	31.732.273.313	90,62%
7	UPRS VII	52.671.660.610	49.389.435.574	48.562.123.698	98,32%
8	UPRS VIII	39.994.297.852	30.718.056.144	29.359.905.034	95,58%
JUMLAH UPRS		323.816.768.706	292.064.576.823	274.689.791.279	94,05%

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPI) S.D. 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
									Rp	%		
TOTAL DINAS, SUDIN, + UPRS							1.168.010.877.095	1.712.120.401.012	1.488.855.131.069	86,96%	97,55%	
TOTAL DINAS BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG							768.010.877.095	928.167.302.754	737.910.640.903	79,50%	100,00%	
SEKRETARIAT BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG							134.394.735.846	123.733.453.985	119.943.041.615	96,94%	100,00%	
BELANJA TIDAK LANGSUNG							122.077.234.506	111.155.247.636	108.782.181.457	97,87%	100,00%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.01.01.01.0001	15.413.763.000	13.614.479.940	13.565.470.704	99,64%	100%	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.01.01.02.0001	1.252.185.000	1.109.881.616	1.100.709.690	99,17%	100%	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.01.01.03.0001	910.364.000	782.200.000	772.200.000	98,72%	100%	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.1.01.01.04.0001	10.045.000	-	-	0,00%	100%	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.01.01.05.001	628.269.000	569.180.000	568.440.000	99,87%	100%	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.01.01.06.0001	816.981.000	751.435.960	722.679.180	96,17%	100%	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.01.01.07.0001	15.531.467.000	12.049.723.204	11.490.748.077	95,36%	100%	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.01.01.08.0001	263.000	190.956	184.621	96,68%	100%	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.01.02.01.0001	4.686.000.000	4.038.275.000	3.954.100.000	97,92%	100%	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5.1.01.02.05.0001	82.827.897.506	78.239.880.960	76.607.649.185	97,91%	100%	
BELANJA LANGSUNG							12.317.501.340	12.578.206.349	11.160.860.158	88,73%	100,00%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	A.X.XX.01.1.02.03.001	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		10.237.260	3.160.000	3.160.000	100,00%	100,00%	
					- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.1.02.01.01.0027	3.168.000	3.160.000	3.160.000	100,00%	100,00%	Realisasi 100%
					- Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.1.02.02.01.0042	7.069.260	-	-	-	0,00%	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan Perlengkapan Kantor		623.725.377	623.725.377	351.711.300	56,39%	100,00%	
					- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.1.02.01.01.0012	28.875.000	28.875.000	28.305.000	98,03%	100,00%	Realisasi 100%
					- Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5.2.02.05.01.0004	96.629.500	96.629.500	94.905.000	98,22%	100,00%	Realisasi 100%
					- Belanja Moda Mebel	5.2.02.05.02.0001	142.406.913	142.406.913	127.749.300	89,71%	100,00%	Realisasi 100%
					- Belanja Modal Personal Computer	5.2.02.10.01.0002	355.813.964	355.813.964	100.752.000	28,32%	100,00%	Realisasi 100%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pengisian Alat Pemadam Api Ringan		59.776.750	59.776.750	47.147.250	78,87%	100,00%	
					- Belanja Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.1.02.01.01.0009	59.776.750	59.776.750	47.147.250	78,87%	100,00%	Realisasi 100%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Alat Tulis Kantor		299.994.695	299.994.695	290.042.950	96,68%	100,00%	
					- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	299.994.695	299.994.695	290.042.950	96,68%	100,00%	Realisasi 100%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Perlengkapan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan		147.980.437	147.980.437	146.169.240	98,78%	100,00%	
					- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.1.02.01.01.0036	147.980.437	147.980.437	146.169.240	98,78%	100,00%	Realisasi 100%
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		72.215.440	72.215.440	69.935.550	96,84%	100,00%	
					- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	5.1.02.01.01.0026	72.215.440	72.215.440	69.935.550	96,84%	100,00%	Realisasi 100%
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material		Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus		157.241.150	157.241.150	157.200.000	99,97%	100,00%	
					- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.1.02.01.01.0004	157.241.150	157.241.150	157.200.000	99,97%	100,00%	Realisasi 100%
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Penyediaan Makanan dan Minuman		104.866.080	104.866.080	102.524.200	97,77%	100,00%	
					- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.1.02.01.01.0058	104.866.080	104.866.080	102.524.200	97,77%	100,00%	Pembayaran sesuai kebutuhan
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)		2.289.321.430	2.289.321.430	1.484.007.507	64,82%	100,00%	
					- Belanja Tagihan Telepon	5.1.02.02.01.0059	28.378.020	28.378.020	8.844.882	31,17%	100,00%	Pembayaran sesuai tagihan
					- Belanja Tagihan Air	5.1.02.02.01.0060	414.741.360	414.741.360	217.056.396	52,34%	100,00%	Pembayaran sesuai tagihan
					- Belanja Tagihan Listrik	5.1.02.02.01.0061	1.675.367.650	1.675.367.650	1.091.033.092	65,12%	100,00%	Pembayaran sesuai tagihan
					- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.1.02.02.01.0063	170.834.400	170.834.400	167.073.137	97,80%	100,00%	Pembayaran sesuai tagihan

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPI) S.D. 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
									Rp	%		
TOTAL DINAS, SUDIN, + UPRS							1.168.010.877.095	1.712.120.401.012	1.488.855.131.069	86,96%	97,55%	
TOTAL DINAS BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG							768.010.877.095	928.167.302.754	737.910.640.903	79,50%	100,00%	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy		295.680.000	295.680.000	253.232.000	85,64%	100,00%	
					Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.102.02.04.0115	295.680.000	295.680.000	253.232.000	85,64%	100,00%	Realisasi 100%
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan		6.286.945.571	6.526.247.491	6.328.719.801	100,66%	100,00%	Kontrak Perorangan (Masih berjalan sampai 31 desember 2022)
					Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.102.02.01.0026	671.701.571	701.666.395	687.850.511	98,03%	100,00%	Kontrak Perorangan (Masih berjalan sampai 31 desember 2022)
					Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.102.02.01.0027	734.514.528	765.504.888	758.465.386	99,08%	100,00%	Kontrak Perorangan (Masih berjalan sampai 31 desember 2022)
					Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.102.02.01.0029	483.975.410	466.046.880	357.153.249	76,63%	98,00%	Kontrak Perorangan (Masih berjalan sampai 31 desember 2022)
					Belanja Jasa Tenaga Caraka	5.102.02.01.0032	367.257.264	382.752.444	380.603.225	99,44%	100,00%	Kontrak Perorangan (Masih berjalan sampai 31 desember 2022)
					Belanja Jasa Tenaga Supir	5.102.02.01.0033	244.838.176	255.168.296	247.198.389	96,88%	100,00%	Kontrak Perorangan (Masih berjalan sampai 31 desember 2022)
					Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	5.102.02.01.0035	244.838.176	255.168.296	253.273.859	99,26%	100,00%	Kontrak Perorangan (Masih berjalan sampai 31 desember 2022)
					Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.102.02.01.0031	1.953.004.384	2.041.346.368	2.011.841.088	98,55%	100,00%	Kontrak Perorangan (Masih berjalan sampai 31 desember 2022)
					Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.102.02.01.0030	1.586.816.062	1.658.593.924	1.632.334.094	98,42%	100,00%	Kontrak Perorangan (Masih berjalan sampai 31 desember 2022)
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus		59.333.670	59.333.670	22.061.300	37,18%	100,00%	
					Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	5.102.02.01.0067	59.333.670	59.333.670	22.061.300	37,18%	100,00%	Pembayaran sesuai masa berlaku STNK
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan / Service Kendaraan Dinas Operasional		239.224.667	239.224.667	238.862.095	99,85%	100,00%	
					Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Bengkel	5.102.01.01.0020	22.981.310	22.981.310	22.941.195	99,83%	100,00%	Realisasi 100%
					Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.102.03.02.0038	95.881.500	95.881.500	95.600.230	99,71%	100,00%	Realisasi 100%
					Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Khusus	5.102.03.02.0040	120.361.857	120.361.857	120.320.670	99,97%	100,00%	Realisasi 100%
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja		132.436.128	132.436.128	132.417.000	99,99%	100,00%	
					Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Alat Kantor Lainnya	5.102.03.02.0117	132.436.128	132.436.128	132.417.000	99,99%	100,00%	Realisasi 100%
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor		195.198.003	195.198.003	192.658.260	98,70%	100,00%	
					Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.102.01.01.0036	195.198.003	195.198.003	192.658.260	98,70%	100,00%	Realisasi 100%
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Rutin Gedung DPRKP dan Masjid Al Amanah		830.788.878	1.017.690.135	980.886.005	96,38%	100,00%	
					Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Jasa Desain Arsitektural	5.102.02.08.0002	36.804.130	36.804.130	-	0,0%	100,00%	
					Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.102.03.02.0121	198.681.725	391.383.225	391.383.225	100,0%	100,00%	Realisasi 100%
					Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.102.03.03.0001	388.878.640	384.496.880	384.496.880	100,0%	100,00%	Realisasi 100%
					Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	5.102.02.08.0019	52.019.495	54.556.500	54.556.500	100,0%	100,00%	Realisasi 100%
					Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	5.102.03.02.0124	154.404.888	150.449.400	150.449.400	100,0%	100,00%	Realisasi 100%
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Lift Gedung DPRKP		199.735.804	199.735.804	185.225.700	92,74%	100,00%	
					Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Khusus	5.102.03.02.0040	199.735.804	199.735.804	185.225.700	92,74%	100,00%	Realisasi 100%

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPI) S.D. 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
									Rp	%		
TOTAL DINAS, SUDIN, + UPRS							1.168.010.877.095	1.712.120.401.012	1.488.855.131.069	86,96%	97,55%	
TOTAL DINAS BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG							768.010.877.095	928.167.302.754	737.910.640.903	79,50%	100,00%	
18	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		Narasumber dan Tenaga Ahli di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		312.800.000	235.800.000	174.900.000	74,17%	100,00%	
					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5.1.02.02.01.0003	77.000.000	0	-	0%	0,00%	Pembayaran sesuai pelaksanaan
					Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.1.02.02.01.0004	235.800.000	235.800.000	174.900.000	74,17%	100,00%	Pembayaran sesuai pelaksanaan
BIDANG PERMUKIMAN							2.292.242.618	1.499.527.765	1.430.382.528	95,39%	100,00%	
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		Penyusunan SOP dan standar teknis peningkatan kualitas permukiman		550.255.728	498.106.750	498.106.750	100,00%	100,00%	
					Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	5.1.02.02.09.0012	550.255.728	498.106.750	498.106.750	100,00%	100,00%	
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman		1.059.265.697	740.866.553	681.691.553	92,01%	100,00%	
					Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.1.02.02.01.0029	554.400.000	360.000.000	303.825.000	84,40%	100,00%	
					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.1.02.02.01.0003	104.500.000	45.000.000	42.000.000	93,33%	100,00%	
					Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.2.03.01.02.0008	61.804.969	0	-	0,00%	0,00%	
					Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	5.1.02.02.09.0012	338.560.728	335.866.553	335.866.553	100,00%	100,00%	
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		Peningkatan Kompetensi Masyarakat untuk Pelaksanaan CIP		682.721.193	260.554.540	250.584.225	96,17%	100,00%	sesuai realisasi kegiatan, terdapat silpa senilai 9.970.315 akibat penyesuaian komponen yang tidak bisa diinput sepaket dalam sistem e-hugeting
					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5.1.02.02.01.0003	237.600.000	43.500.000	43.500.000	100,00%	100,00%	
					Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.1.02.02.01.0004	121.000.000	48.070.000	48.070.000	100,00%	100,00%	
					Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.1.02.01.01.0012	63.580.000	34.720.800	34.720.800	100,00%	100,00%	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	23.054.240	13.917.180	13.917.180	100,00%	100,00%	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.1.02.01.01.0026	64.860.598	34.964.445	34.964.445	100,00%	100,00%	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.1.02.01.01.0052	124.168.000	74.431.800	74.431.800	100,00%	100,00%	
					Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.1.02.02.01.0029	48.458.355	980.000	980.000	100,00%	100,00%	
BIDANG PERUMAHAN							626.838.831.277	630.285.035.782	612.545.138.324	97,19%	96,53%	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Manajemen Rekrayasa Lalu Lintas Rumah Susun Yos Sudarso		666.030.728	-	-	0,00%	0,00%	
					Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.2.03.01.02.0008	666.030.728	-	-	0,00%	0	Tidak dilaksanakan, sudah dihapuskan di sistem
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Biaya Retribusi Pengukuran Peil Lantai Bangunan dan Peil Banjir Rumah Susun Yos Sudarso		5.791.225	-	-	0,00%	0,00%	
					Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.2.03.01.02.0008	5.791.225	-	-	0,00%	0	Tidak dilaksanakan, sudah dihapuskan di sistem
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Studi Kelayakan Rumah Susun di Provinsi DKI Jakarta		3.435.932.368	3.435.932.368	3.435.050.000	99,97%	100,00%	
					Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.2.03.01.02.0008	3.435.932.368	3.435.932.368	3.435.050.000	99,97%	100%	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun		2.097.541.039	2.097.541.039	1.833.783.271	87,43%	85,00%	
					Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	5.1.02.02.08.0002	2.097.541.039	2.097.541.039	1.833.783.271	87,43%	85%	Sisa termin 6 - 15% pengawasan berkala saat konstruksi fisik selesai
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Penyusunan DED dan Dokumen Lingkungan Manajemen Lalu lintas Rumah Susun		21.147.819.396	21.153.178.068	13.787.538.699	71,16%	84,54%	
					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.1.02.02.01.0003	633.596.112	627.596.112	527.100.000	83,99%	90%	Assistant Professional Staff 9 bulan dari 10 bulan; Narasumber 69 jam dari 90 jam

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D. 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
									Rp	%		
TOTAL DINAS, SUDIN, + UPRS							1.168.010.877.095	1.712.120.401.012	1.488.855.131.069	86,96%	97,55%	
TOTAL DINAS BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG							768.010.877.095	928.167.302.754	737.910.640.903	79,50%	100,00%	
					- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.202.10.02.0005	57.980.560	57.980.560	55.888.500	96,39%	100%	
					- Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.203.01.02.0008	19.717.718.548	19.717.718.548	12.507.090.198	63%	66%	Penyusunan DED sudah penagihan termin 4 - 70%, Penyusunan Amdal termin 1 - 70%, Perencanaan Sarpras 1 sudah 100%, Perencanaan Sarpras 2 - 100%
					- Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	5.102.02.04.0049	59.733.696	59.733.696	38.302.041	64,12%	51%	Telah dilakukan 3x perjalanan dengan total Rp. 38.302.041,-
					- Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	5.102.02.05.0041	6.237.440	-	-	0,00%	0%	Tidak jadi dilaksanakan
					- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Desain Arsitektural	5.102.02.08.0002	690.149.152	690.149.152	659.157.960	95,51%	100%	
					Penyusunan DED Penyediaan Rumah Susun Jagakarsa (Hutang Daerah)	5.2.03.01.02.0008	-	1.924.785.666	1.261.310.566	65,53%	80,00%	
					Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.203.01.02.0008	-	1.924.785.666	1.261.310.566	65,53%	80,00%	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Pembangunan Rumah Susun Jalan Tongkol		80.382.665.237	80.382.665.237	78.731.306.045	97,95%	100,00%	
					- Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.203.01.02.0008	80.382.665.237	80.382.665.237	78.731.306.045	97,94%	100,00%	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Pembangunan Rumah Susun PIK Pulo Gadung Tahap II		98.428.456.514	98.882.656.514	98.818.043.587	99,93%	100,00%	
					Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.203.01.02.0008	98.428.456.514	98.882.656.514	98.818.043.587	100%	100,00%	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe, Kel.Jatinegara, Kec.Cakung, Jakarta Timur		138.500.000.000	139.492.200.000	139.411.052.005	99,94%	100%	
					Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.203.01.02.0008	138.500.000.000	139.492.200.000	139.411.052.005	99,94%	100,00%	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat (3 Tower)		94.100.000.000	94.578.000.000	94.575.430.280	100,00%	100,00%	
					Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.203.01.02.0008	94.100.000.000	94.578.000.000	94.575.430.280	100%	100,00%	
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Pembangunan Rumah Susun Padat Karya, Jakarta Utara		65.400.000.000	65.554.000.000	65.549.799.000	99,99%	100,00%	
					Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.203.01.02.0008	65.400.000.000	65.554.000.000	65.549.799.000	100%	100,00%	
11	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Pembangunan Rumah Susun Kel.Kelapa Gading Timur, Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara		30.085.000.000	30.293.000.000	30.291.048.174	99,99%	100,00%	
					Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.203.01.02.0008	30.085.000.000	30.293.000.000	30.291.048.174	100%	100,00%	
12	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Pembangunan Rumah Susun Polsek Menteng (Hibah Barang Kepada Polda Metro Jaya)		49.150.000.000	49.405.500.000	49.402.054.961	99,99%	100,00%	
					Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.203.01.02.0008	49.150.000.000	49.405.500.000	49.402.054.961	100%	100,00%	
					Pembangunan Rusun Jl. Inspeksi BKT Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (Hutang Daerah)		-	3.264.484.168	3.264.484.167	100,00%	100,00%	
					Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.203.01.02.0008	-	3.264.484.168	3.264.484.167	100,00%	100,00%	
					Revitalisasi Rusun Penjaringan Jakarta Utara (Hutang Daerah)		-	4.695.769.340	4.695.769.338	100,00%	100,00%	
					Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.203.01.02.0008	-	4.695.769.340	4.695.769.338	100,00%	100,00%	
					Revitalisasi Rusun Karang Anyar Jakarta Pusat (Hutang Daerah)		-	4.066.815.024	4.066.815.023	100,00%	100,00%	
					Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.203.01.02.0008	-	4.066.815.024	4.066.815.023	100,00%	100,00%	
					Revitalisasi Rusun Cipinang Besar Utara Jakarta Timur (Hutang Daerah)		-	1.179.299.554	1.179.299.553	100,00%	100,00%	
					Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.203.01.02.0008	-	1.179.299.554	1.179.299.553	100,00%	100,00%	
					Pembangunan Rumah Susun PIK Pulogadung (Hutang Daerah)		-	2.444.725.818	2.444.725.817	100,00%	100,00%	
					Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.203.01.02.0008	-	2.444.725.818	2.444.725.817	100,00%	100,00%	
13	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi		Pemeliharaan Berkala Rumah Susun		36.690.036.855	19.863.633.111	13.483.816.179	67,88%	88,00%	
					- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempal Tinggal-Flat/Rumah Susun	5.102.03.03.0045	35.418.464.289	18.960.643.970	12.792.213.818	67,47%	88%	Rata - rata Progres Fisik 2 Lokasi = 80% 1. Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 2 (Pinus Elok) 82,703% 2. Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 3 (Muara Baru) 82,219% 3. Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 4 (Tihar Cakung) 100% - Realisasi Pembayaran Fisik dan Pengawasan 100 % 4. Pembayaran Hutang Daerah 100 %, kecuali Pembayaran Hutang Daerah Pemeliharaan Rusun Pulo Gebang. Tidak terealisasi

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D. 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
									Rp	%		
TOTAL DINAS, SUDIN, + UPRS							1.168.010.877.095	1.712.120.401.012	1.488.855.131.069	86,96%	97,55%	
TOTAL DINAS BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG							768.010.877.095	928.167.302.754	737.910.640.903	79,50%	100,00%	
					Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	5.102.02.08.0019	1.271.572.566	902.989.141	691.602.361	76,59%	88%	
14	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Rumah Susun di UPRS III		6.749.557.915	6.749.557.915	5.488.063.300	81,31%	100,00%	
					- Belanja Modal Flat/Rumah Susun (Fisik)	5.203.01.02.0008	5.910.564.881	5.910.564.881	4.699.658.000	79,51%	100,00%	
					Belanja Modal Flat/Rumah Susun (Pengawasan)	5.203.01.02.0008	309.361.723	309.361.723	279.270.500	90,27%	100,00%	
					- Belanja Modal Flat/Rumah Susun (Perencanaan)	5.203.01.02.0008	529.631.311	529.631.311	509.134.800	96,13%	100%	
					Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Susun Nagrak Jakarta Utara (Hutang Daerah)		-	826.650.632	825.748.359	99,89%	100,00%	
					Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	5.203.01.02.0008	-	826.650.632	825.748.359	99,89%	100,00%	
BIDANG PEMBIAYAAN DAN KEMITRAAN PERUMAHAN							400.000.000.000	171.326.262.584	2.754.001.256	1,61%	95,50%	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Pengadaan Tanah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		400.000.000.000	170.000.000.000	2.754.001.256	1,62%	91,00%	
					- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.102.01.01.0001	194.779.200	194.779.200	181.229.700	93,04%	100,00%	Pekerjaan Pemasangan Patok batas Lahan telah dibayarkan sesuai dengan SPK
					- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5.102.01.01.0026	199.183.985	199.183.985	191.808.333	96,30%	100,00%	Pekerjaan Pemasangan Papan Nama Aset telah dibayarkan sesuai dengan SPK
					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.102.02.01.0002	718.740.000	718.740.000	-	0,00%	0,00%	Kegiatan dan kode rekening yang dimaksud tidak ada dalam kegiatan Seksi Penyediaan Tanah TA 2022
					Belanja Jasa Pengukuran Tanah	5.102.02.01.0053	51.150.000	51.150.000	-	0,00%	0,00%	Kebijakan dari Kantah BPN Wilayah untuk pensertifikatan hanya bersumber dari Anggaran BPAD Provinsi DKI Jakarta dan Suban PAD Kota Administrasi
					Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	5.102.02.09.0014	109.918.800	109.918.800	-	0,00%	0,00%	Kebijakan dari Kantah BPN Wilayah untuk pensertifikatan hanya bersumber dari Anggaran BPAD Provinsi DKI Jakarta dan Suban PAD Kota Administrasi
					Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegi	5.102.02.01.0004	360.360.000	360.360.000	95.455.980	26,49%	70,00%	Nilai penyerapan tidak dapat 100% dikarenakan ada aturan dari Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Langsung TA perorangan nilai kontraknya tidak boleh lebih dari 100 juta dan saat ini sudah pembayaran berdasarkan SPK (terdapat sedikit pemotongan dikarenakan Tenaga Ahli tidak masuk)
					Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.102.02.01.0026	360.360.000	360.360.000	193.590.000	53,72%	70,00%	Nilai penyerapan tidak dapat 100% dikarenakan ada aturan dari Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Langsung TA perorangan nilai kontraknya tidak boleh lebih dari 100 juta dan saat ini sudah pembayaran berdasarkan SPK (terdapat sedikit pemotongan dikarenakan Tenaga Administrasi tidak masuk)
					Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.102.02.01.0029	718.740.000	718.740.000	434.037.858	60,39%	70,00%	Nilai penyerapan tidak dapat 100% karena diawal direncanakan untuk melakukan pengadaan TA dari BPN namun dari BPN memiliki kebijakan hanya dapat menggunakan anggaran BPAD sehingga waktu yang tersisa digunakan untuk menghire TA Universitas dan Kontrak TA Universitas baru selesai di 30 November dan saat ini sudah terbit SPD di November dan saat ini sedang dalam proses penagihan
					Belanja Sewa Alat Kerja Penerbangan Lainnya	5.102.02.04.0462	59.302.320	0	-	#DIV/0!	0,00%	Anggaran dimatikan dalam APBD-P 2022
					Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	5.201.01.01.0001	397.946.205.695	167.607.859.995	-	0,00%	100,00%	Sudah dibuatkan Surat kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta No e-0743/RR.02.01 Tanggal 29 November 2022 Hal Permohonan Percepatan Penerbitan SPD Kegiatan Pengadaan Tanah
					Jasa Penilaian / Appraisal Lokasi I	5.201.01.01.0001	99.412.005	99.412.005	97.759.365	98,34%	100,00%	Pekerjaan Appraisal Lokasi I telah dibayarkan sesuai dengan SPK
					Jasa Penilaian / Appraisal Lokasi II	5.201.01.01.0001	99.412.005	99.412.005	69.452.700	69,86%	100,00%	Pekerjaan Appraisal Lokasi II telah dibayarkan sesuai dengan SPK
					Jasa Penilaian / Appraisal Lokasi III	5.201.01.01.0001	99.412.005	99.412.005	98.146.200	98,73%	100,00%	Pekerjaan Appraisal Lokasi III telah dibayarkan sesuai dengan SPK
					Jasa Penilaian / Appraisal Lokasi IV	5.201.01.01.0001	99.412.005	99.412.005	70.285.200	70,70%	100,00%	Pekerjaan Appraisal Lokasi IV telah dibayarkan sesuai dengan SPK
5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP		Kajian Pengembangan Rusunawa dan Rusunami		1.581.211.896	1.326.262.584	1.322.235.920	99,70%	100,00%	
					- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	5.102.02.09.0012	918.265.304	853.257.304	852.293.000	99,89%	0,00%	
					- Kajian Kerjasama Penataan Permukiman Lokasi Cipinang Besar Selatan	5.102.02.09.0012	588.808.000	523.800.000	523.400.000	99,92%	100,00%	Penyempurnaan (Revisi) Laporan Akhir, Pembayaran sudah 100%, menunggu SP2D
					Kajian Harga Hunian di Pemprov DKI Jakarta	5.102.02.09.0012	329.457.304	329.457.304	328.893.000	99,83%	100,00%	Penyempurnaan Laporan Akhir
					Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	5.102.02.08.0013	662.946.592	473.005.280	469.942.920	99,35%	0,00%	
					Studi Kelayakan Perencanaan Lokasi I	5.102.02.08.0013	94.706.656	94.706.656	94.367.760	99,64%	100,00%	Pembayaran selesai 100%
					Studi Kelayakan Perencanaan Lokasi II	5.102.02.08.0013	94.706.656	94.706.656	94.145.760	99,41%	100,00%	Pembayaran selesai 100%

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPI) S.D. 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
									Rp	%		
TOTAL DINAS, SUDIN, + UPRS							1.168.010.877.095	1.712.120.401.012	1.488.855.131.069	86,96%	97,55%	
TOTAL DINAS BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG							768.010.877.095	928.167.302.754	737.910.640.903	79,50%	100,00%	
					- Studi Kelayakan Perencanaan Lokasi III	5.102.02.08.0013	94.706.656	94.178.656	93.812.760	99,61%	100,00%	Pembayaran selesai 100%
					Studi Kelayakan Perencanaan Lokasi IV	5.102.02.08.0013	94.706.656	94.706.656	93.808.320	99,05%	100,00%	Pembayaran selesai 100%
					Studi Kelayakan Perencanaan Lokasi V	5.102.02.08.0013	94.706.656	94.706.656	93.808.320	99,05%	100,00%	Pembayaran selesai 100%
					Studi Kelayakan Perencanaan Lokasi VI	5.102.02.08.0013	94.706.656	0	-	0,00%	0,00%	Anggaran dimatikan dalam APBD-P 2022
					Studi Kelayakan Perencanaan Lokasi VII	5.102.02.08.0013	94.706.656	0	-	0,00%	0,00%	Anggaran dimatikan dalam APBD-P 2022
BIDANG REGULASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT							4.485.067.354	1.323.022.638	1.238.077.180	93,58%	100,00%	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP		Penyelesaian Masalah Sengketa Perumahan dan Rumah Susun di PN dan PTUN		868.560.000	543.560.000	495.000.000	91,07%	100,00%	
					Honorarium Narasumber atau Pembaahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.102.02.01.0003	868.560.000	543.560.000	495.000.000	91,07%	100,00%	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP		Partisipasi Event Perumahan		99.917.300	99.917.300	99.763.840	99,85%	100,00%	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	5.102.01.01.0026	10.369.200	10.369.200	10.345.200	99,77%	100,00%	
					Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.102.01.01.0058	2.992.000	2.992.000	2.923.000	97,69%	100,00%	
					Belanja Pakaian Adat Daerah	5.102.01.01.0074	3.692.700	3.692.700	3.689.640	99,92%	100,00%	
					Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.102.02.01.0004	48.000.000	48.000.000	47.952.000	99,90%	100,00%	
					Belanja Sewa Bangunan Terbuka	5.102.02.05.0025	34.863.400	34.863.400	34.854.000	99,97%	100,00%	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP		Pembuatan sistem RUTA/RUALB Secara Elektronik bagi Rusunami		459.391.020	-	-	0,00%	0,00%	Sudah dimatikan di APBDP
					Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.102.02.01.0029	459.391.020	-	-	0,00%	0,00%	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP		Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman		993.879.150	197.437.350	195.712.500	99,13%	100,00%	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5.102.01.01.0026	993.879.150	197.437.350	195.712.500	99,13%	100,00%	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP		Kajian Pengembangan Rusunawa dan Rusunami		2.063.319.884	482.107.988	447.600.840	92,84%	100,00%	
					Kajian Potensi Penerimaan dan Pengembangan Rusunawa dengan Pola Pengelolaan BLUD	5.102.02.09.0012	352.664.751	352.664.751	349.016.190	98,97%	100,00%	
					Kajian Aspek-aspek dalam Perubahan Hak Pemanfaatan Sewa Rusunawa Menjadi Hak Sewa Beli	5.102.02.09.0012	129.443.237	129.443.237	98.584.650	76,16%	100,00%	Penyesuaian Kebutuhan Tenaga Ahli

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPI) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
									Rp	%		
SUDIN JAKARTA PUSAT							119.980.205.112	117.858.719.618	115.842.811.109	98,29%	92,66%	
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.03.02.004	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Karet Tengsin		3.499.999.998	3.499.999.998	3.398.615.910	97,10%	100,00%	
					- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	235.825.435	235.825.435	235.825.320	100,00%	100,00%	
					- Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	3.264.174.563	3.264.174.563	3.162.790.590	96,89%	100,00%	
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.03.02.005	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Kebon Melati		3.499.999.998	3.267.591.214	3.217.433.568	98,46%	100,00%	
					- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	235.825.435	235.825.434	235.825.434	100,00%	100,00%	
					- Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	3.264.174.563	3.031.765.780	2.981.608.134	98,35%	100,00%	
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.03.02.006	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Petamburan		3.499.999.998	3.440.439.568	3.381.907.719	98,30%	100,00%	
					- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	235.825.435	235.825.435	235.825.435	100,00%	100,00%	
					- Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	3.264.174.563	3.204.614.133	3.146.082.284	98,17%	100,00%	
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.03.02.007	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Kebon Kacang		3.499.999.998	3.323.983.769	3.258.731.733	98,04%	100,00%	
					- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	235.825.435	235.825.435	235.804.528	99,99%	100,00%	
					- Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	3.264.174.563	3.088.158.334	3.022.927.205	97,89%	100,00%	
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.03.02.008	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Kampung Bali		3.499.999.998	3.417.264.186	3.088.090.856	90,37%	100,00%	
					- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	235.825.435	235.825.435	235.215.210	99,74%	100,00%	
					- Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	3.264.174.563	3.181.438.751	2.852.875.646	89,67%	100,00%	
6	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di	2.03.02.009	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Menteng		6.999.999.983	6.856.272.390	6.776.233.486	98,33%	100,00%	
					- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	469.688.611	469.688.611	469.637.797	99,99%	100,00%	
					- Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	6.530.311.372	6.386.583.779	6.306.595.689	98,75%	100,00%	
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di	2.03.02.010	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pegangsaan		6.999.999.983	6.999.999.983	6.709.894.693	95,86%	100,00%	
					- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	469.688.611	469.688.611	468.510.650	99,75%	100,00%	
					- Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	6.530.311.372	6.530.311.372	6.241.384.043	95,58%	100,00%	
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di	2.03.02.011	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Mangga Dua Selatan		6.999.999.983	6.796.227.285	6.655.969.970	97,94%	100,00%	
					- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	469.688.611	469.688.611	469.622.150	99,99%	100,00%	
					- Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	6.530.311.372	6.326.538.674	6.186.347.820	97,78%	100,00%	
9	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di	2.03.02.012	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Karang Anyar		6.999.999.983	6.801.356.444	6.673.363.849	98,12%	100,00%	
					- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	469.688.611	469.688.611	469.651.442	99,99%	100,00%	
					- Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	6.530.311.372	6.331.667.833	6.203.712.407	97,98%	100,00%	
10	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di	2.03.02.013	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Kampung Rawa		17.499.999.987	17.164.641.701	16.793.652.318	97,84%	100,00%	
					- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	1.872.051.137	1.174.154.714	1.159.810.693	98,78%	100,00%	
					- Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	15.627.948.850	15.990.486.987	15.633.841.625	97,77%	100,00%	

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
									Rp	%		
SUDIN JAKARTA PUSAT							119.980.205.112	117.858.719.618	115.842.811.109	98,29%	92,66%	
11	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di	2.03.02.014	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Tanah Tinggi		13.999.996.985	13.645.915.675	13.453.730.263	98,59%	100,00%	
					- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	939.325.730	939.325.730	938.407.586	99,90%	100,00%	
					- Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	13.060.671.255	12.706.589.945	12.515.322.677	98,49%	100,00%	
12	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di	2.03.02.015	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Galur		3.499.999.998	3.435.804.694	3.371.440.887	98,13%	86,60%	
					- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	235.825.435	235.825.435	235.237.182	99,75%	90,00%	
					- Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	3.264.174.563	3.199.979.259	3.136.203.705	98,01%	83,20%	
13	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk	2.03.02.009	Perbaikan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Administrasi Jakarta Pusat		38.374.949.106	38.374.949.106	38.023.527.585	99,08%	100,00%	
					- Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	38.374.949.106	38.374.949.106	38.023.527.585	99,08%	100,00%	
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan	2.02.03.001	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		2.909.500	2.200.000	2.190.000	99,55%	100,00%	
					- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.1.02.01.01.0027	2.200.000	2.200.000	2.190.000	99,55%	100,00%	
					- Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.1.02.02.01.0042	709.500	0	-			
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum Perangkat	Penyediaan Peralatan dan	2.06.02.001	Penyediaan Alat Tulis Kantor		162.256.303	153.665.914	150.679.750	98,06%	100,00%	
					- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.1.01.01.01.0024	46.645.940	46.645.940	45.941.500	98,49%	100,00%	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.1.01.01.01.0036	5.260.750	5.260.750	5.255.250	99,90%	100,00%	
					- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.2.02.10.02.0005	65.644.601	65.644.601	59.938.000	91,31%	100,00%	
					- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	5.2.02.10.01.0003	34.895.212	34.895.212	30.110.000	86,29%	100,00%	
					Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.1.02.03.02.0117	9.809.800	9.809.800	9.435.000	96,18%	100,00%	
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum Perangkat	Penyediaan Barang Cetak	2.06.05.001	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		8.721.570	8.721.570	8.707.950	99,84%	100,00%	
					- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.1.01.01.01.0026	8.721.570	8.721.570	8.707.950	99,84%	100,00%	
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	2.06.07.001	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus		20.196.000	15.912.000	12.262.000	77,06%	80,00%	
					- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Peluman	5.1.02.01.01.0004	20.196.000	15.912.000	12.262.000	77,06%	80,00%	
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.06.08.001	Penyediaan Makanan dan Minuman		18.909.880	18.909.880	18.657.500	98,67%	100,00%	
					- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.1.02.01.01.0052	11.440.000	11.440.000	11.190.500	97,82%	100,00%	
					- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.1.02.01.01.0058	7.469.880	7.469.880	7.467.000	99,96%	100,00%	
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Penunjang	Penyediaan Jasa Peralatan	2.08.03.001	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy		37.461.600	37.461.600	37.421.910	99,89%	100,00%	
					- Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.1.02.02.04.0115	37.461.600	37.461.600	37.421.910	99,89%	100,00%	
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Penunjang	Penyediaan Jasa Pelayanan	2.08.04.001	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan		796.715.417	770.082.164	769.897.897	99,98%	100,00%	
					- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.1.02.02.01.0027	735.853.285	706.652.154	706.492.508	99,98%	100,00%	
					- Belanja Jasa Tenaga Caraka	5.1.02.02.01.0032	60.862.132	63.430.010	63.405.389	99,96%	100,00%	
21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik	Penyediaan Jasa	2.09.02.001	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus		2.311.100	2.311.100	1.815.700	78,56%	100,00%	
					- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.1.02.02.01.0067	2.311.100	2.311.100	1.815.700	78,56%	100,00%	
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik	Penyediaan Jasa	2.09.02.002	Pemeliharaan / Service Kendaraan Dinas Operasional		25.407.349	25.407.349	16.860.845	66,36%	100,00%	
					- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	5.1.02.01.01.0020	1.997.820	1.997.820	1.777.550	88,97%	100,00%	
					- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	5.1.02.03.02.0040	23.409.529	23.409.529	15.083.295	64,43%	100,00%	
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik	Pemeliharaan Peralatan dan	2.09.06.001	Pemeliharaan Komputer dan Printer Kerja		30.370.395	30.370.395	21.724.720	71,53%	100,00%	
					- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.1.02.03.02.0117	17.855.926	17.855.926	17.762.220	99,48%	100,00%	

MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
									Rp	%		
SUDIN JAKARTA PUSAT							119.980.205.112	117.858.719.618	115.842.811.109	98,29%	92,66%	
				2.09.06.002	Pemeliharaan Mesin Absensi						0,00%	
				2.09.06.003	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.1.02.03.02.0117	1.710.885	1.710.885	-	0,00%	0,00%	
					Pemeliharaan AC Ruangan						50,00%	
					Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.1.02.03.02.0121	10.803.584	10.803.584	3.962.500	36,68%	50,00%	

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	Nilai Kontrak	REALISASI ANGGARAN (SPI) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
										Rp	%		
SUDIN JAKARTA BARAT							71.966.463.845	68.233.011.441	67.453.124.530	67.595.568.077	99,07%	95,24%	
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Kembangan Utara	5.2.04.01.01.0010	2.749.526.636	2.749.526.636	2.548.907.010	2.548.907.010	92,70%	100,00%	
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pekojan	5.2.04.01.01.0010	3.891.273.661	3.859.622.000	3.859.622.000	3.859.622.000	100,00%	100,00%	
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Krukut	5.2.04.01.01.0010	3.988.056.325	3.779.973.025	3.779.973.025	3.754.943.571	99,34%	100,00%	
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Kalideres	5.2.04.01.01.0010	5.277.191.777	5.260.071.000	5.260.071.000	5.260.071.000	100,00%	100,00%	
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Palmerah	5.2.04.01.01.0010	2.749.526.636	2.742.380.500	2.742.380.500	2.742.380.500	100,00%	100,00%	
6	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Wijaya Kusuma	5.2.04.01.01.0010	6.296.314.008	6.264.089.000	6.264.089.000	6.264.089.000	100,00%	100,00%	
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Krendang	5.2.04.01.01.0010	3.218.329.872	3.212.668.050	3.212.668.050	3.212.668.050	100,00%	100,00%	
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Jembatan Lima	5.2.04.01.01.0010	2.346.101.631	2.285.230.602	2.285.230.602	2.285.230.602	100,00%	100,00%	
9	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Tangki	5.2.04.01.01.0010	2.313.840.743	2.303.966.348	2.303.966.348	2.303.966.348	100,00%	100,00%	
10	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Perbaikan Sarana, Prasarana dan Utilitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Administrasi Jakarta Barat	5.2.04.01.01.0010	36.998.939.649	33.564.383.232	33.205.599.500	33.380.420.000	99,45%	100,00%	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	5.1.02.01.01.0027	10.039.600	9.003.600	9.004.400	8.931.900	99,20%	100,00%	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja	5.1.02.01.01.0036	421.083.762	374.875.622	332.025.000	332.025.000	88,57%	100,00%	nilai realisasi sesuai dengan kontrak pada SPK ada jenis barang yang tidak bisa dibeli yaitu Printer Inkjet L 1800 sebanyak 50 buah dikarenakan barangnya sudah tidak ada dipasaran lagi.
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026	12.750.342	12.750.342	12.750.342	12.750.342	100,00%	100,00%	
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material		Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	5.1.02.01.01.0004	48.501.000	41.963.490	41.963.490	41.963.490	100,00%	100,00%	
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Penyediaan Makanan dan Minuman	5.1.02.01.01.0058	11.558.360	11.558.360	11.558.360	8.452.872	73,13%	100,00%	nilai realisasi sesuai dengan tagihan di e-order yang ada di TA.2022.
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy	5.1.02.02.04.0115	42.240.000	42.240.000	42.037.920	42.037.920	99,52%	100,00%	
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa dan Pengadaan Pelengkapan Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	5.1.02.02.01.0029	1.034.367.462	1.007.848.134	1.007.848.134	1.004.974.422	99,71%	100,00%	
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan		Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	5.1.02.02.01.0067	6.910.500	6.910.500	3.338.200	3.338.200	48,31%	100,00%	nilai realisasi sesuai dengan nominal tagihan perpanjangan STNK untuk 3 mobil KDO dan 3 motor KDO
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan		Pemeliharaan / Service Kendaraan Dinas Operasional	5.1.02.01.01.0020	52.992.679	46.082.179	46.082.179	45.344.300	98,40%	100,00%	
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.1.02.03.02.0117	32.677.920	32.677.920	32.677.920	32.120.000	98,29%	100,00%	
21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (RPTRA)	5.1.02.03.03.0001	464.241.282	464.241.282	451.331.550	451.331.550	97,22%	100,00%	

MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	Nilai Kontrak	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
										Rp	%		
SUDIN JAKARTA SELATAN							78.724.031.196	78.716.943.266	148.573.122.748	75.586.805.186	96,02%	100,00%	
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Jakarta Selatan	5.2.04.01.01.0010	31.599.421.416	31.599.421.416	30.879.368.100	30.879.368.100	97,72%	100,00%	
			Perencanaan				-	-	487.989.300	487.989.300	100,00%	100,00%	
			Saluran Air				-	-	22.025.111.000	22.025.111.000	100,00%	100,00%	
			Jalan Lingkungan				-	-	7.921.624.000	7.921.624.000	100,00%	100,00%	
			Pengawasan				-	-	444.643.800	444.643.800	100,00%	100,00%	
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Gandaria Utara	5.2.04.01.01.0010	11.173.333.172	11.173.333.172	10.794.098.704	10.824.573.754	96,88%	100,00%	
			Saluran Air				-	-	8.989.824.800	8.989.824.800	100,00%	100,00%	
			Jalan Lingkungan				-	-	1.589.294.654	1.589.294.654	100,00%	100,00%	Proses Melengkapi Dokumen Tagihan Pembayaran
			Pengawasan				-	-	214.979.250	214.979.250	100,00%	100,00%	
			Pengadaan APAR				-	-	30.475.050	30.475.050	100,00%	100,00%	
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	869.005.789	869.005.789	719.265.409	719.265.409	82,77%	100,00%	
			Swakelola tipe 4 (RW.02)				-	-	179.821.692	179.821.692	100,00%	100,00%	
			Swakelola tipe 4 (RW.03)				-	-	179.830.482	179.830.482	100,00%	100,00%	
			Swakelola tipe 4 (RW.08)				-	-	179.830.962	179.830.962	100,00%	100,00%	
			Swakelola tipe 4 (RW.011)				-	-	179.782.273	179.782.273	100,00%	100,00%	
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pela Mampang	5.2.04.01.01.0010	8.397.415.016	8.397.415.016	8.390.132.013	8.390.132.013	99,91%	100,00%	
			Saluran Air				-	-	6.572.521.300	6.572.521.300	100,00%	100,00%	
			Jalan Lingkungan				-	-	1.096.177.000	1.096.177.000	100,00%	100,00%	
			Pengawasan				-	-	151.515.000	151.515.000	100,00%	100,00%	
			Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan				-	-	208.000.000	208.000.000	100,00%	100,00%	
			Pengadaan Armature LED Smart System 40 Watt				-	-	176.290.816	176.290.816	100,00%	100,00%	
			Pekerjaan Konstruksi Cermin Tikungan pada Jalan Lingkungan				-	-	82.628.000	82.628.000	100,00%	100,00%	
			Tempat Sampah Beroda				-	-	102.999.897	102.999.897	100,00%	100,00%	
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	651.754.342	651.754.342	537.256.345	537.256.345	82,43%	100,00%	
			Swakelola tipe 4 (RW.10)				-	-	178.699.231	178.699.231	100,00%	100,00%	
			Swakelola tipe 4 (RW.11)				-	-	179.086.425	179.086.425	100,00%	100,00%	
			Swakelola tipe 4 (RW.12)				-	-	179.470.689	179.470.689	100,00%	100,00%	
6	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Manggarai	5.2.04.01.01.0010	11.173.333.172	11.173.333.172	10.298.403.661	10.298.403.661	92,17%	100,00%	
			Saluran Air				-	-	7.531.003.275	7.531.003.275	100,00%	100,00%	
			Jalan Lingkungan				-	-	917.906.000	917.906.000	100,00%	100,00%	
			Pengawasan				-	-	97.729.950	97.729.950	100,00%	100,00%	
			Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan				-	-	482.500.000	482.500.000	100,00%	100,00%	
			Pengadaan Armature LED Smart System 40 Watt				-	-	637.359.104	637.359.104	100,00%	100,00%	
			Pekerjaan Konstruksi Cermin Tikungan pada Jalan Lingkungan				-	-	59.020.000	59.020.000	100,00%	100,00%	

MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	Nilai Kontrak	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
										Rp	%		
SUDIN JAKARTA SELATAN							78.724.031.196	78.716.943.266	148.573.122.748	75.586.805.186	96,02%	100,00%	
					Tempat Sampah Beroda		-	-	69.999.930	69.999.930	100,00%	100,00%	
					Pengadaan APAR		-	-	71.375.775	71.375.775	100,00%	100,00%	
					Vertical Garden		-	-	197.509.627	197.509.627	100,00%	100,00%	
					Gapura		-	-	234.000.000	234.000.000	100,00%	100,00%	
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	869.005.789	869.005.789	719.421.405	719.421.405	82,79%	100,00%	
					Swakelola tipe 4 (RW.03)		-	-	179.458.146	179.458.146	100,00%	100,00%	
					Swakelola tipe 4 (RW.04)		-	-	180.787.716	180.787.716	100,00%	100,00%	
					Swakelola tipe 4 (RW.06)		-	-	180.129.736	180.129.736	100,00%	100,00%	
					Swakelola tipe 4 (RW.07)		-	-	179.045.807	179.045.807	100,00%	100,00%	
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Menteng Atas	5.2.04.01.01.0010	2.825.059.667	2.825.059.667	2.690.009.462	2.690.009.462	32,03%	100,00%	
					Saluran Air		-	-	2.178.481.800	2.178.481.800	100,00%	100,00%	
					Jalan Lingkungan		-	-	186.850.740	186.850.740	100,00%	100,00%	
					Pengawasan		-	-	86.935.200	86.935.200	100,00%	100,00%	
					Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan		-	-	16.000.000	16.000.000	100,00%	100,00%	
					Pengadaan Armature LED Smart System 40 Watt		-	-	13.560.832	13.560.832	100,00%	100,00%	
					Pekerjaan Konstruksi Cermin Tikungan pada Jalan Lingkungan		-	-	17.706.000	17.706.000	100,00%	100,00%	
					Tempat Sampah Beroda		-	-	159.999.840	159.999.840	100,00%	100,00%	
					Pengadaan APAR		-	-	30.475.050	30.475.050	100,00%	100,00%	
9	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	217.251.447	217.251.447	179.833.829	179.833.829	82,78%	100,00%	
					Swakelola tipe 4 (RW.05)		-	-	179.833.829	179.833.829	100,00%	100,00%	
10	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pasar Manggis	5.2.04.01.01.0010	5.617.883.492	5.617.883.492	5.380.441.290	5.380.441.290	95,77%	100,00%	
					Saluran Air		-	-	4.594.430.400	4.594.430.400	100,00%	100,00%	
					Jalan Lingkungan		-	-	555.684.169	555.684.169	100,00%	100,00%	
					Pengawasan		-	-	97.729.950	97.729.950	100,00%	100,00%	
					Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan		-	-	48.000.000	48.000.000	100,00%	100,00%	
					Pengadaan Armature LED Smart System 40 Watt		-	-	40.682.496	40.682.496	100,00%	100,00%	
					Pekerjaan Konstruksi Cermin Tikungan pada Jalan Lingkungan		-	-	20.657.000	20.657.000	100,00%	100,00%	
					Pengadaan APAR		-	-	23.257.275	23.257.275	100,00%	100,00%	
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	434.502.894	434.502.894	352.962.046	352.962.046	81,23%	100,00%	
					Swakelola tipe 4 (RW.02)		-	-	179.735.689	179.735.689	100,00%	100,00%	
					Swakelola tipe 4 (RW.03)		-	-	173.226.357	173.226.357	100,00%	100,00%	
11	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lanjutan)	5.2.04.01.01.0010	3.468.939.177	3.468.939.177	3.258.247.025	3.258.247.025	93,93%	100,00%	
					Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan		-	-	598.100.000	598.100.000	100,00%	100,00%	
					Pengadaan Armature LED Smart System 40 Watt		-	-	718.724.096	718.724.096	100,00%	100,00%	

MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	Nilai Kontrak	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
										Rp	%		
SUDIN JAKARTA SELATAN							78.724.031.196	78.716.943.266	148.573.122.748	75.586.805.186	96,02%	100,00%	
					Pekerjaan Konstruksi Cermin Tikungan pada Jalan Lingkungan		-	-	106.236.000	106.236.000	100,00%	100,00%	
					Pekerjaan Konstruksi Gapura dan Papan Nama Jalan		-	-	568.338.000	568.338.000	100,00%	100,00%	
					Jasa Konsultasi Pengawasan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas (Lanjutan)		-	-	97.735.500	97.735.500	100,00%	100,00%	
					Tempat Sampah Beroda		-	-	224.617.491	224.617.491	100,00%	100,00%	
					Pengadaan APAR		-	-	198.889.800	198.889.800	100,00%	100,00%	
					Vertical Garden		-	-	745.606.138	745.606.138	100,00%	100,00%	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	5.1.02.01.01.0027	3.200.000	3.200.000	-	3.200.000	100,00%	100,00%	
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja		230.587.293	230.587.293	-	221.191.053	95,93%	100,00%	
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026	2.881.846	2.881.846	-	2.863.800	99,37%	100,00%	
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material		Penyediaan BBM KDO/ KDO Khusus	5.1.02.01.01.0004	143.769.120	143.769.120	143.769.120	125.000.000	86,94%	100,00%	
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Facilitasi Kunjungan Tamu		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.1.02.01.01.0058	8.522.580	8.522.580	-	8.521.000	99,98%	100,00%	
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Facilitasi Kunjungan Tamu		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.1.02.01.01.0052	42.900.000	42.900.000	-	36.845.000	85,89%	100,00%	
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.1.02.02.04.0115	42.240.000	42.240.000	-	36.000.000	85,23%	100,00%	
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.1.02.02.01.0029	543.540.834	521.300.754	-	521.283.684	100,00%	100,00%	
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.1.02.02.01.0027	120.799.160	126.860.020	-	126.747.306	99,91%	100,00%	
21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.02.02.01.0026	181.198.740	190.290.030	-	189.750.296	99,72%	100,00%	
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	5.1.02.02.01.0067	2.340.000	2.340.000	-	1.705.500	72,88%	100,00%	
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan/ Service Kendaraan Dinas Operasional	5.1.02.03.02.0040	64.226.008	64.226.008	-	51.442.248	80,10%	100,00%	
24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	5.1.02.03.02.0117	40.920.242	40.920.242	-	32.340.960	79,03%	100,00%	

MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	Nilai Kontrak	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
										Rp	%		
SUDIN JAKARTA UTARA							146.947.117.496	144.637.640.250	125.949.842.454	139.891.583.881	96,72%	96,46%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	001	Belanja Modal Personal Computer	5.2.02.10.01.0002	125.143.040	125.143.040	125.138.000	125.138.000	100,00%	100,00%	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.1.02.01.01.0027	3.300.000	3.300.000	-	3.250.000	98,48%	100,00%	
					Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.1.02.01.01.0012	3.755.576	3.755.576	-	3.689.976	98,25%	100,00%	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	194.010.960	194.010.960	193.224.360	193.224.360	99,59%	100,00%	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.1.02.01.01.0026	12.773.640	12.773.640	-	12.742.800	99,76%	100,00%	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	001	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.1.02.01.01.0004	1.153.000	1.153.000	-	1.153.000	100,00%	100,00%	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	003	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.1.02.01.01.0043	1.535.424	1.535.424	-	1.494.000	97,30%	100,00%	
					Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	5.1.02.01.01.0058	14.447.400	14.447.400	-	6.396.800	44,28%	34,61%	Pada diawal Tahun masih penerapan WFH WFO Karyawan Sehingga konsumsi air minum berkurang
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.1.02.01.01.0052	29.700.000	29.700.000	-	29.608.500	99,69%	100,00%	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	001	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.1.02.02.01.0063	27.405.600	27.405.600	-	21.266.500	77,60%	100,00%	Harga di Lapangan lebih Rendah dibanding dengan yang tertera di DPA
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	002	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.1.02.02.04.0115	37.461.600	37.461.600	-	37.212.000	99,33%	100,00%	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	001	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.1.02.02.01.0027	60.862.132	63.430.010	-	63.045.511	99,39%	100,00%	
					Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.02.02.01.0026	60.862.132	63.430.010	-	62.724.060	98,89%	100,00%	
					Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.1.02.02.01.0029	566.581.972	544.469.694	-	540.041.230	99,19%	100,00%	
					Belanja Jasa Tenaga Caraka	5.1.02.02.01.0032	60.862.132	63.430.010	-	62.496.677	98,53%	100,00%	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	001	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.1.02.03.02.0121	1.012.836	1.012.836	-	1.012.836	100,00%	100,00%	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	001	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	5.1.02.01.01.0020	1.319.670	1.319.670	-	1.029.000	77,97%	100,00%	
					Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya	5.1.02.01.01.0023	7.150.000	7.150.000	-	2.275.633	31,83%	100,00%	
					Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.1.02.03.02.0038	3.421.770	3.421.770	-	2.334.463	68,22%	100,00%	
					Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	5.1.02.03.02.0040	2.737.416	2.737.416	-	2.678.301	97,84%	100,00%	
				004	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	5.1.02.01.01.0067	2.525.050	2.525.050	-	2.163.800	85,69%	100,00%	
										1.174.977.447			
10	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Sukapura		24.565.738.131	24.565.738.131	-	23.930.546.286	97,41%	100,00%	
					Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan Sukapura	5.2.04.01.01.0010			7.082.755.430	7.082.755.430	100,00%	100,00%	
					Peningkatan Saluran Lingkungan di Kelurahan Sukapura	5.2.04.02.01.0008			15.520.666.000	15.381.385.356	99,10%	100,00%	
					Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.03.01.01.0001			600.281.100	600.281.100	100,00%	100,00%	
					Belanja Modal Taman	5.2.03.01.01.0036			720.594.400	720.594.400	100,00%	100,00%	
					Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.2.02.05.02.0007		145.530.000	145.530.000	145.530.000	100,00%	100,00%	
11	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Administrasi Jakarta Utara		46.736.441.782	46.736.441.782	-	45.301.258.075	96,93%	93,88%	
					Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Administrasi Jakarta Utara	5.2.04.01.01.0010			-	13.144.451.250	100,00%	85,45%	
					Peningkatan Saluran Lingkungan Kawasan Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Administrasi Jakarta Utara	5.2.04.02.01.0008			-	32.348.898.000	99,41%	97,30%	
12	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Kelapa Gading Barat (Lanjutan)		5.508.842.770	5.508.842.770	-	5.294.236.494	96,10%	100,00%	
					Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan Kelapa Gading Barat	5.2.04.01.01.0010			-	2.381.834.450	100,00%	100,00%	
					Peningkatan Saluran Lingkungan di Kelurahan Kelapa Gading Barat	5.2.04.02.01.0008			-	2.540.349.244	98,33%	100,00%	
					Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.03.01.01.0001			-	163.290.800	100,00%		
					Belanja Modal Taman	5.2.03.01.01.0036			-	163.892.000	100,00%		

MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	Nilai Kontrak	REALISASI ANGGARAN (SPI) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
										Rp	%		
SUDIN JAKARTA UTARA							146.947.117.496	144.637.640.250	125.949.842.454	139.891.583.881	96,72%	96,46%	
					Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.2.02.05.02.0007			44.870.000	44.870.000	100,00%		
13	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Semper Timur		10.025.070.286	10.025.070.286	-	9.821.476.405	97,97%	96,14%	
					Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan Semper Timur	5.2.04.01.01.0010		-	2.749.197.000	2.749.197.000	100,00%	97,68%	
					Peningkatan Saluran Lingkungan di Kelurahan Semper Timur	5.2.04.02.01.0008		-	6.472.626.000	6.410.631.505	99,04%	95,48%	
					Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.03.01.01.0001			227.751.100	227.751.100	100,00%		
					Belanja Modal Taman	5.2.03.01.01.0036			383.776.800	383.776.800	100,00%		
					Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.2.02.05.02.0007			50.120.000	50.120.000	100,00%		
14	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Kamal Muara (Lanjutan)		4.219.426.793	4.219.426.793	-	4.177.566.210	99,01%	92,61%	
					Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan Kamal Muara	5.2.04.01.01.0010		-	1.728.147.950	1.728.147.950	100,00%	83,38%	
					Peningkatan Saluran Lingkungan di Kelurahan Kamal Muara	5.2.04.02.01.0008			2.160.194.000	2.131.196.360	98,66%	100,00%	
					Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.03.01.01.0001	141.047.238		140.281.900	140.281.900			
					Belanja Modal Taman	5.2.03.01.01.0036			155.590.000	155.890.000			
					Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.2.02.05.02.0007			22.050.000	22.050.000			
15	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Rawa Badak Selatan (Lanjutan)		10.151.936.726	10.151.936.726	-	9.493.219.159	93,51%	88,45%	
					Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan Rawa Badak Selatan	5.2.04.01.01.0010			3.659.475.500	3.648.523.500	99,70%	88,80%	
					Peningkatan Saluran Lingkungan di Kelurahan Rawa Badak Selatan	5.2.04.02.01.0008			5.177.475.000	5.118.998.759	98,87%	88,20%	
					Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.03.01.01.0001	998.700.815		491.023.900	491.023.900			
					Belanja Modal Taman	5.2.03.01.01.0036			195.053.000	195.053.000			
					Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.2.02.05.02.0007			39.620.000	39.620.000			
16	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Tugu Selatan (Lanjutan)		10.961.040.689	10.961.040.689	-	10.831.293.996	98,82%	94,12%	
					Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan Tugu Selatan	5.2.04.01.01.0010			4.296.949.796	4.296.949.796	100,00%	91,87%	
					Peningkatan Saluran Lingkungan di Kelurahan Tugu Selatan	5.2.04.02.01.0008			6.134.805.000	6.068.605.000	98,92%	95,69%	
					Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.03.01.01.0001	234.027.169		233.575.200	233.575.200			
					Belanja Modal Taman	5.2.03.01.01.0036			194.784.000	194.784.000			
					Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.2.02.05.02.0007			37.380.000	37.380.000			
17	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pademangan Barat (Lanjutan)		4.431.922.684	4.431.922.684	-	4.188.634.505	94,51%	100,00%	
					Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan Pademangan Barat	5.2.04.01.01.0010			1.753.277.950	1.753.277.950	100,00%	100,00%	
					Peningkatan Saluran Lingkungan di Kelurahan Pademangan Barat	5.2.04.02.01.0008			1.713.442.000	1.688.595.755	98,55%	100,00%	
					Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.03.01.01.0001	691.023.658		688.800.800	688.800.800			
					Belanja Modal Taman	5.2.03.01.01.0036			-	-			
					Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.2.02.05.02.0007			57.960.000	57.960.000			
18	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Cilincing (Lanjutan)		12.042.126.184	12.042.126.184	-	11.960.838.768	99,32%	98,86%	
					Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan Cilincing	5.2.04.01.01.0010			3.187.070.499	3.187.070.499	100,00%	96,68%	
					Peningkatan Saluran Lingkungan di Kelurahan Cilincing	5.2.04.02.01.0008			8.320.890.569	8.314.178.569	99,92%	99,69%	
					Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.03.01.01.0001	230.269.722	227.669.700	227.669.700	227.669.700			
					Belanja Modal Taman	5.2.03.01.01.0036		194.890.000	194.890.000	194.890.000			
					Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.2.02.05.02.0007		37.030.000	37.030.000	37.030.000			
19	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Tanjung Priok (Lanjutan)		14.791.481.499	14.791.481.499	-	11.839.432.214	80,04%	81,44%	
					Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan Tanjung Priok	5.2.04.01.01.0010			3.147.436.000	1.955.831.000	62,14%	78,54%	
					Peningkatan Saluran Lingkungan di Kelurahan Tanjung Priok	5.2.04.02.01.0008			9.270.708.000	9.224.099.234	99,50%	82,42%	
					Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.03.01.01.0001	708.022.926		694.202.200	624.781.980	90,00%	82,42%	
					Belanja Modal Taman	5.2.03.01.01.0036			194.890.000	-			

MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	Nilai Kontrak	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
										Rp	%		
	SUDIN JAKARTA UTARA						146.947.117.496	144.637.640.250	125.949.842.454	139.891.583.881	96,72%	96,46%	
					Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.2.02.05.02.0007			34.720.000	34.720.000			

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	Nilai Kontrak	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
										Rp	%		
SUDIN JAKARTA TIMUR							70.365.916.011	67.062.162.941	64.744.404.537	64.078.444.047	95,55%	100,00%	
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pondok Bambu		3.702.827.847	3.702.827.847	3.439.732.950	3.433.518.644	92,73%	100,00%	kegiatan selesai
					Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	175.469.499	175.469.499	167.508.100	167.508.000	95,46%	100,00%	kegiatan selesai
					Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	3.527.358.348	3.527.358.348	3.272.224.850	3.266.010.644	92,59%	100,00%	kegiatan selesai
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Duren Sawit		7.246.255.828	6.372.923.570	6.316.862.150	6.243.407.850	97,97%	100,00%	kegiatan selesai
					Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	350.984.957	334.961.933	334.959.100	334.958.800	100,00%	100,00%	kegiatan selesai
					Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	6.895.270.871	6.037.961.637	5.981.903.050	5.908.449.050	97,86%	100,00%	kegiatan selesai
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Jatinegara		3.078.358.872	3.078.358.872	2.749.411.450	2.672.081.099	86,80%	100,00%	kegiatan selesai
					Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	175.736.602	175.736.602	167.900.600	167.900.400	95,44%	100,00%	kegiatan selesai
					Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	2.902.622.270	2.902.622.270	2.581.510.850	2.504.180.699	86,27%	100,00%	kegiatan selesai
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Rawa Terate		12.517.278.323	11.221.321.898	10.690.292.250	10.378.431.092	92,49%	100,00%	kegiatan selesai
					Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	753.759.539	745.399.539	728.756.000	728.755.400	97,77%	100,00%	kegiatan selesai
					Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	11.763.518.784	10.475.922.359	9.961.536.250	9.649.675.692	92,11%	100,00%	kegiatan selesai
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pulo Gadung		1.183.243.225	1.183.243.225	1.038.875.000	1.030.250.129	87,07%	100,00%	kegiatan selesai
					Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	175.542.766	175.542.766	168.038.900	168.038.600	95,73%	100,00%	kegiatan selesai
					Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	1.007.700.459	1.007.700.459	870.836.100	862.211.529	85,56%	100,00%	kegiatan selesai
6	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Perbaikan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Administrasi Jakarta Timur		34.323.483.089	34.255.341.288	33.989.593.232	33.892.046.452	98,94%	100,00%	kegiatan selesai
					Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	34.024.213.076	33.956.071.275	33.729.831.250	33.638.769.333	99,07%	100,00%	kegiatan selesai
					Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor	5.1.02.03.03.0001	299.270.013	299.270.013	259.761.982	253.277.119	84,63%	100,00%	kegiatan selesai
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Rawamangun (Lanjutan)		3.171.662.539	2.216.989.515	1.659.066.335	1.609.269.435	72,59%	100,00%	kegiatan selesai
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Cakung Barat (Lanjutan)		3.129.682.896	3.129.682.896	2.983.042.097	2.980.140.138	95,22%	100,00%	kegiatan selesai
9	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur	5.1.02.02.01.0029	36.960.000	36.960.000	36.960.000	19.600.000	53,03%	100,00%	Sesuai dengan Tagihan Tenaga Ahli
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		5.999.950	5.990.000	5.990.000	5.990.000	100,00%	100,00%	kegiatan selesai
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.1.02.01.01.0027	3.300.000	5.990.000	5.990.000	5.990.000	100,00%	100,00%	kegiatan selesai
					Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.1.02.02.01.0042	2.699.950			-			anggaran dihapus
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	99.924.677	99.924.677	98.844.113	98.844.113	98,92%	100,00%	kegiatan selesai
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		250.984.580	148.399.570	139.912.250	138.815.000	93,54%	100,00%	kegiatan selesai	
				Belanja Modal Personal Computer	5.2.02.10.01.0002	179.196.600	137.316.520	128.840.000	128.840.000	93,83%	100,00%	kegiatan selesai	
				Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.2.02.10.01.0005	43.571.000	0					anggaran dihapus	
				Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.1.02.01.01.0063	11.083.050	11.083.050	11.072.250	9.975.000	90,00%	100,00%	kegiatan selesai	
12					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.1.02.01.01.0036	17.133.930	0		-			anggaran dihapus
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026	45.681.372	45.681.372	42.185.550	42.185.550	92,35%	100,00%	kegiatan selesai
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material		Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	5.1.02.01.01.0004	139.997.880	139.997.880	139.997.880	139.997.880	100,00%	100,00%	kegiatan selesai
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Kunjungan Tamu		Penyediaan Makanan dan Minuman		61.216.320	61.216.320	61.216.320	57.057.200	93,21%	100,00%	kegiatan selesai
					Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.1.02.01.01.0058	18.316.320	18.316.320	16.651.200	16.651.200	90,91%	100,00%	kegiatan selesai
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.1.02.01.01.0052	42.900.000	42.900.000	44.565.120	40.406.000	94,19%	100,00%	kegiatan selesai

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD - P TA.2022 (Rp)	Nilai Kontrak	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
										Rp	%		
SUDIN JAKARTA TIMUR							70.365.916.011	67.062.162.941	64.744.404.537	64.078.444.047	95,55%	100,00%	
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy	5.1.02.02.04.0115	42.240.000	42.240.000	42.240.000	42.240.000	100,00%	100,00%	kegiatan selesai
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan		1.213.504.068	1.204.449.466	1.204.449.466	1.188.835.971	98,70%	100,00%	kegiatan selesai
					Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.02.02.01.0026	113.511.216	127.584.148		124.799.032	97,82%	100,00%	kegiatan selesai
					Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.1.02.02.01.0027	921.263.548	885.489.096		873.675.205	98,67%	100,00%	kegiatan selesai
					Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.1.02.02.01.0028	60.986.848	63.792.074		63.590.417	99,68%	100,00%	kegiatan selesai
					Belanja Jasa Tenaga Caraka	5.1.02.02.01.0032	61.209.544	63.792.074		63.116.948	98,94%	100,00%	kegiatan selesai
					Belanja Jasa Tenaga Supir	5.1.02.02.01.0033	56.532.912	63.792.074		63.654.369	99,78%	100,00%	kegiatan selesai
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	5.1.02.02.01.0067	10.950.800	10.950.800	4.652.900	4.652.900	42,49%	100,00%	kegiatan selesai
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan		Pemeliharaan / Service Kendaraan Dinas Operasional	5.1.02.03.02.0040	72.322.030	72.322.030	67.738.879	67.738.879	93,66%	100,00%	kegiatan selesai
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	5.1.02.03.02.0117	33.341.715	33.341.715	33.341.715	33.341.715	100,00%	100,00%	kegiatan selesai

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	Nilai Kontrak	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
										Rp	%		
SUDIN KEPULAUAN SERIBU							14.822.543.068	6.300.490.036	5.888.638.968	5.843.666.164	92,75%	100,00%	
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pulau Kelapa		7.904.196.174	1.080.717.044	960.115.931	960.115.931	100,00%	100,00%	
					Swakelola Tipe IV		348.941.068	320.800.868	209.626.476	209.626.476	100,00%	100,00%	
					Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.1.02.02.01.0004	15.840.000	15.840.000	13.897.128	13.897.128	100,00%	100,00%	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
					Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	5.1.02.02.04.0048	28.140.200	-	-	-	-	-	
					Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	5.1.02.02.04.0049	11.406.120	11.406.120	1.284.000	1.284.000	100,00%	100,00%	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
					Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	5.1.02.02.05.0041	11.695.200	11.695.200	6.162.500	6.162.500	100,00%	100,00%	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
					Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	281.859.548	281.859.548	188.282.848	188.282.848	100,00%	100,00%	Realisasi sesuai dengan nilai adendum kontrak
					Pembangunan Fasilitas Umum di Kelurahan Pulau Kelapa - Jasa Konstruksi		1.057.903.750	660.307.183	653.292.305	653.292.305	100,00%	100,00%	
					Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	5.1.02.03.04.0010	65.107.376	50.286.641	50.238.805	50.238.805	100,00%	100,00%	Realisasi sesuai dengan nilai adendum kontrak
					Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	5.2.03.01.01.0032	633.442.619	370.423.285	364.207.815	364.207.815	100,00%	100,00%	Realisasi sesuai dengan nilai adendum kontrak
					Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	359.353.755	239.597.257	238.845.685	238.845.685	100,00%	100,00%	Realisasi sesuai dengan nilai adendum kontrak
					Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pulau Siput - Jasa Konstruksi		3.553.434.225	-	-	-	-	-	
					Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	5.1.02.02.04.0048	365.822.600	-	-	-	-	-	
					Belanja Modal Taman	5.2.03.01.01.0036	3.187.611.625	-	-	-	-	-	
					Pembangunan Balai Warga Pulau Kelapa Dua - Jasa Konstruksi		2.471.229.234	-	-	-	-	-	
					Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	5.2.03.01.01.0032	2.471.229.234	-	-	-	-	-	
					Pembangunan Fasilitas Umum di Kelurahan Pulau Kelapa - Jasa Konsultansi Pengawasan		99.608.993	99.608.993	97.197.150	97.197.150	100,00%	100,00%	
					Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	99.608.993	99.608.993	97.197.150	97.197.150	100,00%	100,00%	Realisasi sesuai dengan nilai adendum kontrak
					Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pulau Siput - Jasa Konsultansi Pengawasan		207.724.605	-	-	-	-	-	
					Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	5.1.02.02.04.0049	2.281.224	-	-	-	-	-	
					Belanja Modal Taman	5.2.03.01.01.0036	205.443.381	-	-	-	-	-	
					Pembangunan Balai Warga Pulau Kelapa Dua - Jasa Konsultansi Pengawasan		165.354.299	-	-	-	-	-	
					Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	5.1.02.02.04.0049	1.710.918	-	-	-	-	-	
					Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	5.2.03.01.01.0032	163.643.381	-	-	-	-	-	
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pulau Pari		2.789.110.509	2.257.495.148	2.192.099.917	2.192.099.917	100,00%	100,00%	
					Jasa Konstruksi		2.453.083.038	1.929.330.226	1.919.376.823	1.919.376.823	100,00%	100,00%	
					Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	5.2.03.01.01.0032	743.391.089	627.620.098	621.367.255	621.367.255	100,00%	100,00%	
					Belanja Modal Taman	5.2.03.01.01.0036	1.241.609.624	1.047.588.404	1.043.983.517	1.043.983.517	100,00%	100,00%	
					Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	468.082.325	254.121.724	254.026.051	254.026.051	100,00%	100,00%	
					Jasa Konsultansi Pengawasan		165.354.299	157.491.750	157.491.750	157.491.750	100,00%	100,00%	
					Belanja Modal Jalan Lainnya	5.2.04.01.01.0010	165.354.299	157.491.750	157.491.750	157.491.750	100,00%	100,00%	
					Swakelola Tipe IV		170.673.172	170.673.172	115.231.344	115.231.344	100,00%	100,00%	
					Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.1.02.02.01.0004	7.200.000	7.200.000	6.948.564	6.948.564	100,00%	100,00%	
					Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	5.1.02.02.04.0048	14.070.100	14.070.100	-	-	-	-	Telah terakomodir dalam kode rekening belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat
					Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	5.1.02.02.04.0049	5.703.060	5.703.060	504.000	504.000	100,00%	100,00%	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
					Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	5.1.02.02.05.0041	4.678.080	4.678.080	2.082.500	2.082.500	100,00%	100,00%	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	Nilai Kontrak	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
										Rp	%		
SUDIN KEPULAUAN SERIBU							14.822.543.068	6.300.490.036	5.888.638.968	5.843.666.164	92,75%	100,00%	
					Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002	139.021.932	139.021.932	105.696.280	105.696.280	100,00%	100,00%	Realisasi sesuai dengan nilai adendum kontrak
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Pemeliharaan Gazebo di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		358.475.362	358.475.362	298.213.999	298.213.999	100,00%	100,00%	
					Jasa Konstruksi		333.136.092	333.136.092	274.308.999	274.308.999	100,00%	100,00%	
					Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	5.1.02.02.04.0048	42.210.300	42.210.300	12.601.463	12.601.463	100,00%	100,00%	Realisasi sesuai dengan nilai adendum kontrak
					Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.1.02.03.03.0001	290.925.792	290.925.792	261.707.536	261.707.536	100,00%	100,00%	Realisasi sesuai dengan nilai adendum kontrak
					Jasa Konsultansi Pengawasan		25.339.270	25.339.270	23.905.000	23.905.000	100,00%	100,00%	
					Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	5.1.02.02.08.0019	25.339.270	25.339.270	23.905.000	23.905.000	100,00%	100,00%	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Pembangunan Gapura di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		405.122.466	310.177.423	310.177.423	310.177.423	100,00%	100,00%	
					Jasa Konstruksi		342.328.141	279.281.023	279.281.023	279.281.023	100,00%	100,00%	
					Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	5.1.02.02.04.0048	28.140.200	25.679.727	25.679.727	25.679.727	100,00%	100,00%	
					Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	5.2.03.01.01.0032	314.187.941	253.601.296	253.601.296	253.601.296	100,00%	100,00%	
					Jasa Konsultansi Pengawasan		34.665.345	30.896.400	30.896.400	30.896.400	100,00%	100,00%	
					Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	5.1.02.02.04.0049	570.306	466.200	466.200	466.200	100,00%	100,00%	
					Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	5.2.03.01.01.0032	34.095.039	30.430.200	30.430.200	30.430.200	100,00%	100,00%	
					Jasa Konsultansi Perencanaan		28.128.980	-	-	-	-	-	
					Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	5.1.02.02.04.0049	1.140.612	-	-	-	-	-	Tidak digunakan karena yang awalnya dilaksanakan oleh pihak ketiga dilakukan secara internal
					Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	5.2.03.01.01.0032	26.988.368	-	-	-	-	-	Tidak digunakan karena yang awalnya dilaksanakan oleh pihak ketiga dilakukan secara internal
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Pembangunan Gazebo di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		999.963.239	999.963.239	875.494.126	875.494.126	100,00%	100,00%	
					Jasa Konstruksi		916.648.304	916.648.304	802.200.826	802.200.826	100,00%	100,00%	
					Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	5.2.03.01.01.0032	916.648.304	916.648.304	802.200.826	802.200.826	100,00%	100,00%	Realisasi sesuai dengan nilai adendum kontrak
					Jasa Konsultansi Pengawasan		83.314.935	83.314.935	73.293.300	73.293.300	100,00%	100,00%	
					Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	5.1.02.02.04.0049	9.124.896	9.124.896	832.500	832.500	100,00%	100,00%	Realisasi sesuai dengan nilai kontrak
					Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	5.2.03.01.01.0032	74.190.039	74.190.039	72.460.800	72.460.800	100,00%	100,00%	Realisasi sesuai dengan nilai adendum kontrak
6	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		749.992.685	-	-	-	-	-	
					Jasa Konstruksi		694.592.329	-	-	-	-	-	
					Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.1.02.03.03.0001	694.592.329	-	-	-	-	-	
					Jasa Konsultansi Pengawasan		55.400.356	-	-	-	-	-	
					Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	5.1.02.02.08.0019	55.400.356	-	-	-	-	-	
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Pemeliharaan MCK di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		59.908.973	59.908.973	58.511.200	58.511.200	100,00%	100,00%	
					Jasa Konstruksi		59.908.973	59.908.973	58.511.200	58.511.200	100,00%	100,00%	
					Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.1.02.03.03.0001	59.908.973	59.908.973	58.511.200	58.511.200	100,00%	100,00%	Realisasi sesuai dengan nilai kontrak

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	Nilai Kontrak	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
										Rp	%		
SUDIN KEPULAUAN SERIBU							14.822.543.068	6.300.490.036	5.888.638.968	5.843.666.164	92,75%	100,00%	
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Penyusunan DED Bangunan Lepas Pantai dilokasi Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pulau Siput		372.265.938	303.185.127	303.185.127	242.548.100	80,00%	100,00%	Sisa nilai kontrak untuk biaya pengawasan berkala yang akan dibayarkan saat konstruksi
					Biaya Personil		277.662.000	167.476.800	167.476.800	133.981.440			
					Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	5.2.04.02.04.0005	277.662.000	167.476.800	167.476.800	133.981.440			
					Penyelidikan Tanah		78.599.928	53.701.800	53.701.800	42.961.440			
					Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	5.2.04.02.04.0005	78.599.928	53.701.800	53.701.800	42.961.440			
					laporan		8.607.995	44.599.527	44.599.527	35.679.622			
					Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	5.2.04.02.04.0005	8.607.995	44.599.527	44.599.527	35.679.622			
					Akomodasi		7.396.015	37.407.000	37.407.000	29.925.600			
					Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	5.2.04.02.04.0006	7.396.015	37.407.000	37.407.000	29.925.600			
9	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan RTH Pulau Siput		236.636.191	-	-	-	-	-	
					Biaya Personil		216.645.000	-	-	-	-	-	
					Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	5.2.04.02.04.0005	216.645.000	-	-	-	-	-	
					Penyelidikan Tanah		4.460.940	-	-	-	-	-	
					Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	5.2.04.02.04.0005	4.460.940	-	-	-	-	-	
					Laporan		7.849.083	-	-	-	-	-	
					Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	5.2.04.02.04.0005	7.849.083	-	-	-	-	-	
					Akomodasi		7.681.168	-	-	-	-	-	
					Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	5.2.04.02.04.0005	7.681.168	-	-	-	-	-	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.04.01.1.06.02	Penyediaan Alat Tulis Kantor		55.794.298	55.794.298	55.100.400	55.100.400	100,00%	100,00%	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	55.794.298	55.794.298	55.100.400	55.100.400	100,00%	100,00%	Realisasi sesuai dengan nilai kontrak
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		0	7.389.228	7.378.750	7.378.750	99,86%	100,00%	
					Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.1.02.02.04.0115	0	7.389.228	7.378.750	7.378.750	99,86%	100,00%	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	1.04.01.1.06.07	Penyediaan BBM KDO / KDO Khusus		9.237.587	9.237.587	9.237.587	9.237.587	100,00%	100,00%	
					Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.1.02.01.01.0004	9.237.587	9.237.587	9.237.587	9.237.587	100,00%	100,00%	
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.04.01.1.06.08	Penyediaan Makanan dan Minuman		29.125.272	29.125.272	29.043.200	29.043.200	99,72%	100,00%	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.1.02.01.01.0052	21.450.000	21.450.000	21.379.000	21.379.000	99,67%	100,00%	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
					Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.1.02.01.01.0058	7.675.272	7.675.272	7.664.200	7.664.200	99,86%	100,00%	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.04.01.1.06.09	Penyediaan Jasa Transportasi Perairan		238.579.253	238.579.253	237.097.000	237.097.000	99,38%	100,00%	
					Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	5.1.02.02.04.0049	222.985.653	222.985.653	222.717.000	222.717.000	99,88%	100,00%	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
					Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	5.1.02.02.05.0041	15.593.600	15.593.600	14.380.000	14.380.000	92,22%	100,00%	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)		9.512.580	9.512.580	8.200.877	8.200.877	86,21%	100,00%	
					Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.1.02.02.01.0063	9.512.580	9.512.580	8.200.877	8.200.877	86,21%	100,00%	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.04.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		130.528.626	121.309.000	109.942.600	109.942.600	90,63%	100,00%	
					Belanja Modal Mebel	5.2.02.05.02.0001	3.758.480	-	-	-	-	-	
					Belanja Modal Personal Computer	5.2.02.10.01.0002	100.216.600	82.184.000	82.184.000	82.184.000	100,00%	100,00%	

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	Nilai Kontrak	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
										Rp	%		
SUDIN KEPULAUAN SERIBU							14.822.543.068	6.300.490.036	5.888.638.968	5.843.666.164	92,75%	100,00%	
					Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.2.02.10.02.0005	26.553.546	21.365.000	21.365.000	21.365.000	100,00%	100,00%	
					Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.1.02.02.04.0115	0	17.760.000	6.393.600	6.393.600	36,00%	100,00%	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan		427.800.659	413.327.246	406.598.541	406.598.541	98,37%	100,00%	
					Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.02.02.01.0026	60.363.299	63.792.074	60.644.894	60.644.894	95,07%	100,00%	Sisa anggaran dari BPJS Kesehatan dan potongan kehadiran
					Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.1.02.02.01.0029	367.437.360	349.535.172	345.953.647	345.953.647	98,98%	100,00%	Sisa anggaran dari potongan kehadiran
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	1.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		1.676.200	1.676.200	1.115.000	1.115.000	66,52%	100,00%	
					Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.1.02.02.01.0067	1.676.200	1.676.200	1.115.000	1.115.000	66,52%	100,00%	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	1.04.01.1.09.02	Pemeliharaan / Service Kendaraan Dinas Operasional		15.760.129	15.760.129	15.664.223	15.664.223	99,39%	100,00%	
					Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.1.02.01.01.0013	835.120	835.120	767.824	767.824	91,94%	100,00%	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
					Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.1.02.03.02.0038	3.245.176	3.245.176	3.245.176	3.245.176	100,00%	100,00%	
					Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	5.1.02.03.02.0040	11.679.833	11.679.833	11.651.223	11.651.223	99,76%	100,00%	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja		28.856.927	28.856.927	27.127.290	27.127.290	94,01%	100,00%	
					Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.1.02.03.02.0405	17.565.086	17.565.086	17.198.340	17.198.340	97,91%	100,00%	
					Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.1.02.03.02.0406	3.763.947	3.763.947	3.379.950	3.379.950	89,80%	100,00%	
					Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.1.02.03.02.0411	7.527.894	7.527.894	6.549.000	6.549.000	87,00%	100,00%	

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
								Rp	%		
PUSAT DATA DAN INFORMASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						3.261.604.767	3.281.553.883	3.124.783.950	95,22%	95,51%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4.179.000	4.179.000	3.000.000	71,79%	50,00%	0,00%
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.1.02.01.01.0027	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00%	100%	
				Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.1.02.02.01.0042	1.179.000	1.179.000	-	0,00%	0,00%	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan belum terealisasi karena transaksi pembayaran melalui UP/GU lebih banyak menggunakan CMS daripada Buku CEK
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.939.914.758	1.939.914.758	1.909.955.704	98,46%	96,15%	
				Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	5.1.02.01.01.0018	969.507	969.507	943.500	97,32%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	53.667.603	53.667.603	52.991.844	98,74%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.1.02.01.01.0036	15.877.422	15.877.422	14.927.558	94,02%	100,00%	
				Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	5.1.02.02.04.0148	3.684.450	3.684.450	2.961.352	80,37%	100,00%	
				Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.02.05.01.0005	5.850.020	5.850.020	5.550.000	94,87%	100,00%	
				Belanja Modal Mebel	5.2.02.05.02.0001	48.970.475	48.970.475	46.520.000	95,00%	100,00%	
				Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	5.2.02.06.01.0002	2.200.770	2.200.770	2.081.250	94,57%	100,00%	
				Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	5.2.02.06.01.0003	178.271.632	178.271.632	177.378.000	99,50%	100,00%	
				Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.2.02.06.01.0006	124.003.539	124.003.539	123.132.300	99,30%	100,00%	
				Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	5.2.02.06.02.0011	200.200.000	200.200.000	198.135.000	98,97%	100,00%	
				Belanja Modal Personal Computer	5.2.02.10.01.0002	284.768.660	284.768.660	281.836.900	98,97%	100,00%	
				Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	5.2.02.10.01.0003	993.700.400	993.700.400	992.150.000	99,84%	100,00%	
				Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.2.02.10.02.0005	27.750.280	27.750.280	11.348.000	40,89%	50,00%	terdapat 1 (satu) komponen tidak dapat dilaksanakan (Antivirus Server) karena telah disediakan oleh Diskominfo
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		4.923.105	4.923.105	4.624.260	93,93%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.1.02.01.01.0030	1.725.504	1.725.504	1.638.360	94,95%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.1.02.01.01.0032	1.190.365	1.190.365	1.165.500	97,91%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.1.02.01.01.0036	2.007.236	2.007.236	1.820.400	90,69%	100,00%	
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		7.678.246	7.678.246	7.394.265	96,30%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.1.02.01.01.0026	7.678.246	7.678.246	7.394.265	96,30%	100,00%	
			Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus		21.814.760	21.814.760	8.272.100	37,92%	100,00%	
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.1.02.01.01.0004	21.814.760	21.814.760	8.272.100	37,92%	100,00%	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman		11.947.958	11.947.958	11.787.756	98,66%	100,00%	
				Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.1.02.01.01.0043	8.027.558	8.027.558	7.941.606	98,93%	100,00%	
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.1.02.01.01.0052	3.920.400	3.920.400	3.846.150	98,11%	100,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)		18.477.624	18.477.624	10.970.504	59,37%	100,00%	
				Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.1.02.02.01.0063	18.477.624	18.477.624	10.970.504	59,37%	100,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy		37.461.600	37.461.600	35.086.640	93,66%	100,00%	
				Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.1.02.02.04.0115	37.461.600	37.461.600	35.086.640	93,66%	100,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan		1.075.328.328	1.095.277.444	999.452.500	91,25%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.02.02.01.0026	56.755.608	63.792.074	62.791.107	98,43%	100,00%	

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SP) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
								Rp	%		
PUSAT DATA DAN INFORMASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						3.261.604.767	3.281.553.883	3.124.783.950	95,22%	95,51%	
				Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.1.02.02.01.0027	122.419.088	127.584.148	126.848.178	99,42%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Caraka	5.1.02.02.01.0032	61.209.544	63.792.074	63.424.088	99,42%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	5.1.02.02.01.0039	122.419.088	127.584.148	118.139.127	92,60%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.1.02.02.01.0029	712.525.000	712.525.000	628.250.000	88,17%	100,00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paial dan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus		1.283.700	1.283.700	993.800	77,42%	100,00%	
				Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.1.02.02.01.0067	1.283.700	1.283.700	993.800	77,42%	100,00%	
				Pemeliharaan/Service Kendaraan Dinas Operasional		5.405.488	5.405.488	4.286.621	79,30%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.1.02.03.02.0036	3.078.603	3.078.603	2.807.122	91,18%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.1.02.03.02.0038	2.326.885	2.326.885	1.479.499	63,58%	100,00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja		133.190.200	133.190.200	128.959.800	96,82%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.1.02.03.02.0405	12.546.490	12.546.490	12.210.000	97,32%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	5.1.02.03.02.0410	93.566.550	93.566.550	90.553.800	96,78%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.1.02.03.02.0411	27.077.160	27.077.160	26.196.000	96,75%	100,00%	

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
								Rp	%		
UNIT PENGELOLA DANA PERUMAHAN						5.798.000.000	5.798.000.000	4.291.036.473	74,01%	100,00%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Pegawai BLUD	5.1.01.99.99.9999	1.060.500.000	1.060.500.000	0	0,00%	0,00%	Tidak terealisasi. Berdasarkan Rapat Koordinasi terakhir, usulan Draft Pergub tentang Remunerasi dihentikan karena item pengurang TKD akan diberlakukan 2x (target kinerja thd TKD + target kinerja thd Remunerasi)
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang Jasa BLUD	5.1.02.99.99.9999	4.392.752.245	3.456.452.245	3.036.457.262	87,85%	100,00%	Selesai
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	5.2.05.99.99.9999	344.747.755	1.281.047.755	1.254.579.211	97,93%	100,00%	Selesai

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
								Rp	%		
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN I						37.040.906.984	36.610.779.962	34.381.552.484	93,91%	94,45%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		7.556.600	5.000.000	5.000.000	100,00%	50,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.1.02.01.01.0027	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00%	100,00%	
				Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.1.02.02.01.0042	2.556.600	-	-	#DIV/0!	0,00%	Dihapus dalam APBD Perubahan TA 2022
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor		174.564.759	174.564.759	168.589.590	96,58%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	170.008.119	170.008.119	164.689.590	96,87%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.1.02.01.01.0036	4.556.640	4.556.640	3.900.000	85,59%	100,00%	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja		912.484.102	912.484.102	879.892.400	96,43%	100,00%	
				Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.1.02.01.01.0012	61.936.820	61.936.820	59.523.750	96,10%	100,00%	
				Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	5.1.02.01.01.0015	26.806.450	26.806.450	25.391.250	94,72%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.1.02.01.01.0036	458.354.972	458.354.972	440.785.940	96,17%	100,00%	
				Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.02.05.01.0005	76.591.486	76.591.486	75.480.000	98,55%	100,00%	
				Belanja Pakaian Penyelamatan	5.1.02.01.01.0067	194.876.660	194.876.660	190.815.660	97,92%	100,00%	
				Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.1.02.01.01.0009	43.601.250	43.601.250	41.935.800	96,18%	100,00%	
				Belanja Modal Personal Computer	5.2.02.10.01.0002	35.184.864	35.184.864	32.000.000	90,95%	100,00%	
				Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.2.02.10.02.0005	15.131.600	15.131.600	13.960.000	92,26%	100,00%	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		48.695.086	48.695.086	46.170.450	94,82%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.1.02.01.01.0030	48.695.086	48.695.086	46.170.450	94,82%	100,00%	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Pengeandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengeandaan		82.473.886	82.473.886	80.147.550	97,18%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.1.02.01.01.0026	82.473.886	82.473.886	80.147.550	97,18%	100,00%	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus/ Peralatan Kerja		129.314.850	58.211.250	58.199.401	99,98%	100,00%	
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.1.02.01.01.0004	129.314.850	58.211.250	58.199.401	99,98%	100,00%	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman		54.940.600	54.940.600	54.837.378	99,81%	100,00%	
				Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.1.02.01.01.0058	54.940.600	54.940.600	54.837.378	99,81%	100,00%	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)		13.181.346.000	12.178.396.760	10.789.019.710	88,59%	100,00%	
				Belanja Tagihan Telepon	5.1.02.02.01.0059	6.739.200	6.739.200	2.814.486	41,76%	100,00%	
				Belanja Tagihan Air	5.1.02.02.01.0060	4.745.712.480	3.970.805.240	3.413.640.533	85,97%	100,00%	
				Belanja Tagihan Listrik	5.1.02.02.01.0061	8.382.233.520	8.154.191.520	7.329.563.638	89,89%	100,00%	
				Belanja Kawat/Faksimili /Internet/TV Berlangganan	5.1.02.02.01.0063	46.660.800	46.660.800	43.001.053	92,16%	100,00%	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy		126.720.000	126.720.000	103.910.727	82,00%	100,00%	
				Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.1.02.02.04.0115	126.720.000	126.720.000	103.910.727	82,00%	100,00%	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus		16.182.600	16.182.600	4.819.400	29,78%	100,00%	

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
								Rp	%		
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN I						37.040.906.984	36.610.779.962	34.381.552.484	93,91%	94,45%	
11	PROVINSI	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.1.02.02.01.0067	16.182.600	16.182.600	4.819.400	29,78%	100,00%	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan / Service Kendaraan Dinas Operasional		74.764.314	69.348.354	61.990.945	89,39%	80,00%	
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.1.02.01.01.0004	2.431.121	2.431.121	2.431.000	100,00%	100,00%	
				Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	5.1.02.01.01.0020	4.302.100	4.302.100	3.781.215	87,89%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.1.02.03.02.0036	49.222.556	49.222.556	48.584.045	98,70%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.1.02.03.02.0038	13.392.577	13.392.577	7.194.685	53,72%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	5.1.02.03.02.0040	5.415.960	-	-	#DIV/0!	0,00%	Dihapus dalam APBD Perubahan TA 2022
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja		83.079.403	83.079.403	78.654.600	94,67%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.1.02.03.02.0117	42.988.913	42.988.913	40.226.400	93,57%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.1.02.03.02.0121	10.690.240	10.690.240	10.323.000	96,56%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	5.1.02.03.02.0133	22.143.000	22.143.000	21.328.650	96,32%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.1.02.03.02.0405	7.257.250	7.257.250	6.776.550	93,38%	100,00%	
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan		17.910.970.254	18.892.041.326	18.463.144.114	97,73%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.02.02.01.0026	734.514.528	765.504.888	727.059.517	94,98%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.1.02.02.01.0027	244.838.176	255.168.296	253.704.298	99,43%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.1.02.02.01.0028	873.721.206	838.884.384	833.328.591	99,34%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Caraka	5.1.02.02.01.0032	61.209.544	63.792.074	63.426.073	99,43%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.1.02.02.01.0030	5.141.601.696	5.358.534.216	5.223.602.035	97,48%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.1.02.02.01.0031	7.222.726.192	7.527.464.732	7.374.675.273	97,97%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	5.1.02.02.01.0035	3.632.358.912	4.082.692.736	3.987.348.327	97,66%	100,00%	
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Rumah Susun		4.237.814.530	3.908.641.836	3.587.176.219	91,78%	92,31%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.1.02.01.01.0031	174.751.575	174.751.575	170.945.550	97,82%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	5.1.02.03.02.0040	2.728.293.255	2.728.293.255	2.282.279.414	83,65%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	5.1.02.03.03.0045	76.298.387	76.298.387	74.841.750	98,09%	100,00%	
				Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.1.02.01.01.0012	114.077.293	114.077.293	112.144.410	98,31%	100,00%	
				Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.1.02.01.01.0001	10.934.550	10.934.550	10.278.600	94,00%	100,00%	
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.1.02.01.01.0004	4.785.088	4.785.088	4.693.235	98,08%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	5.1.02.03.02.0012	100.359.644	100.359.644	99.012.000	98,66%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	5.1.02.03.04.0083	341.986.238	341.986.238	311.891.760	91,20%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	5.1.02.03.04.0126	275.000.000	275.000.000	196.747.500	71,54%	100,00%	
				Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	5.2.04.03.02.0004	61.787.000	61.787.000	59.607.000	96,47%	100,00%	
				Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.03.01.01.0001	80.041.500	-	-	0,00%	0,00%	Dihapus dalam APBD Perubahan TA 2022

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
								Rp	%		
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN I						37.040.906.984	36.610.779.962	34.381.552.484	93,91%	94,45%	
				Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	5.1.02.03.02.0494	165.000.000	165.000.000	163.725.000	99,23%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.1.02.03.03.0001	104.500.000	104.500.000	101.010.000	96,66%	100,00%	

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
								Rp	%		
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN II						37.229.715.951	31.245.480.684	28.394.198.161	91%	100,00%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penuhian/Verifikasi	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		14.277.000	13.890.000	13.890.000	100%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.1.02.01.01.0027	13.890.000	13.890.000	13.890.000	100%	100,00%	
				Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.1.02.02.01.0042	387.000	-	-	0%	0,00%	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan belum terealisasi karena transaksi pembayaran melalui UP/GU lebih banyak menggunakan CMS daripada Buku CEK
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor		79.730.971	79.730.971	78.203.940	98%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	79.730.971	79.730.971	78.203.940	98%	100,00%	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja		1.086.518.330	2.043.029.215	1.982.176.683	97%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.1.02.01.01.0036	348.531.542	348.531.542	338.604.390	97%	100,00%	
				Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.1.02.01.01.0012	54.478.017	54.478.017	51.686.040	95%	100,00%	
				Belanja Modal Personal Computer	5.2.02.10.01.0002	85.294.000	85.294.000	82.695.000	97%	100,00%	
				Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.02.05.01.0005	82.748.600	1.034.737.605	1.004.888.550	97%	100,00%	
				Belanja Modal Peralatan Las	5.2.02.03.01.0008	8.446.130	8.446.130	8.339.800	99%	100,00%	
				Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	5.2.02.01.03.0007	18.424.230	18.424.230	17.982.000	98%	100,00%	
				Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.1.02.01.01.0063	85.526.980	85.526.980	83.332.140	97%	100,00%	
				Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.1.02.01.01.0064	239.323.480	239.323.480	236.012.040	99%	100,00%	
				Belanja Pakaian Teknik	5.1.02.01.01.0069	58.483.150	58.483.150	56.143.800	96%	100,00%	
				Belanja Pakaian Siaga	5.1.02.01.01.0068	33.860.640	33.860.640	31.746.000	94%	100,00%	
				Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.1.02.01.01.0009	39.722.705	39.722.705	36.302.550	91%	100,00%	
				Belanja Modal Alat Ukur Universal	5.2.02.03.03.0001	3.300.000	3.300.000	2.903.834	88%	100,00%	
				Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	5.2.02.03.02.0005	10.865.910	10.865.910	9.934.500	91%	100,00%	
				Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.2.02.10.02.0005	11.462.946	15.984.826	15.641.639	98%	100,00%	
				Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	5.2.02.03.02.0007	6.050.000	6.050.000	5.964.400	99%	100,00%	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		19.252.728	19.252.728	18.001.314	94%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.1.02.01.01.0026	19.252.728	19.252.728	18.001.314	94%	100,00%	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus/ Peralatan Kerja		44.405.450	44.405.450	44.400.000	100%	100,00%	
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.1.02.01.01.0004	44.405.450	44.405.450	44.400.000	100%	100,00%	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman		25.643.200	25.643.200	23.520.299	92%	100,00%	
				Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.1.02.01.01.0043	25.643.200	25.643.200	23.520.299	92%	100,00%	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)		11.373.016.721	4.286.219.142	3.976.077.869	93%	100,00%	
				Belanja Tagihan Telepon	5.1.02.02.01.0059	157.741.584	1.880.736	1.699.065	90%	100,00%	
				Belanja Tagihan Air	5.1.02.02.01.0060	6.215.192.909	2.555.196.000	2.399.013.265	94%	100,00%	
				Belanja Tagihan Listrik	5.1.02.02.01.0061	4.969.286.100	1.718.877.030	1.568.454.739	91%	100,00%	
				Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.1.02.02.01.0063	30.796.128	10.265.376	6.910.800	67%	100,00%	

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODEREKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
								Rp	%		
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN II						37.229.715.951	31.245.480.684	28.394.198.161	91%	100,00%	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy		58.740.000	58.740.000	49.210.000	84%	100,00%	
				Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.1.02.02.04.0115	58.740.000	58.740.000	49.210.000	84%	100,00%	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus		2.038.000	2.038.000	971.300	48%	100,00%	
				Belanja Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan	5.1.02.02.01.0067	2.038.000	2.038.000	971.300	48%	100,00%	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Pemeliharaan / Service Kendaraan Dinas Operasional		18.364.902	18.364.902	14.427.850	79%	100,00%	
				Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.1.02.01.01.0013	4.466.440	4.466.440	4.358.600	98%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.1.02.03.02.0037	9.833.588	9.833.588	8.530.350	87%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.1.02.03.02.0038	4.064.874	4.064.874	1.538.900	38%	100,00%	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja		31.012.630	31.012.630	29.931.150	97%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.1.02.03.02.0121	8.102.688	8.102.688	7.992.000	99%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.1.02.03.02.0405	12.546.490	12.546.490	11.766.000	94%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.1.02.03.02.0406	2.509.298	2.509.298	2.442.000	97%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.1.02.03.02.0411	3.136.650	3.136.650	3.052.500	97%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.1.02.03.02.0117	4.090.174	4.090.174	4.051.500	99%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	5.1.02.03.02.0132	627.330	627.330	627.150	100%	100,00%	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan		17.174.350.867	18.028.369.592	17.557.183.074	102%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.02.02.01.0026	454.044.864	510.336.592	505.516.296	111%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.1.02.02.01.0027	340.800.882	382.752.444	355.104.571	104%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.1.02.02.01.0028	896.687.840	932.093.760	923.335.764	103%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Caraka	5.1.02.02.01.0032	56.755.608	63.792.074	63.193.969	111%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	5.1.02.02.01.0035	3.361.160.165	3.508.564.070	3.430.721.669	102%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.1.02.02.01.0031	5.362.178.448	5.613.702.512	5.405.691.410	101%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.1.02.02.01.0030	6.702.723.060	7.017.128.140	6.873.619.395	103%	100,00%	
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Rumah Susun		1.226.512.291	517.644.993	506.124.258	41%	100,00%	
				Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.1.02.01.01.0001	30.441.675	30.441.675	30.058.800	99%	100,00%	
				Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.1.02.01.01.0012	96.740.490	96.740.490	93.645.150	97%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.1.02.01.01.0031	60.527.060	60.527.060	57.997.500	96%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.1.02.03.03.0001	41.547.198	41.547.198	39.528.210	95%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	5.1.02.03.03.0045	19.516.255	19.516.255	18.444.648	95%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.1.02.03.02.0117	71.544.000	71.544.000	71.040.000	99%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	5.1.02.03.04.0083	906.195.613	197.328.315	195.409.950	99%	100,00%	Perubahan di APBD-P 2022
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Pemeliharaan Masjid di Rusun Marunda		6.075.852.861	6.075.852.861	4.100.080.424	67%	95,00%	

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODEREKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SP) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
								Rp	%		
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN II						37.229.715.951	31.245.480.684	28.394.198.161	91%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	5.1.02.03.03.0008	5.890.113.230	5.890.113.230	3.969.180.324	67%	85,00%	Realisasi Pembayaran di Bobot Pekerjaan 85 %, Sisa 15 % yang akan dibayarkan Setelah Pekerjaan Fisik dilaksanakan
				Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelavakan Bangunan Gedung	5.1.02.02.08.0003	41.291.250	41.291.250	40.535.000	98%	100,00%	
				Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	5.1.02.02.08.0019	144.448.381	144.448.381	90.365.100	63%	100,00%	

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
								Rp	%		
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN III						56.454.322.394	47.413.917.443	46.051.985.207	97,13%	100,00%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		7.500.000	7.500.000	7.500.000	100,00%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.1.02.01.01.0027	7.500.000	7.500.000	7.500.000	100,00%	100,00%	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor		212.795.793	212.795.793	204.014.800	95,87%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	199.400.543	199.400.543	191.194.300	95,88%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.1.02.01.01.0036	13.395.250	13.395.250	12.820.500	95,71%	100,00%	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja		1.190.651.869	1.190.651.869	1.160.192.859	97,44%	100,00%	
				Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.1.02.01.01.0012	198.301.169	198.301.169	192.052.080	96,85%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.1.02.01.01.0036	544.183.200	544.183.200	527.668.359	96,97%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.1.02.03.03.0001	45.540.000	45.540.000	44.555.400	97,84%	100,00%	
				Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.1.02.01.01.0063	191.900.500	191.900.500	187.467.900	97,69%	100,00%	
				Belanja Pakaian Dinas Harian (PDL)	5.1.02.01.01.0064	184.932.000	184.932.000	183.460.800	99,20%	100,00%	
				Belanja Pakaian Teknik	5.1.02.01.01.0069	25.795.000	25.795.000	24.988.320	96,87%	100,00%	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)		90.094.613	90.094.613	87.575.592	97,20%	100,00%	
				Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.1.02.01.01.0009	90.094.613	90.094.613	87.575.592	97,20%	100,00%	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		478.047.130	478.047.130	467.632.500	97,82%	100,00%	
				Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.2.02.05.01.0004	20.363.750	20.363.750	17.325.000	85,08%	100,00%	
				Belanja Modal Mebel	5.2.02.05.02.0001	219.247.710	219.247.710	214.357.900	97,77%	100,00%	
				Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.2.02.06.01.0001	61.256.800	61.256.800	60.170.000	98,23%	100,00%	
				Belanja Modal Personal Computer	5.2.02.10.01.0002	177.178.870	177.178.870	175.779.600	99,21%	100,00%	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		63.877.363	63.877.363	62.890.380	98,45%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.1.02.01.01.0030	63.877.363	63.877.363	62.890.380	98,45%	100,00%	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		75.809.074	75.809.074	72.729.531	95,94%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.1.02.01.01.0026	75.809.074	75.809.074	72.729.531	95,94%	100,00%	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus/Peralatan Kerja		187.782.360	36.798.000	36.798.000	100,00%	100,00%	
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.1.02.01.01.0004	187.782.360	36.798.000	36.798.000	100,00%	10,00%	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman		220.311.168	105.521.680	105.506.610	99,99%	100,00%	
				Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.1.02.01.01.0043	220.311.168	105.521.680	105.506.610	99,99%	100,00%	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)		24.356.884.691	14.823.319.088	13.914.427.121	93,87%	100,00%	

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
								Rp	%		
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN III						56.454.322.394	47.413.917.443	46.051.985.207	97,13%	100,00%	
				Belanja Tagihan Listrik	5.1.02.02.01.0061	17.669.833.763	12.335.522.400	11.821.845.475	95,84%	100,00%	
				Belanja Tagihan Air	5.1.02.02.01.0060	6.634.598.880	2.443.009.440	2.058.056.981	84,24%	100,00%	
				Belanja Tagihan Telepon	5.1.02.02.01.0059	11.390.544	3.725.744	2.429.363	65,20%	100,00%	
				Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.1.02.02.01.0063	41.061.504	41.061.504	32.095.302	78,16%	100,00%	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy		58.740.000	58.740.000	58.739.000	100,00%	100,00%	
				Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.1.02.02.04.0115	58.740.000	58.740.000	58.739.000	100,00%	100,00%	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paik dan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus		6.971.800	6.338.000	3.839.300	60,58%	100,00%	
				Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.1.02.02.01.0067	6.971.800	6.338.000	3.839.300	60,58%	100,00%	Pembayaran/realisasi sesu
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Pemeliharaan / Service Kendaraan Dinas Operasional		43.393.426	43.393.426	42.145.698	97,12%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.1.02.03.02.0038	5.626.434	5.626.434	4.629.700	82,28%	100,00%	Pembayaran sesuai dengan
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5.1.02.03.02.0039	10.344.092	10.344.092	10.323.000	99,80%	100,00%	
				Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	5.1.02.01.01.0020	3.620.870	3.620.870	3.475.762	95,99%	100,00%	
				Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.1.02.01.01.0013	16.484.922	16.484.922	16.477.206	99,95%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	5.1.02.03.02.0040	7.317.108	7.317.108	7.240.030	98,95%	100,00%	
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja		444.132.623	264.618.123	257.109.300	97,16%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.1.02.03.02.0117	36.989.403	36.989.403	35.586.600	96,21%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.1.02.03.02.0121	36.008.720	36.008.720	34.032.600	94,51%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	5.1.02.03.02.0133	26.620.000	26.620.000	25.818.600	96,99%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.1.02.03.02.0405	14.514.500	-	-	0,00%	0,00%	anggaran dikembalikan
				Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	5.1.02.03.02.0494	165.000.000	-	-	0,00%	0,00%	anggaran dikembalikan
				Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	5.1.02.03.04.0126	165.000.000	165.000.000	161.671.500	97,98%	100,00%	
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan		26.339.317.092	27.587.378.892	27.242.384.634	98,75%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Caraka	5.1.02.02.01.0032	61.209.544	63.792.074	63.460.009	99,48%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.02.02.01.0026	795.724.072	829.296.962	788.486.467	95,08%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.1.02.02.01.0027	306.047.720	318.960.370	317.150.047	99,43%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.1.02.02.01.0028	587.407.188	559.256.256	556.054.095	99,43%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.1.02.02.01.0030	11.918.552.960	12.758.414.800	12.657.123.061	99,21%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.1.02.02.01.0031	8.569.336.160	8.823.022.952	8.688.940.848	98,48%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	5.1.02.02.01.0035	4.101.039.448	4.234.635.478	4.171.170.107	98,50%	100,00%	
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Rumah Susun		2.678.013.392	2.369.034.392	2.328.499.882	98,29%	100,00%	

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
								Rp	%		
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN III						56.454.322.394	47.413.917.443	46.051.985.207	97,13%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	5.1.02.03.02.0040	1.548.951.527	1.548.951.527	1.527.078.282	98,59%	100,00%	
				Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.1.02.01.01.0001	199.987.975	199.987.975	195.226.350	97,62%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	5.1.02.01.01.0036	49.243.293	49.243.293	46.997.400	95,44%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	5.1.02.03.03.0001	76.768.615	76.768.615	75.019.350	97,72%	100,00%	
				Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.1.02.01.01.0012	101.319.163	101.319.163	99.424.920	98,13%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik La	5.1.02.03.04.0126	63.292.790	63.292.790	61.938.000	97,86%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.1.02.01.01.0031	199.993.345	199.993.345	195.321.500	97,66%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air	5.1.02.03.04.0083	268.884.000	96.096.000	94.890.150	98,75%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar	5.1.02.03.02.0012	25.725.684	25.725.684	25.100.330	97,57%	100,00%	
				Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	5.2.02.02.01.0009	143.847.000	7.656.000	7.503.600	98,01%	100,00%	

MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
								Rp	%		
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN IV						31.762.656.643	32.670.683.352	29.964.517.240	91,72%	100,00%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5 1 02 01 01 0027	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00%	100%	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5 1 02 01 01 0024	103.227.367	103.227.367	101.011.350	97,85%	100,00%	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja		1.194.272.860	1.367.001.933	1.323.304.070	96,80%	100,00%	
				Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5 1 02 01 01 0012	94.011.720	176.428.010	168.611.300	95,57%	100%	
				Belanja Suku Cadang-Suku CadangAlat Kedokteran	5 1 02 01 01 0015	29.291.680	29.291.680	29.286.400	99,98%	100%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5 1 02 01 01 0036	855.636.540	855.636.540	837.230.030	97,85%	100%	
				Belanja Pakaian Penyelamatan	5.1.02.01.01.0067	171.772.920	171.772.920	169.039.200	98,41%	100%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah TanggaAlat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.1.02.03.02.0121		1.212.783	1.025.640	84,57%	100%	
				Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.1.02.03.03.0001		89.100.000	88.411.500	99,23%	100%	
				Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	5 2 02 06 02 0011	43.560.000	43.560.000	29.700.000	68,18%	100%	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja		45.012.000	45.012.000	24.569.850	55%	100,00%	
				Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.1.02.01.01.0009	45.012.000	45.012.000	24.569.850	54,59%	100%	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		19.163.331	19.163.331	18.784.700	98,02%	100,00%	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.1.02.01.01.0026	19.163.331	19.163.331	18.784.700	98,02%	100%	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Pengeandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengeandaan		25.798.025	25.798.025	25.331.310	98,19%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.1.02.01.01.0026	25.798.025	25.798.025	25.331.310	98,19%	100%	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus/ Peralatan Kerja		97.766.350	97.766.350	86.136.152	88,10%	100,00%	
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.1.02.01.01.0004	97.766.350	97.766.350	86.136.152	88,10%	100%	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman		98.131.000	98.131.000	94.961.340	96,77%	100,00%	
				Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.1.02.01.01.0058	98.131.000	98.131.000	94.961.340	96,77%	100%	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)		10.292.246.208	10.292.246.208	8.192.846.695	79,60%	100,00%	
				Belanja Tagihan Air	5.1.02.02.01.0060	3.037.850.880	4.010.581.278	2.800.514.270	69,83%	100%	
				Belanja Tagihan Listrik	5.1.02.02.01.0061	7.217.440.080	6.244.709.682	5.361.947.048	85,86%	100%	
				Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.1.02.02.01.0063	36.955.248	36.955.248	30.385.377	82,22%	100%	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy		117.480.000	117.480.000	115.623.000	98,42%	100,00%	
				Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.1.02.02.04.0115	117.480.000	117.480.000	115.623.000	98,42%	100%	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Paik dan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus		6.658.520	6.658.520	4.132.600	62,06%	100,00%	
				Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.1.02.02.01.0067	6.658.520	6.658.520	4.132.600	62,06%	100%	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Paik dan	Pemeliharaan / Service Kendaraan Dinas Operasional		79.082.542	79.082.542	69.195.402	87,50%	100,00%	

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
								Rp	%		
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN IV						31.762.656.643	32.670.683.352	29.964.517.240	91,72%	100,00%	
				Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5 1 02 01 01 0012	4.639.800	4.639.800	4.428.900	95,45%	100%	
				Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5 1 02 01 01 0013	954.690	954.690	915.750	95,92%	100%	
				Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	5.1.02.01.01.0020	934.890	934.890	915.750	97,95%	100%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5 1 02 03 02 0036	9.484.200	9.484.200	9.213.888	97,15%	100%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.1.02.03.02.0038	29.102.260	29.102.260	21.193.674	72,82%	100%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5.1.02.03.02.0039	27.341.908	27.341.908	26.045.040	95,26%	100%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	5.1.02.03.02.0040	6.624.794	6.624.794	6.482.400	97,85%	100%	
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja		42.978.672	42.978.672	42.522.040	98,94%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.1.02.03.02.0117	42.978.672	42.978.672	42.522.040	98,94%	100%	
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan		18.455.404.642	19.363.045.676	18.974.190.779	97,99%	100,00%	
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.02.02.01.0026	510.800.472	574.128.666	568.084.974	98,95%	100%	
				Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.1.02.02.01.0027	227.022.432	255.168.296	251.646.277	98,62%	100%	
				Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.1.02.02.01.0028	1.075.007.772	1.118.512.512	1.104.158.834	98,72%	100%	
				Belanja Jasa Tenaga Caraka	5.1.02.02.01.0032	113.511.216	127.584.148	125.882.569	98,67%	100%	
				Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.1.02.02.01.0030	6.032.450.754	6.315.415.326	6.212.152.014	98,36%	100%	
				Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.1.02.02.01.0031	6.946.458.444	7.272.296.436	7.079.377.731	97,35%	100%	
				Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	5.1.02.02.01.0035	3.550.153.552	3.699.940.292	3.632.888.380	98,19%	100%	
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Rumah Susun		1.061.684.076	889.340.678	771.684.432	86,77%	100,00%	
				Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.1.02.01.01.0001	145.254.315	145.254.314	140.312.880	96,60%	100%	
				Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.1.02.01.01.0012	112.663.488	112.663.488	110.132.702	97,75%	100%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5 1 02 01 01 0031	108.958.432	108.958.432	106.304.700	97,56%	100%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	5 1 02 03 02 0012	20.824.430	20.824.430	20.268.600	97,33%	100%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	5 1 02 03 02 0040	458.599.231	286.255.834	188.777.700	65,95%	100%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.1.02.03.02.0117	64.308.530	64.308.530	62.315.400	96,90%	100%	
				Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	5.1.02.03.04.0126	72.212.580	72.212.580	65.378.500	90,54%	100%	
				Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	5.1.02.03.03.0045	31.797.700	31.797.700	31.690.500	99,66%	100%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.1.02.01.01.0036	47.065.370	47.065.370	46.503.450	98,81%	100%	
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Rumah Susun		118.751.050	118.751.050	115.223.520	97,03%	100,00%	
				Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	5.1.02.03.04.0083	118.751.050	118.751.050	115.223.520	97,03%	100%	

MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
								Rp	%		
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN V						30.494.963.721	28.999.981.776	26.243.236.142	90%	100%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penemuan/Verifikasi	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		5.500.000	5.500.000	5.500.000	100%	100%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Materai)	5.1.02.01.01.0027	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100%	100%	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	122.178.213	122.178.213	120.361.185	99%	100%	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja		1.375.708.407	1.375.708.407	1.298.493.245	94%	100%	
				Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.1.02.01.01.0012	179.322.005	179.322.005	176.558.820	98%	100%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.1.02.01.01.0036	399.047.649	399.047.649	342.425.825	86%	100%	
				Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.02.05.01.0005	197.340.000	197.340.000	194.805.000	99%	100%	
				Belanja Modal Alat Pendingin	5.2.02.05.02.0004	18.150.000	18.150.000	17.049.600	94%	100%	
				Belanja Modal Alat Pembersih	5.2.02.05.02.0003	7.588.020	7.588.020	7.159.500	94%	100%	
				Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.2.02.06.01.0006	27.818.683	27.818.683	26.862.000	97%	100%	
				Belanja Modal Personal Computer	5.2.02.10.01.0002	58.683.372	58.683.372	56.943.000	97%	100%	
				Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	5.2.02.06.01.0003	34.833.700	34.833.700	33.855.000	97%	100%	
				Belanja Modal Alat Ukur Universal	5.2.02.03.03.0001	6.938.778	6.938.778	6.660.000	96%	100%	
				Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	5.2.04.02.06.0002	21.785.500	21.785.500	21.367.500	98%	100%	
				Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.2.03.01.02.0008	179.261.500	179.261.500	173.715.000	97%	100%	
				Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	5.2.04.03.02.0004	157.819.200	157.819.200	155.178.000	98%	100%	
				Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	5.2.02.06.02.0011	87.120.000	87.120.000	85.914.000	99%	100%	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	5.1.02.01.01.0009	92.829.000	92.829.000	90.354.000	97%	100%	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.1.02.01.01.0030	15.769.622	15.769.622	14.857.350	94%	100%	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026	18.747.014	17.604.600	17.604.600	100%	70%	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus/ Peralatan Kerja	5.1.02.01.01.0004	71.865.250	71.865.250	64.127.407	89%	100%	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.1.02.01.01.0058	21.740.400	21.740.400	21.535.121	99%	100%	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)		11.042.388.640	9.684.201.527	7.387.964.452	76%	100%	
				Belanja Tagihan Air	5.1.02.02.01.0060	2.731.858.000	2.224.270.160	1.655.384.082	74%	100%	
				Belanja Tagihan Listrik	5.1.02.02.01.0061	8.273.202.000	7.422.602.727	5.711.159.499	77%	100%	
				Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.1.02.02.01.0063	37.328.640	37.328.640	21.420.871	57%	100%	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy		84.480.000	84.480.000	83.992.800	99%	100%	
				Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.1.02.02.01.0060	84.480.000	84.480.000	83.992.800	99%	100%	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus		5.526.300	5.526.300	5.514.900	100%	100%	
				Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.1.02.02.01.0067	5.526.300	5.526.300	5.514.900	100%	100%	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Pemeliharaan / Service Kendaraan Dinas Operasional		48.329.815	48.329.815	42.332.610	88%	100%	

MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
								Rp	%		
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN V						30.494.963.721	28.999.981.776	26.243.236.142	90%	100%	
				Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	5.1.02.01.01.0020	5.093.880	5.093.880	4.795.200	94%	100%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.1.02.03.02.0036	20.781.794	20.781.794	18.011.410	87%	100%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.1.02.03.02.0038	13.388.430	13.388.430	10.681.000	80%	100%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5.1.02.03.02.0039	9.065.711	9.065.711	8.845.000	98%	100%	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja		119.213.996	119.213.996	115.018.200	96%	100%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.1.02.03.02.0117	119.213.996	119.213.996	115.018.200	96%	100%	
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan		16.303.559.747	15.888.856.378	15.575.532.832	98%	100%	
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.02.02.01.0026	489.676.352	510.336.592	506.511.708	99%	100%	
				Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.1.02.02.01.0027	367.257.264	382.752.444	381.508.432	100%	100%	
				Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.1.02.02.01.0028	1.076.913.178	1.025.303.136	1.019.432.498	99%	100%	
				Belanja Jasa Tenaga Caraka	5.1.02.02.01.0032	61.209.544	63.792.074	63.430.010	99%	100%	
				Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	5.1.02.02.01.0035	3.131.611.872	3.125.811.626	3.096.578.812	99%	100%	
				Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.1.02.02.01.0031	4.896.763.520	4.720.613.476	4.599.212.599	97%	100%	
				Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.1.02.02.01.0030	6.280.128.017	6.060.247.030	5.908.858.773	98%	100%	
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Rumah Susun		1.167.127.317	1.446.178.268	1.400.047.440	97%	100%	
				Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.1.02.01.01.01.0001	2.145.000	2.145.000	-	0%	0%	
				Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.1.02.01.01.01.0012	127.575.402	127.575.402	125.967.240	99%	100%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.1.02.01.01.01.0031	92.301.440	92.301.440	91.674.900	99%	100%	
				Belanja Pemeliharaan Alat-Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	5.1.02.03.02.0012	39.493.256	39.493.256	38.628.000	98%	100%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	5.1.02.03.02.0040	485.383.476	573.593.447	546.471.870	95%	100%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.1.02.03.02.0117	101.201.023	101.201.023	99.494.850	98%	100%	
				Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	5.1.02.03.04.0083	179.245.000	179.245.000	169.164.000	94%	100%	
				Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	5.1.02.03.03.0045	139.782.720	139.782.720	138.550.200	99%	100%	
				Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	5.2.04.02.06.0002	-	190.840.980	190.096.380	100%	100%	

**MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
								Rp	%		
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN VI						38.239.401.551	35.016.241.888	31.732.273.313	90,62%	90,62%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		5.645.000	5.645.000	5.000.000	88,57%	88,57%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.1.02.01.01.0027	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00%	100,00%	
				Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.1.02.02.01.0042	645.000	645.000	-	0,00%	0,00%	Anggaran yang semula dipersiapkan untuk pembelian buku cek, tetapi tidak digunakan lagi karena semua pembayaran sudah by sistem
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor		109.365.817	109.365.817	108.380.955	99,10%	99,10%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	109.365.817	109.365.817	108.380.955	99,10%	99,10%	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih		197.186.550	197.186.550	190.668.500	96,69%	96,69%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.1.02.01.01.0036	197.186.550	197.186.550	190.668.500	96,69%	96,69%	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja		996.543.528	1.168.777.788	1.021.943.190	87,44%	87,44%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.1.02.01.01.0036	610.325.639	610.325.639	495.891.990	81,25%	81,25%	Sesuai dengan kontrak di E-Catalog
				Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	5.2.02.04.01.0010	8.039.680	8.039.680	7.881.000	98,03%	98,03%	
				Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tool)	5.2.02.05.01.0005	13.098.360	13.098.360	12.654.000	96,61%	96,61%	
				Belanja Modal Personal Computer	5.2.02.10.01.0002	60.061.540	60.061.540	59.163.000	98,50%	98,50%	
				Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	5.2.02.01.01.0012	44.211.895	44.211.895	43.689.600	98,82%	98,82%	
				Belanja Modal Peralatan Las	5.2.02.03.01.0008	11.154.000	11.154.000	10.878.000	97,53%	97,53%	
				Belanja Modal Alat Ukur Universal	5.2.02.03.03.0001	2.312.926	2.312.926	2.192.250	94,78%	94,78%	
				Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.2.02.06.01.0001	105.087.950	105.087.950	101.343.000	96,44%	96,44%	
				Belanja Modal Alat Pembersih	5.2.02.05.02.0003	2.860.000	2.860.000	2.830.500	98,97%	98,97%	
				Belanja Modal Alat Pendingin	5.2.02.05.02.0004	3.433.210	3.433.210	3.330.000	96,99%	96,99%	
				Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	5.2.02.06.02.0011	135.958.328	135.958.328	133.866.000	98,46%	98,46%	
				Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.1.02.01.01.0009	-	43.076.000	41.958.000	97,40%	97,40%	
				Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.1.02.01.01.0012	-	14.542.880	14.474.400	99,53%	99,53%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.1.02.01.01.0036	-	92.340.380	91.791.450	99,41%	99,41%	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja		5.034.832	5.034.832	4.787.430	95,09%	95,09%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.1.02.01.01.0030	5.034.832	5.034.832	4.787.430	95,09%	95,09%	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		60.972.967	60.972.967	57.806.580	94,81%	94,81%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.1.02.01.01.0026	60.972.967	60.972.967	57.806.580	94,81%	94,81%	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus/ Peralatan Kerja		202.990.080	88.212.480	88.150.180	99,93%	99,93%	
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.1.02.01.01.0004	202.990.080	88.212.480	88.150.180	99,93%	99,93%	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman		104.055.336	104.055.336	100.581.250	96,66%	96,66%	
				Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.1.02.01.01.0058	104.055.336	104.055.336	100.581.250	96,66%	96,66%	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)		12.875.239.104	9.415.856.402	6.725.579.663	71,43%	71,43%	
				Belanja Tagihan Telepon	5.1.02.02.01.0059	6.177.600	2.059.200	1.660.134	80,62%	80,62%	Nilai realisasi sesuai dengan nominal Tagihan Telepon
				Belanja Tagihan Air	5.1.02.02.01.0060	6.168.923.496	4.123.380.000	2.961.827.538	71,83%	71,83%	Nilai realisasi sesuai dengan nominal Tagihan Air
				Belanja Tagihan Listrik	5.1.02.02.01.0061	6.618.015.000	5.228.824.946	3.727.061.094	71,28%	71,28%	Nilai realisasi sesuai dengan nominal Tagihan Listrik
				Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.1.02.02.01.0063	82.123.008	61.592.256	35.030.897	56,88%	56,88%	Nilai realisasi sesuai dengan nominal Tagihan Internet

MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
								Rp	%		
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN VI						38.239.401.551	35.016.241.888	31.732.273.313	90,62%	90,62%	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy		84.480.000	84.480.000	55.882.923	66,15%	66,15%	
				Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.1.02.02.04.0115	84.480.000	84.480.000	55.882.923	66,15%	66,15%	Sesuai dengan Kontrak
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus		5.010.500	3.754.500	3.331.800	88,74%	88,74%	
				Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.1.02.02.01.0067	5.010.500	3.754.500	3.331.800	88,74%	88,74%	Sesuai dengan nominal Pajak kendaraan
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		68.588.289	68.588.289	65.549.385	95,57%	95,57%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.1.02.03.02.0036	48.415.884	48.415.884	47.574.600	98,26%	98,26%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.1.02.03.02.0038	20.172.405	20.172.405	17.974.785	89,11%	89,11%	Sesuai dengan Nilai Kontrak berdasarkan kerusakan pada KDO
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja		55.552.442	55.552.442	53.180.100	95,73%	95,73%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.1.02.03.02.0117	55.552.442	55.552.442	53.180.100	95,73%	95,73%	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan		21.089.769.114	22.120.649.731	21.844.732.093	98,75%	98,75%	
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.02.02.01.0026	1.101.771.792	1.148.257.313	1.135.402.615	98,88%	98,88%	
				Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.1.02.02.01.0028	1.844.522.546	1.770.978.144	1.756.732.442	99,20%	99,20%	
				Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.1.02.02.01.0030	7.039.097.560	7.336.088.510	7.256.751.660	98,92%	98,92%	
				Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.1.02.02.01.0031	7.467.564.368	7.782.633.028	7.706.182.903	99,02%	99,02%	
				Belanja Jasa Tenaga Caraka	5.1.02.02.01.0032	61.209.544	63.792.074	33.790.226	52,97%	52,97%	Terjadi kekosongan posisi selama 4 Bulan
				Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	5.1.02.02.01.0035	3.575.603.304	4.018.900.662	3.955.872.247	98,43%	98,43%	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Rumah Susun		1.528.108.566	1.431.413.066	1.347.647.264	94,15%	94,15%	
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.1.02.01.01.0004	4.618.790	4.618.790	2.912.900	63,07%	63,07%	Ada barang yang tidak tersedia di pertamina
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.1.02.01.01.0031	175.865.580	175.865.580	172.083.300	97,85%	97,85%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	5.1.02.03.02.0012	27.219.720	27.219.720	26.695.500	98,07%	98,07%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	5.1.02.03.02.0040	716.735.905	620.040.405	566.146.509	91,31%	91,31%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	5.1.02.03.02.0133	36.499.100	36.499.100	35.242.500	96,56%	96,56%	
				Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.1.02.03.03.0001	330.278.916	330.278.916	326.146.305	98,75%	98,75%	
				Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	5.1.02.03.04.0083	165.825.055	165.825.055	148.518.000	89,56%	89,56%	Sesuai dengan besaran tagihan dari PD PAL JAYA
				Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	5.1.02.03.04.0126	71.065.500	71.065.500	69.902.250	98,36%	98,36%	
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum Rumah Susun		850.859.426	96.696.688	59.052.000	61,07%	61,07%	
				Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.2.03.01.02.0008	850.859.426	96.696.688	59.052.000	61,07%	61,07%	Sesuai dengan kontrak

MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPI) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi		
								Rp	%				
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN VII								54.257.012.646	49.389.435.574	48.562.123.698	98,32%	98,32%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Pelaksanaan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		5.774.000	5.774.000	5.000.000	86,60%	86,60%			
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.1.02.01.01.0027	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00%	100,00%			
				Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.1.02.02.01.0042			-	0,00%	0,00%	anggaran yang semula dipersiapkan untuk pembelian buku cek, tetapi tidak digunakan lagi karena semua pembayaran sudah by sistem		
						774.000	774.000						
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum Perangkat	Penyediaan Peralatan	Penyediaan Alat Tulis Kantor		117.465.915	117.465.915	116.511.150	99,19%	99,19%			
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	117.465.915	117.465.915	116.511.150	99,19%	99,19%			
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum Perangkat	Penyediaan Peralatan	Pengisian Alat Pemadam Kebakaran (APAR)		27.799.992	27.799.992	26.093.880	93,86%	93,86%			
				Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.1.02.01.01.0009	27.799.992	27.799.992	26.093.880	93,86%	93,86%			
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum Perangkat	Penyediaan Peralatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja		910.196.058	1.361.907.339	1.353.798.735	99,40%	99,40%			
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.1.02.01.01.0036	764.492.896	931.856.476	927.685.275	99,55%	99,55%			
				Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.1.02.01.01.0012	145.703.162	143.496.360	143.496.360	98,49%	98,49%			
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.1.02.03.02.0117	-	9.990.000	9.990.000	100,00%	100,00%			
				Belanja Modal Personal Computer	5.2.02.10.01.0002	-	105.262.743	104.761.800	99,52%	99,52%			
				Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.2.03.01.02.0008	-	169.094.958	167.865.300	99,27%	99,27%			
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum Perangkat	Penyediaan Peralatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		16.439.390	16.439.390	16.355.415	99,49%	99,49%			
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.1.02.01.01.0030	14.534.630	14.534.630	14.459.415	99,48%	99,48%			
				Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	5.1.02.01.01.0010	1.904.760	1.904.760	1.896.000	99,54%	99,54%			
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum Perangkat	Penyediaan Barang	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		32.734.180	32.734.180	32.525.553	99,36%	99,36%			
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.1.02.01.01.0026	32.734.180	32.734.180	32.525.553	99,36%	99,36%			
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum Perangkat	Penyediaan	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus/ Peralatan Kerja		215.895.142	215.895.142	215.470.000	99,80%	99,80%			
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.1.02.01.01.0004	215.895.142	215.895.142	215.470.000	99,80%	99,80%			
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum Perangkat	Fasilitasi Kunjungan	Penyediaan Makanan dan Minuman		28.465.140	28.465.140	28.457.100	99,97%	99,97%			
				Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.1.02.01.01.0058	28.465.140	28.465.140	28.457.100	99,97%	99,97%			
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Penunjang	Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)		20.536.147.189	15.484.993.213	15.023.883.930	97,02%	97,02%			
				Belanja Tagihan Air	5.1.02.02.01.0060	5.757.601.091	3.757.279.987	3.598.121.935	95,76%	95,76%			
				Belanja Tagihan Listrik	5.1.02.02.01.0061	14.660.049.889	11.609.217.017	11.335.823.184	97,65%	97,65%			
				Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.1.02.02.01.0063	111.985.920	111.985.920	86.355.185	77,11%	77,11%	nilai realisasi sesuai dengan nominal tagihan internet		
				Belanja Tagihan Telepon	5.1.02.02.01.0059	6.510.289	6.510.289	3.583.626	55,05%	55,05%	nilai realisasi sesuai dengan nominal tagihan telpon		
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Penunjang	Penyediaan Jasa	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy		126.720.000	126.720.000	126.675.000	99,96%	99,96%			
				Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.1.02.02.04.0115	126.720.000	126.720.000	126.675.000	99,96%	99,96%			
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik	Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus		9.756.230	9.756.230	4.652.100	47,68%	47,68%			
				Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.1.02.02.01.0067	9.756.230	9.756.230	4.652.100	47,68%	47,68%	nilai realisasi sesuai dengan nominal tagihan Pajak, Bea, dan Perizinan KDO		
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik	Penyediaan Jasa	Pemeliharaan / Service Kendaraan Dinas Operasional		82.332.250	82.332.250	67.453.490	81,93%	81,63%			
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.1.02.03.02.0038	31.149.481	31.149.481	21.060.350	67,61%	67,61%	nilai realisasi sesuai dengan nominal tagihan		
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.1.02.03.02.0036	9.484.200	9.484.200	8.590.400	90,58%	90,58%			
				Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.1.02.01.01.0012	4.639.800	4.639.800	4.628.700	99,76%	99,76%			
				Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.1.02.01.01.0013	318.230	318.230	244.000	76,67%	76,67%	nilai realisasi sesuai dengan nominal tagihan belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		
				Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bekel	5.1.02.01.01.0020	934.890	934.890	467.000	49,95%	49,95%	nilai realisasi sesuai dengan nominal tagihan		
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	5.1.02.03.02.0040	6.884.691	6.884.691	3.920.000	56,94%	56,94%	nilai realisasi sesuai dengan nominal tagihan		
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5.1.02.03.02.0039	27.341.908	27.341.908	26.984.100	98,69%	98,69%			
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.1.02.03.02.0037	1.579.050	1.579.050	1.558.440	98,69%	98,69%			
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik	Pemeliharaan/Rehabilita	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan		29.795.528.510	29.795.528.510	29.522.283.976	99,08%	99,08%			
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.02.02.01.0026	1.403.425.628	1.403.425.628	1.394.271.583	99,35%	99,35%			
				Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.1.02.02.01.0028	1.025.303.136	1.025.303.136	1.019.121.491	99,40%	99,40%			
				Belanja Jasa Tenaga Caraka	5.1.02.02.01.0032	127.584.148	127.584.148	126.852.215	99,43%	99,43%			
				Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.1.02.02.01.0027	574.128.666	574.128.666	570.576.770	99,38%	99,38%			
				Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.1.02.02.01.0030	8.484.345.842	8.484.345.842	8.367.724.205	98,63%	98,63%			
				Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.1.02.02.01.0031	11.546.365.394	11.546.365.394	11.465.423.766	99,30%	99,30%			
				Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	5.1.02.02.01.0035	6.634.375.696	6.634.375.696	6.578.313.946	99,15%	99,15%			
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik	Pemeliharaan/Rehabilita	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		60.196.169	60.196.169	58.444.800	97,09%	97,09%			
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.1.02.03.02.0117	4.106.124	4.106.124	3.896.100	94,89%	94,89%			
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.1.02.03.02.0121	9.621.612	9.621.612	8.863.100	92,12%	92,12%			
				Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.1.02.03.02.0406	1.642.443	20.462.178	20.246.400	98,95%	98,95%			
				Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.1.02.03.02.0411	10.881.255	10.881.255	10.315.450	94,80%	94,80%			
				Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	5.1.02.03.02.0133	15.125.000	15.125.000	15.123.750	99,99%	99,99%			
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik	Pemeliharaan/Rehabilita	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Rumah Susun		2.291.562.481	2.023.428.104	1.964.518.569	97,09%	97,09%			
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.1.02.01.01.0031	170.360.817	170.360.817	169.230.600	99,34%	99,34%			
				Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.1.02.01.01.0012	191.541.000	191.541.000	191.021.454	99,73%	99,73%			
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.1.02.01.01.0004	5.426.058	5.426.058	5.421.240	99,91%	99,91%			
				Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	5.1.02.03.02.0012	44.316.184	44.316.184	44.200.200	99,74%	99,74%			
				Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	5.1.02.03.03.0045	151.812.887	151.812.887	150.256.260	98,97%	98,97%			
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.1.02.03.02.0117	11.976.228	11.976.228	10.710.000	89,43%	89,43%	nilai realisasi sesuai dengan nominal tagihan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		
				Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	5.1.02.03.04.0083	464.037.915	344.947.433	321.089.700	93,08%	93,08%			
				Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.1.02.03.03.0001	259.102.505	259.102.505	231.250.740	89,25%	89,25%	nilai realisasi sesuai dengan nominal tagihan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		
				Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.1.02.01.01.0001	825.000	825.000	624.375	75,68%	75,68%	nilai realisasi sesuai dengan nominal tagihan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	5.1.02.03.02.0040	992.163.887	843.119.992	840.714.000	99,71%	99,71%			

MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SPJ) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
								Rp	%		
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN VIII						39.994.014.052	30.718.056.144	29.359.905.034	95,58%	95,58%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00%	100,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.1.02.01.01.0027	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00%	100,00%	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja		1.044.386.974	1.643.856.570	1.528.860.620	93,00%	93,00%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan	5.1.02.01.01.0036	228.828.670	229.907.836	214.262.070	93,19%	93,19%	
				Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	5.2.02.02.02.0001	29.788.220	29.788.220	27.311.550	91,69%	91,69%	
				Belanja Modal Mebel	5.2.02.05.02.0001	14.485.350	131.673.454	129.435.500	98,30%	98,30%	
				Belanja Modal Alat Pembersih	5.2.02.05.02.0003	171.088.500	171.088.500	168.165.000	98,29%	98,29%	
				Belanja Modal Alat Pendingin	5.2.02.05.02.0004	6.866.420	54.616.210	54.001.500	98,87%	98,87%	
				Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	5.2.02.06.02.0011	85.413.900	85.413.900	85.350.000	99,93%	99,93%	
				Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	5.2.04.02.01.0008	14.681.040	14.681.040	14.680.000	99,99%	99,99%	
				Belanja Pakaian Penyelamatan	5.1.02.01.01.0067	416.016.414	416.016.414	398.123.000	95,70%	95,70%	
				Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	5.2.04.03.02.0004	77.218.460	225.857.060	167.055.000	73,96%	73,96%	Harga satuan barang di pasaran lebih murah dibandingkan harga DPA
				Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	5.2.02.04.01.0010	-	35.382.050	30.700.000	86,77%	86,77%	Harga satuan barang di pasaran lebih murah dibandingkan harga DPA
				Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.02.05.01.0005	-	8.696.160	6.496.000	74,70%	74,70%	Harga satuan barang di pasaran lebih murah dibandingkan harga DPA
				Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.2.02.06.01.0001	-	33.077.110	33.070.000	99,98%	99,98%	
				Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.2.02.06.01.0006	-	139.093.416	134.310.000	96,56%	96,56%	
				Belanja Modal Personal Computer	5.2.02.10.01.0002	-	44.746.350	43.956.000	98,23%	98,23%	
				Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.2.02.10.02.0005	-	23.818.850	21.945.000	92,13%	92,13%	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)		67.372.800	67.372.800	66.198.180	98,26%	98,26%	
				Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.1.02.01.01.0009	67.372.800	67.372.800	66.198.180	98,26%	98,26%	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor		79.507.885	79.507.885	78.699.555	98,98%	98,98%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	79.507.885	79.507.885	78.699.555	98,98%	98,98%	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		47.860.417	47.860.417	47.086.755	98,38%	98,38%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.1.02.01.01.0026	47.860.417	47.860.417	47.086.755	98,38%	98,38%	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		18.203.339	18.203.339	17.985.330	98,80%	98,80%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.1.02.01.01.0030	18.203.339	18.203.339	17.985.330	98,80%	98,80%	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus/ Peralatan Kerja		56.058.600	56.058.600	56.058.600	100,00%	100,00%	
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.1.02.01.01.0004	56.058.600	56.058.600	56.058.600	100,00%	100,00%	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman		22.377.300	22.377.300	20.600.888	92,06%	92,06%	
				Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.1.02.01.01.0058	22.377.300	22.377.300	20.600.888	92,06%	92,06%	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)		17.961.140.752	7.030.926.330	6.205.294.990	88,26%	88,26%	
				Belanja Tagihan Air	5.1.02.02.01.0060	5.481.075.922	2.347.706.040	2.267.401.925	96,58%	96,58%	
				Belanja Tagihan Listrik	5.1.02.02.01.0061	12.428.737.950	4.631.893.410	3.886.566.534	83,91%	83,91%	Tagihan di Rusun PIR II belum terealisasi dikarenakan serah terima di jadwalkan bulan november 2022 belum terealisasi dikarenakan masih banyak kerusakan.
				Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.1.02.02.01.0063	51.326.880	51.326.880	51.326.531	100,00%	100,00%	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy		74.923.200	74.923.200	72.028.440	96,14%	96,14%	
				Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.1.02.02.04.0115	74.923.200	74.923.200	72.028.440	96,14%	96,14%	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus		2.085.600	3.152.000	3.099.800	98,34%	98,34%	
				Belanja Pembavaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.1.02.02.01.0067	2.085.600	3.152.000	3.099.800	98,34%	98,34%	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan / Service Kendaraan Dinas Operasional		43.358.847	43.358.847	41.576.580	95,89%	95,89%	
				Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	5.1.02.01.01.0020	623.260	623.260	615.606	98,77%	98,77%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-	5.1.02.03.02.0036	25.390.915	25.390.915	24.129.072	95,03%	95,03%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-	5.1.02.03.02.0038	4.865.454	4.865.454	4.818.355	99,03%	99,03%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-	5.1.02.03.02.0040	12.479.218	12.479.218	12.013.547	96,27%	96,27%	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja		67.818.454	44.148.758	37.978.792	86,02%	86,02%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-	5.1.02.03.02.0121	14.628.240	14.628.240	10.434.000	71,33%	71,33%	Jasa Pemeliharaan di pasaran lebih murah dari pada harga
				Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-	5.1.02.03.02.0133	20.879.584	20.879.584	19.635.900	94,04%	94,04%	

MONITORING APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	APBD TA.2022 (Rp)	APBD-P TA.2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (SP) S.D 30 DESEMBER 2022		Progress Fisik / Capaian	Kendala Yang Dihadapi
								Rp	%		
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN VIII						39.994.014.052	30.718.056.144	29.359.905.034	95,58%	95,58%	
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.1.02.03.02.0117	28.455.372	4.785.676	4.233.438	88,46%	88,46%	Jasa Pemeliharaan di pasaran lebih murah dari pada harga satuan di DPA
				Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.1.02.03.02.0405	2.851.530	2.851.530	2.672.547	93,72%	93,72%	
				Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan	5.1.02.03.02.0411	1.003.728	1.003.728	1.002.907	99,92%	99,92%	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan		19.232.241.268	20.261.092.182	20.023.894.146	98,83%	98,83%	
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.02.02.01.0026	1.469.029.056	1.531.009.776	1.509.666.080	98,61%	98,61%	
				Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.1.02.02.01.0027	428.466.808	446.544.518	443.726.538	99,37%	99,37%	
				Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.1.02.02.01.0028	970.801.340	932.093.760	918.007.739	98,49%	98,49%	
				Belanja Jasa Tenaga Caraka	5.1.02.02.01.0032	122.419.088	127.584.148	126.779.020	99,37%	99,37%	
				Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.1.02.02.01.0030	5.692.487.592	5.932.662.882	5.860.650.331	98,79%	98,79%	
				Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.1.02.02.01.0031	6.916.678.472	7.208.504.362	7.128.562.064	98,89%	98,89%	
				Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	5.1.02.02.01.0035	3.632.358.912	4.082.692.736	4.036.502.374	98,87%	98,87%	
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Rumah Susun		1.268.678.616	1.317.217.916	1.152.542.358	87,50%	87,50%	
				Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.1.02.01.01.0001	69.288.395	69.288.395	67.821.000	97,88%	97,88%	
				Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.1.02.01.01.0012	82.234.251	82.234.251	79.387.200	96,54%	96,54%	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.1.02.01.01.0031	136.266.515	136.266.515	117.446.880	86,19%	86,19%	Harga satuan barang di pasaran lebih murah dibandingkan harga DPA
				Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	5.1.02.03.02.0012	60.715.270	60.715.270	53.146.800	87,53%	87,53%	Harga satuan barang di pasaran lebih murah dibandingkan harga DPA
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	5.1.02.03.02.0040	332.524.210	332.524.210	281.847.258	84,76%	50,00%	Harga satuan barang di pasaran lebih murah dibandingkan harga DPA
				Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	5.1.02.03.04.0126	220.000.000	220.000.000	159.396.000	72,45%	72,45%	Harga satuan barang di pasaran lebih murah dibandingkan harga DPA
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat	5.1.02.03.02.0117	159.741.230	92.147.380	87.867.600	95,36%	95,36%	
				Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-	5.1.02.03.03.0001	1.815.000	117.948.150	116.505.600	98,78%	98,78%	
				Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor	5.1.02.03.04.0083	206.093.745	206.093.745	189.124.020	91,77%	91,77%	

Mengetahui,
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Sarjoko
196703191998031006